

**ANALISIS IMPLEMENTASI KAWASAN TEKNOPOLITAN  
KABUPATEN PELALAWAN  
(STUDI KASUS : KECAMATAN LANGGAM)**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Pada Fakultas Teknik  
Universitas Islam Riau*



**OLEH :**

**AFNI MONITA YULANDRA**  
**NPM : 143410659**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KAWASAN TEKNOPOLITAN  
KABUPATEN PELALAWAN  
(STUDI KASUS : KECAMATAN LANGGAM)**



**NAMA : AFNI MONITA YULANDRA**

**NPM : 143410659**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KAWASAN TEKNOPOLITAN  
KABUPATEN PELALAWAN  
(STUDI KASUS : KECAMATAN LANGGAM)**

**TUGAS AKHIR**



**AFNI MONITA YULANDRA**  
**NPM : 143410659**

**Disetujui Oleh :**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**RONA MULIANA, ST., MT**

**Ir. H. Firdaus, MP**

**Disahkan Oleh :**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK**

**KETUA PROGRAM STUDI**

**Ir. H. ABDUL KUDUS ZAINI, MT**

**PUJI ASTUTI, ST., MT**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Implementasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Kecamatan Langgam)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi S1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, mulai dari persiapan sampai penyelesaian penulisan namun dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, serta tidak lepas dari pertolongan Yang Maha Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Mardinis dan ibunda nuraini atas jasa, pengorbanan, dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya sejak penulis masih dalam kandungan sampai berhasil menyelesaikan studi di jenjang Universitas;
2. Kepada kakak saya Desti Arini Yulianti,ST dan abang saya Zulfitri Mardi, Amd, yang telah mendukung dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sampai berhasil menyelesaikan studi di jenjang Universitas;
3. Rektor Universitas Islam Riau Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL beserta seluruh jajarannya;
4. Bapak Dekan Fakultas Teknik Bapak Ir. H. Abdul Kudus Z, MT yang telah memberikan arahan kepada kami selama perkuliahan sampai penyelesaian pendidikan ini;

5. Para Pembantu Dekan, Staf Dosen, dan Staf Administrasi Fakultas Teknik yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh perkuliahan;
6. Ibu Puji Astuti, ST., MT selaku ketua jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota;
7. Ibu Rona Muliana, ST., MT dan Bapak Ir H. Firdaus, MP selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi hingga selesai;
8. Ibu Puji Astuti, ST., MT dan Bapak Muhammad Sofwan, ST., MT selaku penguji yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai;
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Islam Riau.
10. Teman – teman saya Ayu Wulandari, Sigit Fauza Ihwan, Rizki Agung Prabowo, Rendy Aditya yang telah menemani, membantu, memberikan dukungan selama masa perskripsian.
11. Ulat Squad yaitu Septia Fanny, ST, Masyitah Islami, ST, Aulia Fadilah, ST, Mita Rahmadani, ST, Suendah Jutari Putri, ST, Riski Hijrah Sahpitri, ST, yang telah banyak membantu di perkuliahan selama ini, terimakasih kalian sudah hadir dan mendukung skripsiku.
12. Tak lupa teman seperjuanganku seluruh teman-teman angkatan saya terutama ILC 14 yang selalu menemani saya dan menjadi pendengar setia saya di dalam maupun di luar bangku kuliah.
13. Terimakasih kepada kucing saya yang bernama Kecil, Induk, Manis, Belang, Cemot, dan Duo Kembar yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini hingga tengah malam dan selesai.
14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi.

Serta ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu atas dukungan dan doa demi kelancaran penyelesaian pendidikan saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga amal baik dari semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Juli 2019

Penulis,  
**Afni Monita Yulandra**  
143410569



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi perihal permasalahan pembangunan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Langgam. Berupaya untuk mengetahui implementasi kebijakan Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan teknopolitan , mengetahui perkembangan kawasan teknopolitan yang telah terlaksana, serta strategi penanganan yang dilakukan dalam implementasi kawasan teknopolitan Kabupaten Pelalawan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan di dalam pembangunan teknopolitan serta mengetahui perkembangan kawasan teknopolitan dan strategi penanganan dalam pembangunan kawasan teknopolitan. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif .

Hasil penelitian menjelaskan implementasi kawasan teknopolitan didukung oleh kebijakan yang telah dibentuk dan dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dalam perkembangannya kawasan teknopolitan sudah membangun kawasan pendidikan dan kawasan riset, dimana dalam pengembangan kawasan riset dibantu oleh pihak PPKS Medan dalam pembentukan bibit unggul kelapa sawit dan klinik kelapa sawit. Sehingga strategi yang yang digunakan untuk perkembangan teknopolitan secara berkelanjutan adalah dijalankannya litbang. Pemilihan strategi ini didasarkan dari potensi komunitas unggulan yang ada pada kawasan teknopolitan, komunitas unggulan dapat meningkatkan pendapatan daerah, pembangunan kawasan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, dan ekonomi nasional yang menghasilkan inovasi melalui teknologi modern.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Teknopolitan

## ABSTRACT

The background of this research is the problem of the development of the technopolitan area in Pelalawan Regency, Langgam District. Trying to find out the implementation of the Pelalawan Regency policy in the development of the technopolitan region, knowing the development of the technopolopoly area that has been carried out, as well as the strategy of handling carried out in the implementation of the Pelalawan Regency technopolitical area.

The purpose of this study is to determine the implementation of policies in techno-political development as well as to know the development of techno-political areas and strategies for handling in the development of techno-political areas. This type of research is descriptive with a qualitative approach.

The results of the study explained the implementation of the techno-political area was supported by policies that had been formed and made by the Pelalawan District government. In its development, the techno-political area has developed an education and research area, where in the development of the area, the assistance is assisted by PPKS Medan in the establishment of superior oil palm seedlings and oil palm clinics. So that the strategy used for sustainable techno-political development is the implementation of R&D, the selection of this strategy is based on the potential superior communities that exist in the technopolitic region, the leading community can increase regional income, regional development can increase employment, and the national economy that produces innovation through technology modern.

Keywords: Implementation, Policy, Technopark

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	xii
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Sasaran .....	7
1.3.1 Tujuan.....	7
1.3.2 Sasaran.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti .....	8
1.4.2 Manfaat Bagi Pemerintah atau Dinas Terkait .....	8
1.4.3 Manfaat Bagi Akademis .....	8
1.5 Ruang Lingkup.....	8
1.5.1 Ruang Lingkup Spasial.....	8
1.5.2 Ruang Lingkup Materi.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran .....	10
1.7 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II Kajian Pustaka</b> .....	13
2.1 Pengertian Teknopolitan.....	13
2.1.1 Teknopolitan Menurut Para Ahli .....	14
2.2 Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Riau .....	15
2.3 Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	30
2.4 Kebijakan Dasar Teknopolitan .....	31
2.4.1 Persyaratan Kawasan Teknopolitan .....	35
2.4.2 Dasar Hukum Teknopolitan.....	43
2.5 Teori George C.Edwards III.....	45
2.6 Teori Good Governance .....	47

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
3.1 Pendekatan Metode Penelitian .....	51
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	51
3.2.2 Waktu Penelitian .....	51
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	52
3.3.1 Jenis Data.....	53
3.3.2 Sumber Data .....	53
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	54
3.5 Populasi dan Sampel .....	55
3.5.1 Populasi .....	55
3.5.2 Sample .....	55
3.6 Teknik Sample.....	55
3.7 Teknik Analisis.....	56
3.7.1 Teknik analisis Deskriptif.....	56
3.7.2 Teknik Analisis Logical Framework Approach .....	55
3.8 Variabel Penelitian .....	64
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....</b>	<b>68</b>
4.1 Kondisi Geografis Kawasan Teknopolitan Pelalawan.....	68
4.1.1 Penggunaan Lahan.....	72
4.2 Konsepsi Kawasan Teknopolitan.....	77
4.3 Potensi Pengembangan Kawasan Teknopolitan.....	81
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>83</b>
5.1 Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program Kawasan Teknopolitan.....	83
5.1.1 Kebijakan Pembangunan Wilayah Riau .....	83
5.1.2 Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pelalawan .....	85
5.1.3 Kebijakan Dasar Teknopolitan .....	86
5.1.3.1 Ketersediaan Dukungan dari Pihak Politik dan Akademis.....	86
5.1.3.2 Keberadaan Kewirausahaan .....	87
5.1.3.3 Keberadaan Komunitas Santifik dan Enterpreneur.....	88
5.1.3.4 Jaringan Informasi.....	89

5.1.3.5 Promosi.....	90
5.1.3.6 Keberadaan Inkubator .....	91
5.1.4 Persyaratan Teknopolitan .....	92
5.1.4.1 Memiliki Sumber Daya Manusia yang Handal .....	92
5.1.4.2 Sumber Daya Alam yang dapat Dikembangkan ...	94
5.1.4.3 Sarana dan Prasaarana Pndukung.....	95
5.2 Analisis Perkembangan Kawasan Teknopolitan .....	97
5.2.1 Zona Pendidikan .....	97
5.2.2 Zona Lembaga Riset.....	100
5.2.3 Zona Industri.....	102
5.2.4 Zona Permukiman.....	104
5.2.5 Zona Perkantoran.....	105
5.2.6 Zona Perdagangan dan Jasa .....	107
5.2.7 Zona Fasilitas Umum.....	109
5.3 Strategi Penanganan Implementasi Kawasan Teknopolitan .....	121
5.3.1 Analisis Siuasi .....	121
5.3.2 Analisis Pemangku Kepentingan.....	122
5.3.3 Analisis Stakeholder .....	125
5.3.4 Analisis Permasalahan .....	130
5.3.4.1 Analisis Permasalahan Hasil Penelitian .....	130
5.3.4.2 Analisis Permasalahan <i>Stakeholder</i> .....	131
5.3.4.3 Analisis Permasalahan Program yang Belum Termplementasi pada Kawasan Teknopolitan .....	132
5.3.5 Analisis Tujuan.....	136
5.3.6 Analisis Alternatif Strategi Pengembangan.....	137
5.3.7 Penyusunan Matriks Logical Framework (Logframe Matrix) .....	138
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
6.1 Kesimpulan.....	142
6.2 Saran.....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xii</b>
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	47
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	52
Tabel 3.2 Identifikasi Stakeholder yang Terkait .....	58
Tabel 3.3 Struktur Matriks Logframe .....	63
Tabel 3.4 Variabel Penelitian .....	65
Tabel 3.5 Desain Penelitian.....	66
Tabel 4.1 Penggunaan Lahan di Teknopolitan Pelalawan .....	73
Tabel 4.2 Indikator Perkebunan Kecamatan Langgam Tahun 2018.....	78
Tabel 5.1 Rencana dan Eksisting Kawasan Teknopolitan .....	112
Tabel 5.2 Matriks Indikasi Program Pengembangan Kawasan Teknopolitan .....	117
Tabel 5.3 Identifikasi Stakeholder yang Terlibat .....	126
Tabel 5.4 Analisis Kepentingan (Interest) dan Dampak Instansi Terhadap Implementasi Kawasan Teknopolitan.....	126
Tabel 5.5 Hasil Wawancara Instansi.....	128
Tabel 5.6 Matriks LFA Implementasi Kawasan Teknopolitan .....	139

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Orientasi Kawasan Teknopolitan .....	71
Gambar 4.2 Pembagian Zonasi di Teknopolitan Pelalawan .....	74
Gambar 4.3 Peta Penggunaan Lahan .....	75
Gambar 4.4 Peta Zonasi Kawasan Teknopolitan .....	76
Gambar 4.5 Peta Pembagian Blok Kawasan Teknopolitan Pelalawan .....	80
Gambar 5.1 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Teknopolitan .....	119
Gambar 5.2 Peta Kondisi Eksisting Kawasan Teknopolitan .....	120
Gambar 5.3 Isu Permasalahan Pembangunan Kawasan Teknopolitan .....	122
Gambar 5.4 Pohon Permasalahan Implementasi Kawasan Teknopolitan...	135
Gambar 5.5 Pohon Tujuan Implementasi Kawasan Teknopolitan	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, Indonesia harus memperhatikan tenaga kerja yang tidak hanya memperhitungkan kuantitas, namun juga harus melihat dari segi kualitas. Secara kuantitas, jumlah tenaga kerja Indonesia memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN yaitu sebesar 125,3 juta orang. Namun, jika hanya mengandalkan kuantitas saja, Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan negara lain yang memiliki tenaga kerja dengan kualitas yang baik. Kualitas tenaga kerja Indonesia masih dikatakan lemah, sebab (45,19 persen) mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan (70 persen) lebih banyak bekerja pada sektor informal. Selain itu, persaingan tenaga kerja di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak sekedar mampu menghasilkan tenaga kerja dengan kualitas berstandar internasional, tetapi juga dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu berkompetisi di kancah regional dan global (Fathur Rahman,2016).

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia ialah dengan membuat inovasi dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dengan memastikan pembangunan ekonomi linear dengan pembangunan manusia. Sebab, kualitas tenaga kerja yang tinggi akan dicapai jika diimbangi dengan kualitas manusia yang berdaya saing unggul. Akses terhadap kesehatan, pendidikan, komunikasi, teknologi, dan fasilitas publik lainnya akan menentukan kualitas tenaga kerja Indonesia. Hal ini berarti bahwa harus ada keterpaduan dan keterpadanan (*link and match*) antara sumber daya manusia

dengan fasilitas publik yang telah disebutkan di atas. Keterpaduan dan keterpadanan ini dapat diwujudkan dalam bentuk penerapan secara fisik berupa kawasan yang memiliki berbagai dimensi antara lain pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang disebut sebagai teknopolitan (Fathur Rahman,2016). Maka tertuang dalam surat shad ayat 27 yang dilihat sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka” (QS. shad : 27)

Secara nasional, Indonesia belum memiliki supsektor kawasan teknopolitan, namun pengembangan kawasan teknopolitan menjadi sangat penting dalam rangka menumbuh-kembangkan kawasan berbasis teknologi. Jika dilihat dari pengertiannya bahwa teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdimensi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi dan pembelajaran. Sementara itu, kawasan teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi. Pengertian lain mengenai kawasan teknopolitan adalah suatu kawasan khusus yang dibangun berdasarkan komitmen memiliki satu atau

lebih sentra kegiatan iptek yang mampu mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi dalam kerangka sistem inovasi (Warseno,2014). saat ini ada beberapa kawasan teknopolitan di Indonesia yang telah terealisasi diantaranya Bandung, Batam, Cimahi, Pekalongan, Cilegon, Solo (Kenenristek, 2017)

Ditinjau dari kebijakan nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, khususnya pengembangan Koridor Ekonomi Pulau Sumatera, bahwa pengembangan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan yang berbasis pada industri hilir kelapa sawit merupakan salah satu upaya yang strategis untuk mengembangkan wilayah berbasis potensi sumberdaya alam dengan mengandalkan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kolaborasi yang terpadu antara pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan masyarakat (Astri Priyani,2017).

Dukungan kebijakan pembangunan Provinsi Riau terhadap pengembangan teknopolitan pelalawan akan tercermin pada Rencana Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP/RPJM) Provinsi Riau. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera sebagai landasan pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Konsep pengembangan kawasan teknopolitan merupakan salah satu bagian dari konsep pengembangan kawasan berbasis teknologi, yaitu kawasan berdimensi

pembangunan ekonomi dengan sentra ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mendukung percepatan perkembangan inovasi. Sehingga telah berkembang kawasan berbasis teknologi sesuai dengan karakteristiknya, antara lain Technopark/ Sciencepark, Technopolis atau Teknopolitan dan Innovation Cluster (Warseno,2014).

Pemerintah Kabupaten Pelalawan berinisiatif membangun kawasan teknopolitan didasarkan pada potensi sumberdaya alam yang melimpah khususnya perkebunan kelapa sawit. Untuk mendorong terwujudnya kawasan teknopolitan berbasis kelapa sawit diperlukan peran aktif pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam penyusunan terkait konsep pengembangan, pengelolaan dan mekanisme pembiayaan untuk pembangunan kawasan teknopolitan (Warseno,2014).

Kabupaten Pelalawan merencanakan pembangunan kawasan teknopolitan industri hilir kelapa sawit di lahan seluas 3.650 hektare, yang akan mengintegrasikan pengembangan multi sektor industri, riset dan teknologi, serta pendidikan. Tujuan pembangunan teknopolitan ini adalah sebagai kota baru dan pusat pengembangan ekonomi baru di koridor Sumatera. Pemda Pelalawan mengalokasikan luas kawasan teknopolitan hingga 3.650 hektare namun baru dikembangkan seluas 1.000 hektare. Pengembangan kawasan itu akan dilengkapi infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, jalan, pelabuhan, kereta api, hingga bandara internasional. Lokasi kawasan ini juga strategis karena relatif dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pemerintah daerah memfokuskan kegiatan ini di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Kawasan teknopolitan nantinya merupakan sebuah kompleks, tempat dimana lembaga riset, perguruan tinggi (Institut Teknologi Pelalawan) dan industri membina hubungan saling sinergi untuk menciptakan, menghasilkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif berbasis pengetahuan. Teknopolitan akan mendorong pengembangan ekonomi dan daya saing daerah melalui penciptaan peluang bagi usaha baru, yang inovatif dan menawarkan nilai tambah bagi usaha-usaha yang telah mapan. Kawasan teknopolitan juga akan tercipta akumulasi ilmu pengetahuan, dan terciptanya ruang yang kondusif bagi pekerja-pekerja berbasis pengetahuan sebagai hasil interaksi antara lembaga riset, perguruan tinggi dan industri. Kawasan teknopolitan ini nantinya akan terbagi menjadi 6 blok dimana terdiri dari Blok A untuk kegiatan pendidikan dan riset Blok B kegiatan Industri Blok C Permukiman Blok D Perkantoran Blok E Perdagangan dan Jasa dan Blok F Fasilitas Umum.

Salah satu cikal bakal dalam pembangunan teknopolitan adalah adanya tenopark (Teknologi Park) merupakan sebuah kawasan dimana teknologi ditampilkan, dikembangkan, dan dikomersialkan. *Stakeholder* dari sebuah teknopark biasanya adalah pemerintah (pemerintah daerah), komunitas peneliti (akademis), komunitas bisnis dan finansial.

Keberhasilan teknopolitan sendiri dapat ditentukan dengan adanya komitmen institusi yang terlibat didalamnya, dalam hal ini tentunya peran serta pemerintah di dalam penanganannya serta dibantu dengan tenaga riset. Infastruktur dasar yang kurang memadai menjadi salah satu kendala di dalam pelaksanaan pengembangan kawasan ini, seperti akses jalan yang belum memadai serta sarana dan prasarana yang belum memadai menjadi faktor penghambat dalam pengembangan kawasan

teknopolitan ditambah dengan masih terkendalanya izin pembebasan lahan yang belum selesai. Anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan juga menjadi salah satu kendala dalam pembangunan kawasan teknopolitan hal ini dikarena untuk membangun kawasan teknopolitan membutuhkan dana yang sangat besar sehingga dilakukan pembangunan secara bertahap.

Rendahnya tingkat perkembangan kawasan teknopolitan ini sendiri diduga disebabkan oleh rendahnya pembiayaan yang di anggarkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan di dalam APBD daerah sehingga pembangguna kawasan ini pun terbilang sangat lambat, rencesanya peranserta investor didalam pembangunan Kawasan Teknopolitan menjadi salah satu masalah dalam pengembangan kawasan ini, dan rendahnya keterlibatan masyarakat didalam pembangunan kawasan teknopolitan ini juga menjadi salah satu halangan didalam pengembangan kawasan teknopolitan ini.

Bukti lain tidak efektifnya proyek teknopolitan berskala besar ini dapat dilihat pada proses pembangunannya yang hingga saat ini belum usai. Proyek teknopolitan Pelalawan sudah mendapat izin pelepasan kawasan 3.600 hektar. Bahkan, pemerintah Kabupaten Pelalawann sudah melakukan tiga kali tahun anggaran sebagai dana ganti rugi tanaman masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini, anggaran yang sudah dituangkan pada APBD tidak kunjung terealisasikan. Tentu ini hal yang menjadi masalah yang serius dan harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Dengan kondisi ini, pada akhirnya tujuan utama pembangunan kawasan teknopolitan tidak dapat tercapai.

Dari permasalahan yang sudah dijabarkan diatas maka timbulah pertanyaan apakah implementasi kawasan teknopolitan ini telah berjalan dengan baik?. Untuk

itu di sini peneliti melakukan penelitian tentang evaluasi implemetasi kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi Kawasan Teknopolitan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengetahui perkembangan pembangunan Kawasan Teknopolitan. Penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “ **Analisis Implementasi Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan ( Studi Kasus : Kecamatan Langgam).**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam sub bab latar belakang diatas telah dibahas permasalahan kawasan teknopolitan. Dimana teknopolitan sendiri adalah salah satu rencana dari pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam rangka untuk memajukan daerah kabupaten. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan teknopolitan yang telah terlaksana?
2. Bagaimana pengembangan kawasan teknopolitan yang telah terlaksana?
3. Bagaimana strategi penanganan implementasi kawasan teknopolitan dilakukan oleh pemerintah Kabupatn Pelalawan?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan di dalam pembangunan teknopolitan serta mengetahui perkembangan kawasan teknopolitan dan strategi penanganan dalam pembangunan kawasan teknopolitan.

#### **1.3.2 Sasaran**

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1 Mengidentifikasi implementasi kebijakan pada kawasan teknopolitan.
- 2 Mengidentifikasi perkembangan kawasan teknopolitan yang telah terimplementasi.
- 3 Menganalisis penanganan implementasi kawasan teknopolitan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam rangka memperdalam ilmu pengetahuan serta memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian.

#### **1.4.2 Manfaat Bagi Pemerintah atau Dinas Terkait**

Hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat dan bahan pertimbangan bagi perencana dan pengambilan keputusan kebijakan yaitu pemerintah Daerah atau Instansi terkait dalam mendorong pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

#### **1.4.3 Manfaat Bagi Akademis**

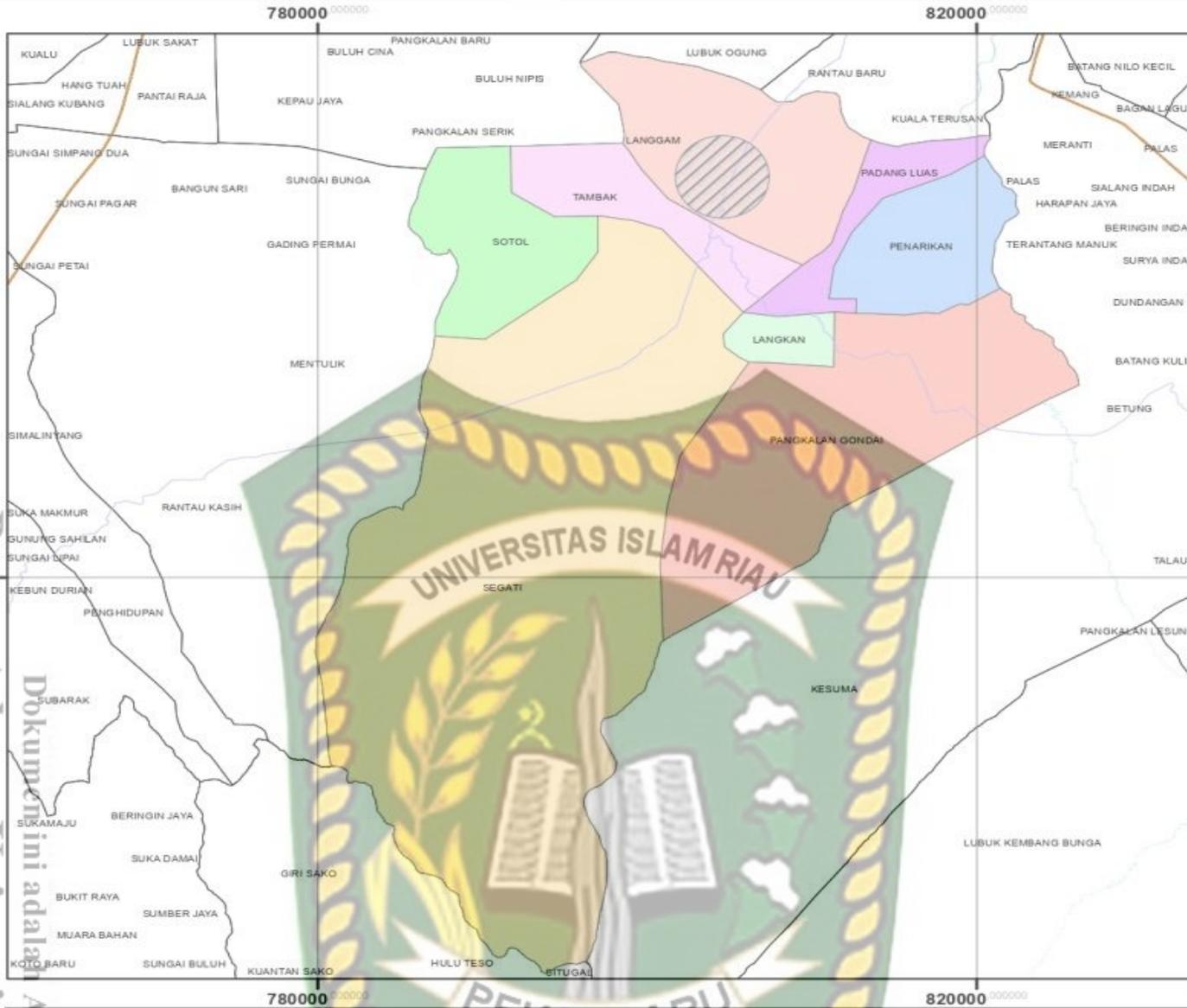
Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat menampah ilmu pengetahuan serta referensi/literatur yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.

### **1.5 Ruang Lingkup**

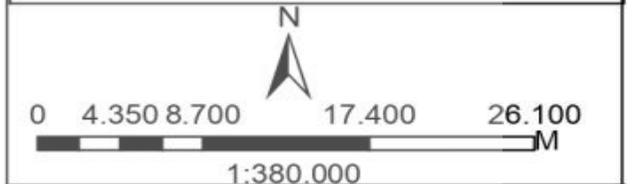
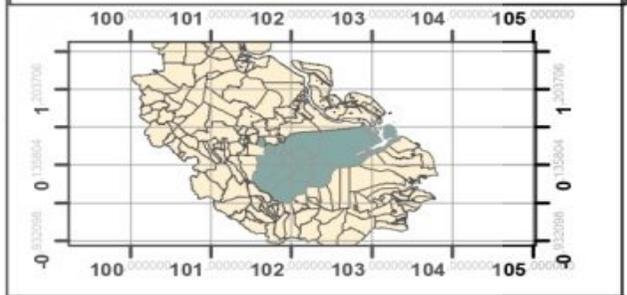
Dalam ruang lingkup ini dibagi menjadi 2 bagian penting, yaitu ruang lingkup spasial dan ruang lingkup materi.

#### **1.5.1 Ruang Lingkup Spasial**

Pada ruang lingkup spasial atau lokasi penelitian hanya berfokus pada kawasan teknopolitan Kabupaten Pelalawan tepatnya berada pada Kecamatan Langgam.



**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2019**



**Afni Monita Yulandra**  
**143410659**

Sumber :  
Hasil Analisis, 2018

**PETA ORIENTASI KAWASAN TEKNOPOLITAN**

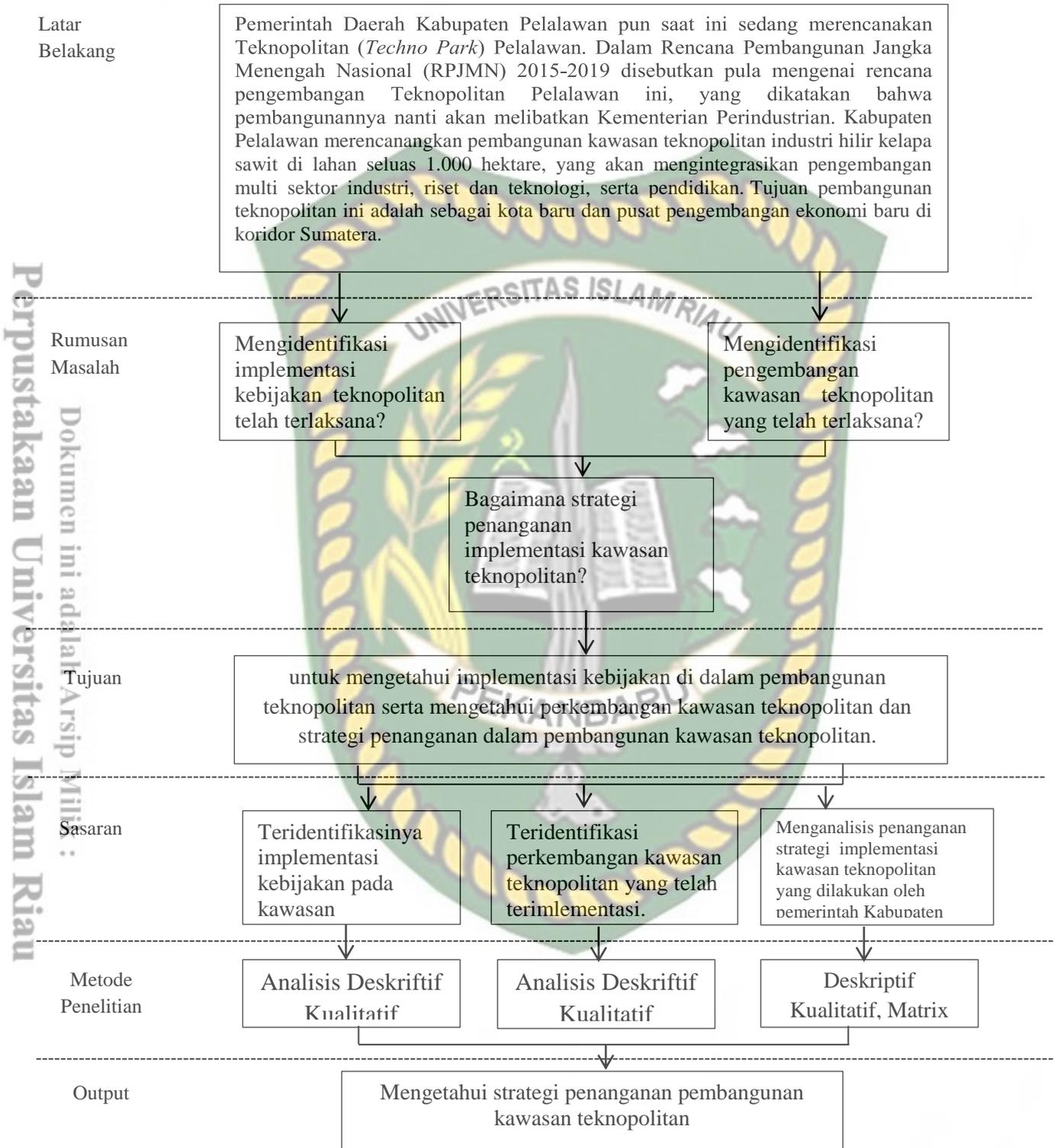
<b>Gambar 4.5</b>	<b>Halaman 95</b>
-------------------	-------------------

### 1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah kawasan teknopolitan. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui implementasi kebijakan di dalam pelaksanaan teknopolitan Pelalawan dengan menggali secara lebih mendalam aspek – aspek yang mencakup kebijakan implementasi. Ruang lingkup yang akan dibahas adalah aspek – aspek yang akan dikaji dalam penelitian. Aspek tersebut dibatasi pada :

1. Tinjauan peran pemerintah di dalam pengembangan kawasan teknopolitan
2. Tinjauan perkembangan pembangunan kawasan teknopolitan
3. Dari hasil tinjauan peran pemerintah dan dilihat dari perkembangan kawasan maka disusun strategi penanganan yang sesuai dengan masalah.

## 1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Implementasi Kawasan Teknopolitan Pada Zona Industri di Kabupaten Pelalawan” ini terdiri dari 6 bab yang meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang secara singkat sebagai dasar penelitian ini dilakukan. Selain itu pada bab ini akan merumuskan masalah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang teori-teori yang relevan berkaitan dengan penelitian, yaitu kebijakan pemerintah, teori *George C. Edwards III*, serta teori *Good Governance*. Selain itu, dalam bab ini diuraikan perbandingan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu berguna sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan pendekatan, tahapan dan jenis penelitian serta teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan penelitian. Cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyusun serta menganalisis data sehingga diperoleh makna yang sebenarnya. Metode pendekatan induktif yang berarti menekankan pada pengamatan atau observasi lapangan dahulu, lalu menarik kesimpulan.

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

Bab ini menyajikan deskripsi atau gambaran wilayah penelitian yaitu Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Langgam serta Kawasan Teknopolitan. Menguraikan, kondisi wilayah dimulai dari topografi, demografi penduduk, sarana dan prasarana di daerah penelitian. Serta memaparkan konsep kawasan teknopolitan yang akan diteliti..

#### **BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Memaparkan tentang hasil analisis , *Logical Framework* dengan hipotesa-hipotesa yang ada dan sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan mengenai perkembangan kawasan Teknopolitan dan strategi yang digunakan dalam penyelesaian masalah – masalah yang ada.

#### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan beberapa rekomendasi yang dapat mengatasi permasalahan atau Strategi yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan teknopolitan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Teknopolitan

Kawasan teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi. Pengertian lain mengenai kawasan teknopolitan adalah suatu kawasan khusus yang dibangun berdasarkan komitmen memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek yang mampu mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi dalam kerangka sistem inovasi (Warseno,2014)

Kawasan teknopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi (Taufik T, dalam BPPT Pekalongan,2012).

Teknopolitan merupakan suatu kawasan khusus yang dibangun berdasarkan komitmen memiliki satu atau lebih sentra kegiatan iptek yang mampu mewujudkan keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri yang merupakan wahana penguatan jaringan inovasi dalam kerangka sistem inovasi. Atau dalam pengertian yang lebih sederhana Teknopolitan adalah adalah suatu kawasan khusus yang berfungsi

sebagai wahana jaringan antara sentra- sentra kegiatan iptek, lembaga pendidikan tinggi, lembaga litbang, dan industri, dalam melakukan aktivitas-aktivitas penguatan sistem inovasi.

Teknopolitan adalah suatu komunitas terstruktur yang ditujukan untuk pengembangan inovasi. Teknopolitan biasanya membawa bersama-sama ke satu lokasi. komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun inovasi yaitu akademisi, lembaga riset dan perusahaan-perusahaan. Semuanya itu diwujudkan dalam suatu momentum dan visi jangka panjang yang dielaborasi oleh setiap pimpinan ketiga kelompok tadi. Dari sisi manfaat tidak terukur seperti energi, pengetahuan ilmiah, konsensus sosial dan kewirausahaan sama pentingnya dengan manfaat terukur seperti infrastruktur fisik, fasilitas teknologi, investasi litbang. Dikotomi kedua hal tersebut yang umumnya merupakan tantangan dalam membangun teknopolitan.

Keberhasilan dalam pengembangan dalam teknopolitan dapat dilihat pada *science techno park* di Stanford yang berupa taman yang diinovasi menjadi lembah tumbuhan, kemunian di Fukugawa Jepang terdapat pulak *science park* yang mampu berkontribusi pada nilai tambah untuk industri berbasis teknologi, selanjutnya terdapat *techno park* di Malaysia yang berfokus pada penelitian kolaboratif dan pengembangan di bidang otomotif, bioteknologi, dan elektronik, selain itu adapula Korea yang berhasil memetakan cluster inovasi berdasarkan pendirian *science techno park* (Tolinggi,2019).

### 2.1.1 Teknopolitan Menurut Para Ahli

Menurut *Association of University Related Research Parks* , Technopark

Adalah :

- a. Bangunan yang dirancang untuk fasilitas riset dan pengembangan publik maupun pribadi, juga industri berbasis teknologi yang didasarkan ilmu pengetahuan yang tinggi.
- b. Hubungan formal antara industri dengan satu atau lebih universitas ataulain institusi dari pendidikan yang lebih tinggi dalam operasional riset ilmu pengetahuan berbasis teknologi.
- c. Peran industri dalam mempromosikan riset dan pengembangan oleh universitas agar membantu di pertumbuhan teknologi industri yang baru,
- d. Pertukaran ilmu pengetahuan dan bisnis antara pihak industri dan universitas (AUTM, 2000)

Menurut *Luis Sanz*, *Geneeral Manager IASP* (Perkumpulan Intrnasional dari *Science Park*). Mengatakan suatu *Tecnopark* atau *Science Park* adalah suatu ruang, fisik atau *Cybernetic*, yang diatur oleh suatu tim profesional yang khusus yang menyediakan jasa yang memberikan nilai tambah, dengan tujuan utama adalah meningkatkan daya saing tentang wilayah atau daerahnya untuk merangsang suatu kultur dari invasi dan mutu juga menghubungkan institusi pendidikan dengan industri berdasarkan ilmu pengetahuan dan bisnis, mengorganisir perpindahan ilmu pengetahuan teknologi dari Universitas ke industri, dan dengan begitu industri dengan aktif menciptakan inovasi baru (Wawan K. Tolinggi,2019)

Menurut *Aegean Tech Turki Technopark* adalah suatu tempat yag

menarik dan berisi bangunan indah yang berfungsi sebagai pusat penelitian atau ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menciptakan penemuan baru, adanya hubungan kerjasama di bidang teknologi antara universitas, industri dan laboratorium riset, serta adanya dukungan dari manajemen *technopark* secara sistematis dengan tujuan mengembangkan keterampilan manajemen, temukan solusi kepada semua tingkatan dari proses inovasi, hingga jasa konsultasi dari fasilitas kantor yang modern (Aegean,2000).

## 2.2 Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Riau

Pengembangan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan memerlukan dukungan kebijakan yang sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Riau. Kebijakan yang harmoni dan selaras antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu faktor utama bagi keberhasilan pengembangan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan. Dukungan kebijakan yang kondusif dari Pemerintah Provinsi Riau akan meningkatkan daya tarik investasi di Kawasan Teknopolitan

Dukungan kebijakan pembangunan Provinsi Riau terhadap pengembangan Teknopolitan Pelalawan akan tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP/RPJM) Provinsi Riau. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera sebagai landasan pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau dalam 20 tahun mendatang kebijakan prioritas pembangunan diarahkan kepada pencapaian sasaran -sasaran pokok. Beberapa kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Riau berikut sasaran pokok yang hendak dicapai yang diharapkan dapat mendukung pengembangan Teknopolitan Pelalawan adalah sebagai berikut :

**A. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian,**  
dengan sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau Sumatera, dan Negara negara di wilayah Asia Tenggara.
2. Terciptanya kualitas pelayanan sarana dan jasa perekonomian yang berskala nasional dan internasional.
3. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi darat berfungsi arteri primer yang menghubungkan pusat - pusat Provinsi, terintegrasinya jaringan jalan konfigurasi Utara, Tengah, dan Selatan; dan terintegrasinya jaringan jalan dengan moda transportasi lainnya.
4. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut yang berfungsi sebagai *internationalport* dan *national port* di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, danPekanbaru/Tenayan; terbangunnya struktur kepelabuhan di Provinsi Riau secara hirarkis;

- dan terintegrasinya transportasi laut dengan moda transportasi lainnya.
5. Terbangunnya pembangkit energi listrik yang bersifat otonom yang dikelola daerah untuk pelayanan kebutuhan masyarakat perkotaan dan perdesaan, sebagai antisipasi krisis energi listrik negara.
  6. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi udara yang menghubungkan Provinsi Riau dengan wilayah Nasional dan antar bagian wilayah di Provinsi Riau dan terintegrasinya transportasi udara dengan moda transportasi lainnya.
  7. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi sungai dan penyeberangan yang menghubungkan antar bagian wilayah di Provinsi Riau dan antara Provinsi Riau dengan negara tetangga serta terintegrasinya transportasi sungai dan penyeberangan dengan moda transportasi lainnya.
  8. Terbangunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur wilayah melalui kemitraan Pemerintah dengan swasta.

**B. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing, ditandai oleh hal-hal berikut:**

1. Tercapainya laju pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan sekitar di atas 7% - 8,5 % per tahun hingga tahun 2025 dengan pendapatan per kapita sekitar US \$ 9.000,00.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan sektor perekonomian yang dalam jangka panjang tetap mampu mendukung perekonomian Provinsi Riau, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perikanan, peternakan,

pariwisata, dan jasa.

3. Penguatan perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian, industri dan jasa ditujukan untukantisipasi habisnya migas masa datang.
  4. Terbangunnya agroindustri dan agrobisnis sebagai hilir kegiatan pertanian dan perkebunan yang mampu meningkatkan nilai tambah produksi daerah.
  5. Terjaganya tingkat produksi dan kontribusi sektor pertambangan migas yang mantapterhadap perekonomian Nasional dan Provinsi Riau.
  6. Tumbuhnya usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor primer,sekunder, dan tersier yang saling terkait dalam proses penambahan nilai, terutama dikawasan perdesaan.
  7. Tersedianya infrastruktur ekonomi dengan tingkat pelayanan yang berkualitas di bidang transportasi, komunikasi, informasi, produksi, dan pemasaran.
- C. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera**, ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Tersedianya prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Riau.
  2. Tersedianya prasarana dan pelayanan kesehatan yang memadai yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat yang diindikasikan oleh peningkatan indeks harapan hidup masyarakat Riau.
  3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditunjukkan oleh

peningkatan IPM hingga batas minimal status IPM atas, yaitu sebesar 80 pada tahun 2025.

4. Peningkatan kualitas sosial-ekonomi masyarakat Riau yang ditunjukkan oleh penurunan bagian masyarakat miskin hingga 5% dan seluruh rumah tangga di Provinsi Riau; peningkatan TPAK hingga 90%; penurunan tingkat pengangguran terbuka dan setengah menganggur; dan peningkatan keterlibatan penduduk usia kerja di sektor ekonomi formal.
5. Terciptanya usaha ekonomi berbasis masyarakat berskala menengah dan kecil untuk menampung peningkatan jumlah penduduk usia kerja.
6. Terjadinya pergeseran lapangan kerja dari sektor pertanian menuju industri dan jasa berbasis pertanian dan sumber daya alam lainnya.
7. Peningkatan produktifitas melalui pelatihan, peningkatan ketrampilan, dan mutu manajemen mutu sesuai dengan standar yang diakui secara internasional dalam rangka pembukaan peluang lapangan kerja baru terutama ditujukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat tempatan.
8. Tersedianya infrastruktur sosial, politik, dan budaya yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Riau melalui dukungan sarana elektronik dan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.

**D. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, ditandai oleh hal-hal berikut:**

1. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat kegiatan secara

- berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah yang dituju.
2. Terbangunnya keterpaduan pembangunan wilayah daratan, pesisir, laut, dan pulau pulau kecil dalam pembentukan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah.
  3. Tersedianya prasarana dan utilitas perkotaan yang mendukung perkembangan pusat pertumbuhan dan kegiatan sesuai dengan skala pelayanan pusat yang bersangkutan.
  4. Tersedianya air bersih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir.
  5. Tersedianya infrastruktur wilayah mencakup jaringan jalan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi sungai dan penyeberangan yang terintegrasi dan berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah.
  6. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan orde kedua dan ketiga di wilayah Riau bagian Selatan dan Barat untuk menghindari peningkatan keterpusatan (*primacy*) Kota Pekanbaru dan mengurangi disparitas pertumbuhan antar wilayah.
  7. Terciptanya sentra-sentra dan *cluster* produksi di setiap bagian wilayah sesuai dengan komoditi unggulannya.
  8. Terciptanya pusat-pusat perdesaan atau agropolitan yang berfungsi mendorong proses pertambahan nilai produk lokal melalui kegiatan pengolahan dan jasa perdagangan.
  9. Terbangunnya prasarana penghubung yang berfungsi sebagai *feeder* antara sentra sentra produksi dan pusat-pusat perdesaan dengan

jaringan transportasi utama dan pusat pada *orde* yang lebih tinggi.

10. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang cukup di wilayah yang menjadi sentra produksi dan pusat-pusat kegiatan.

**E. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah,**

ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terbangunnya kerjasama antara Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, dan lingkungan.
2. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan.
3. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera di bidang ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan-keamanan.
4. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan provinsi lainnya di luar Pulau Sumatera di bidang ekonomi, kependudukan, dan sosial.
5. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan-keamanan.
6. Terbangunnya kerjasama antara Provinsi Riau dengan negara tetangga di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Sementara itu, Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 yang akan mendukung pengembangan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian seperti :

1. Mendorong pembangunan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, industri yang berbasis pertanian, untuk menggantikan kedudukan migas sebagai sektor utama penghasil daerah.
2. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kegiatan industri, perdagangan, dan jasa perbankan berskala internasional dan regional pada pusat-pusat kegiatan berskala PKN dan PKW sesuai dengan fungsi utama yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau.
3. Membangun pusat-pusat aglomerasi industri dan terminal regional yang berfungsi distribusi dan koleksi komoditi pada kota-kota pelabuhan utama.
4. Memfungsikan pusat-pusat kegiatan utama sebagai pusat pertemuan, konvensi, konferensi, dan pameran kegiatan bisnis berskala internasional.
5. Membangun pusat-pusat penelitian dan pengembangan untuk menjawab tantangan krisis pangan, energi, ICT dan masalah social.
6. Membangun prasarana pelabuhan laut internasional dan nasional di Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Pekanbaru.
7. Membangun bandar udara baru berfungsi sebagai Pusat Penyebaran Primer sebagai pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II.
8. Membangun jaringan jalan arteri primer Lintas Timur yang

menghubungkan Sumatera Utara — Dumai — Pekanbaru — Rengat — Jambi; Lintas Tengah yang menghubungkan Pekanbaru — perbatasan Sumatera Barat; dan Lintas Barat yang menghubungkan Sumatera Utara — Pasir Pangaraian — Bangkinang.

9. Membangun jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang kokoh yang dapat memperlancar lalu lintas produk pertanian dan industri.
10. Membangun jalur kereta api sebagai bagian dari *Trans Sumatera Railway* terutama bagi angkutan barang jarak jauh dan massal.
11. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku kegiatan ekonomi daerah, regional, dan internasional, terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara.
12. Mengembangkan sistem pelayanan jasa perekonomian berdasarkan pengalaman positif provinsi lain atau negara tetangga yang lebih maju.
13. Menerapkan standar mutu nasional dan internasional dalam kegiatan perekonomian.
14. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penerapan standarisasi umum produk dan pelayanan jasa perekonomian.
15. Membangun struktur prasarana transportasi darat, laut, udara, sungai dan penyeberangan secara hirarkis dan terintegrasi antar moda melalui pusat-pusat kegiatan sebagai *transshipment point* serta meningkatkan pelayanan sarana transportasi sesuai dengan fungsinya.

Disamping itu untuk mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan mampu bersaing, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya

untuk :

1. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektor-sektor prospektif yang secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan, dan pariwisata.
2. Meningkatkan upaya eksplorasi dan penerapan teknologi eksploitasi migas untuk peningkatan produksi; pelibatan pemangku kepentingan di daerah dalam produksi migas; perkuatan aspek hukum; dan kelembagaan bagi hasil yang lebih adil.
3. Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan melalui penyiapan lahan pertanian, pengembangan riset dan penyuluhan untuk peningkatan mutu bibit dan produk yang tahan hama dan penyakit, dan penyediaan sarana produksi pertanian secara kontinyu.
4. Meningkatkan produksi perkebunan melalui pola-pola pengelolaan yang pernah diterapkan yang menunjukkan kinerja positif sekaligus untuk pemulihan lahan lahan kritis.
5. Mendorong tumbuhnya industri hilir produk tanaman pangan dan perkebunan berbasis teknologi maju untuk tujuan konsumsi, industri pangan, dan bahan energi (*biofuel*) serta mendorong tumbuhnya agrobisnis dengan memanfaatkan potensi pasar regional melalui diversifikasi, jumlah, dan mutu produk dalam rangka pertambahan nilai

dan perluasan lapangan kerja.

6. Mendorong tumbuhnya industri hilir bagi produk perkebunan terutama untukantisipasi over produksi kelapa sawit, kelapa dan karet.
7. Meningkatkan usaha perikanan dan peternakan rakyat dan usaha skala besar melalui pemanfaatan bioteknologi dalam penyediaan bibit unggul dan peningkatan mutu produk serta mengembangkan industri pengolahannya dengan memanfaatkan teknologi pasca panen untuk menjamin mutu dan ketersediaan produk dalam jangka panjang.
8. Meningkatkan pengelolaan perkebunan rakyat, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan peternakan yang bersifat subsistem secara lebih profesional dan terintegrasi dengan kegiatan *off-farm* serta kegiatan bisnis lainnya.
9. Membangun obyek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi.
10. Membina kegiatan usaha berskala kecil dan menengah agar menjangkau persyaratan dan standar internasional untuk mutu produk dan jasa pelayanan.
11. Menciptakan iklim investasi melalui pembenahan arah kebijakan, regulasi, dan perijinan; pemberian insentif bagi sektor unggulan; penyiapan lokasi kegiatan; promosi potensi daerah; dan menjaga stabilitas politik, sosial, keamanan dan ketertiban umum, dan kepastian

hukum.

12. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah sebagai regulator, katalisator, dan fasilitator pembangunan ekonomi melalui penghapusan ekonomi biaya tinggi; penciptaan akses terhadap permodalan dan pasar; dan peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi.
13. Meningkatkan upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi potensi sumber keuangan daerah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan daerah dalam pembangunan infrastruktur eksternal penunjang kegiatan ekonomi, seperti jaringan jalan, sumber air, sumber energi, dan telekomunikasi.
14. Membangun pola kemitraan dalam pembangunan ekonomi antara Pemerintah Daerah, swasta, UKM, dan koperasi sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif, pemberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah, dan mengembangkan lembaga keuangan mikro dalam rangka ekonomi kerakyatan.
15. Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga, Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan perkembangan perekonomian daerah dan perlindungan lingkungan guna penyesuaian terhadap *ently barrier* pasar dunia.

Untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Riau, peranan pemerintah diharapkan dapat:

1. Mendorong terbentuknya struktur ruang yang lebih menjamin pengurangan disparitas perkembangan antar bagian wilayah Provinsi Riau melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan pada koordinasi lebih rendah dari Pekan baru dan Dumai dan pusat-pusat lokal, termasuk agropolitan yang berfungsi mengolah komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan melalui kegiatan agroindustri dan agrobisnis serta pusat perikanan di kawasan pesisir Timur.
2. Meningkatkan aksesibilitas di wilayah provinsi, terutama pusat-pusat kegiatan ekonomi di Riau bagian Selatan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan jaringan jalan arteri primer Lintas Timur, Lintas Tengah, jalur kearah Barat yang menghubungkan Lintas Timur dengan Lintas Tengah Sumatera, dan jalur pesisir Dumai — Sei Pakning — Simpang Pusako dan Dumai — Bagan Siapi-api; serta pembangunan *feeder road* untuk fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa antara pusat kegiatan sub-wilayah dan pusat kegiatan lokal dengan pusat utama. Jalur Lintas Timur, Lintas Tengah, dan jalur ke arah Barat yang menghubungkan Lintas Timur dengan Lintas Tengah berfungsi sebagai sistem jaringan utama bagi *feeder road* yang menghubungkannya dengan pusat pusat produksi. *Feeder road* selain diperankan oleh jaringan jalan kolektor dan lokal, juga oleh pelabuhan pengumpan, jalur sungai, dan bandar udara penyebaran

tersier dan perintis.

3. Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan prasarana jalan arteri primer dan peningkatan peran Kota Pekanbaru sebagai pusat utama dengan aksesibilitas yang tinggi terhadap bagian wilayah Provinsi Riau maupun dengan provinsi lainnya bagi aktivitas ekonomi berskala besar.
4. Meningkatkan kapasitas Pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Pekanbaru/ Tenayan sebagai pelabuhan internasional serta mendorong pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan-pelabuhan pengumpan regional dan lokal untuk melayani pergerakan barang dan penumpang antar bagian wilayah provinsi dan produksi perikanan setempat.
5. Membangun bandar udara baru pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II yang berfungsi sebagai pusat penyebaran primer serta membangun dan meningkatkan pelayanan bandar udara lainnya yang berfungsi sebagai pusat penyebaran sekunder, tersier, dan perintis sebagai pengumpan.
6. Meningkatkan Kinerja dan membangun sarana transportasi sungai dan penyeberangan untuk melayani pergerakan barang dan penumpang dan wilayah bagian Barat menuju pusat – pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintah.
7. Mengintegrasikan sistem transportasi antar moda, yakni moda transportasi darat, laut, udara, sungai, dan penyeberangan melalui pusat-pusat pemadu moda (*transshipment point*) yang dilengkapi sarana transportasi dan tingkat pelayanan yang memadai.

8. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung perkembangan pusat sub-wilayah, pusat lokal, dan agropolitan di wilayah perdesaan, pedalaman, dan pesisir sesuai dengan standar penyediaan prasarana dan sarana perkotaan.
9. Mengalokasikan ruang bagi kegiatan budidaya perkotaan, pertambangan, pertanian, industri, perikanan, peternakan, dan pariwisata sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
10. Mengalokasikan ruang bagi kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan berskala kecil dan menengah pada kawasan perdesaan dan relatif tertinggal yang ditujukan sebagai kegiatan rakyat dan masyarakat tempatan dan mengalokasikan ruang laut bagi kegiatan masyarakat nelayan yang bermukim di pantai Timur dan pulau-pulau kecil untuk penangkapan dan budidaya perikanan.
11. Membangun prasarana kelistrikan, keenergian, telekomunikasi, dan sarana sosial lainnya di kota-kota yang padat penduduk, ibukota kabupaten baru, dan pusat kecamatan dan sentra produksi.
12. Memperkuat fungsi RTRW Provinsi Riau dan rencana yang lebih rinci sebagai acuan pemanfaatan ruang serta membangun sistem pengendalian alih fungsi lahan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan. Implementasi dan pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas kawasan budidaya dan melestarikan kawasan berfungsi lindung di darat, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan kualitas aparatur pelaksanaannya melalui perkuatan institusi koordinasi penataan ruang daerah; regulasi perijinan dan penertiban; memperkuat institusi pengawasan; dan pembinaan aparatur, termasuk PPNS dan pejabat pengawas lingkungan.

14. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun prasarana dan infrastruktur wilayah berskala besar.

Untuk mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah, Pemerintah Provinsi Riau bertekad:

1. Membangun forum dan meningkatkan kerjasama pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota dengan Provinsi Riau untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan.
2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dengan provinsi di Pulau Sumatera dan provinsi lainnya melalui forum, musyawarah, dan kesepakatan dalam pembangunan infrastruktur, sektor ekonomi, pembangunan sosial, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan.
3. Meningkatkan kerjasama pembangunan antara Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat, terutama di bidang penataan ruang, pembangunan sektor ekonomi unggulan nasional, pembangunan infrastruktur berskala nasional dan internasional, pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan berskala lebih luas dari

Provinsi Riau, kemampuan dalam mitigasi bencana, dan memperkuat ketahanan dan keamanan negara.

4. Meningkatkan peranserta dalam kerjasama internasional melalui kerjasama ekonomi regional IMTGT dan kerjasama khusus lainnya, seperti *sister city*, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
5. Membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta melalui pola *public private partnership (P3)*, terutama dalam pembangunan infrastruktur berskala besar.

### 2.3 Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pelalawan.

Visi Kabupaten Pelalawan 2011-2016 merupakan visi dan misi dari Bupati yang terpilih pada saat pemilu kepala daerah yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dari Bupati dapat terwujud dalam kurun waktu 2011-2016. Pencapaian cita-cita ini akan selalu diwarnai berbagai peluang dan tantangan masa depan yang perlu diantisipasi dengan melaksanakan misi pembangunan 2011-2016.

Misi pembangunan Kabupaten Pelalawan 2011-2016 memperlihatkan tindakan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai visi Kabupaten Pelalawan 2011-2016. Selanjutnya, wujud nyata visi dan misi diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Visi dari Kabupaten Pelalawan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 adalah: “ **Pembaharuan Menuju Kemandirian Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Pelalawan** ”

Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu,
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Otonomi Desa.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Mendorong Investasi, Pengembangan Pariwisata Dan Usaha Strategis Daerah Yang Berwawasan Lingkungan.
6. Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Penjelasan dari masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu.**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut aspek pendidikan, kemampuan dan keterampilan hidup, serta kualitas keimanan dan ketaqwaan mutlak dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus sehingga memiliki pondasi kokoh yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai budaya, serta memiliki iman dan taqwa.

**2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.**

Kondisi kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah sangat mempengaruhi kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Tanpa tubuh yang sehat, maka akan sangat sulit bagi seluruh aktor pembangunan di Pelalawan melakukan pembangunan di segala

bidang. Mengingat arti penting kesehatan, maka salah satu fokus pembangunan untuk lima tahun kedepan adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

### **3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Otonomi Desa**

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh aparatur pemerintah yang profesional, bersih, memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi serta didukung teknologi informasi yang handal melalui sistem inovasi daerah. Dengan demikian diharapkan dapat menjamin kinerja pemerintahan dalam menciptakan pelayanan publik yang prima, serta menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Otonomi desa mendorong terwujudnya desa mandiri yang mampu memberdayakan potensi yang dimiliki untuk menciptakan kemandirian yang hakiki, kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat desa. Melalui otonomi desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat semakin dekat ke tingkat yang paling bawah yaitu desa. Misi mewujudkan desa mandiri dan sejahtera di Kabupaten Pelalawan bukanlah sekedar mimpi belaka, tetapi yakin bisa dicapai dengan langkah dan terobosan baru, niat tulus ikhlas, serta usaha optimal dari seluruh elemen masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah.

#### **4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah.**

Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan untuk mendorong pengembangan wilayah sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan. Penyediaan dan layanan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan standar selain akan sangat menunjang aktivitas perekonomian, juga meningkatkan aksesibilitas suatu lokasi/daerah serta meningkatkan kualitas hidup penghuni di wilayah tersebut. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, air bersih, telekomunikasi dan listrik, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada periode pembangunan lima tahun kedepan (2011-2016) tetap memprioritaskan pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur daerah.

#### **5. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Mendorong Investasi, Pengembangan Pariwisata Dan Usaha Strategis Daerah Yang Berwawasan Lingkungan**

Membangun kemandirian ekonomi tidak terlepas dari aspek daya saing, isu ketimpangan antar wilayah, ketimpangan dalam kepemilikan asset, pengangguran dan kemiskinan. Keterlibatan dan peran aktif seluruh aktor pembangunan sangat diharapkan dalam membangun kemandirian ekonomi, sebab hal ini tidak dapat tercipta secara serta merta hanya dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktifitas masyarakat

dan sektor swasta memiliki sumbangan yang besar bagi keberhasilan kemandirian ekonomi suatu wilayah.

Kabupaten Pelalawan memiliki kekuatan dari potensi ekonomi untuk membangun kemandirian ekonomi. Sumber daya berupa kekayaan alam di sektor gas alam, batubara, bentonit, pariwisata dan perkebunan merupakan potensi unggulan seperti antara lain gas alam di Kecamatan Langgam, fenomena alam gelombang pasang Bono di Kecamatan Teluk Meranti, dan karet serta kelapa sawit yang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan, mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Pelalawan bila dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

#### **6. Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat**

Penduduk Kabupaten Pelalawan terdiri dari multi etnis, hampir seluruh suku ada di wilayah ini. Dengan kemajemukan ini, masyarakat Pelalawan terus melestarikan nilai-nilai hidup bermasyarakat saling toleransi dan hormat menghormati. Penciptaan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan agar tercipta rasa aman di masyarakat dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Kondisi lingkungan yang aman, tertib dan nyaman tidak saja berdampak positif bagi masyarakat yang hidup di wilayah ini, namun juga sangat baik bagi pencitraan daerah. Kondisi wilayah yang aman, tentram dan tertib menjadi salah satu daya tarik investasi yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian wilayah.

Prioritas pembangunan dan fokus sasaran unggulan pembangunan

memiliki kendala karena keterbatasan sumberdaya keuangan pembangunan, ditengah-tengah banyaknya tuntutan pemenuhan kebutuhan akan pembangunan yang harus dicapai dalam masa lima tahun, seperti yang tergambar dalam visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2011-2016, maka di perlukan pemilihan dan penentuan prioritas pembangunan dan fokus sasaran unggulan pembangunan yang diperhitungkan mampu di capai pada tahun akhir masa bakti pimpinan daerah. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pelalawan 2011-2016:

- 1) Pengembangan Pertanian dan Pangan;
- 2) Pengembangan Ekowisata Unggulan;
- 3) Pengembangan Industri Kelapa Sawit dan Karet
- 4) Pengembangan Jalan Lintas Timur Alternatif dan Listas Bono;
- 5) Pembangunan Perguruan Tinggi;
- 6) Pembangunan dan Pengembangan Sumberdaya Listrik dan Air Bersih.

#### **2.4 Kebijakan Dasar Teknopolitan.**

Menurut *Carlos Quandt* (1997) dalam tulisannya "*Virtual Technopoles: Exploring the Potential of Internet and Web Technologies to Create Innovative Environments in Latin America and the Caribbean*" Keberlangsungan dan Keberlanjutan Teknopolitan ditentukan pula oleh berbagai faktor maupun elemen pendukung yakni:

- a. Ketersedian dukungan dari pimpinan politik dan akademisi;
- b. Keberadaan budaya kewirausahaan;
- c. Keberadaan kaitan yang kuat antara komunitas saintifik dan entrepreneur/teknopreneur;

- d. Jaringan informasi;
- e. Pencitraan yaitu promosi citra kawasan sebagai teknopolitan; dan
- f. Keberadaan Inkubator.

Meskipun tidak ada aturan standar, interaksi dan transaksi pengetahuan yang difasilitasi oleh teknopolitan harus memperoleh nilai ekonomi dan nilai kompetitif baru dari tiga komponen fungsional utama:

- a. Penyedia Iptek: Teknopolitan secara langsung atau tidak langsung terkait dengan sektor pendidikan melalui perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia dan intelektual terlatih - atau melalui pusat-pusat penelitian pemerintah atau swasta/laboratorium. Baik perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dan pengembangan berbagi tujuan bersama seperti menyediakan tempat pelatihan bagi pengusaha dan mendukung teknologi bagi kewirausahaan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Bahkan, perguruan tinggi dan lembaga litbang memainkan peran penting dalam Teknopolitan sebagai penggerak pendidikan, pengetahuan baru dan tenaga kerja terlatih secara terus menerus;
- b. layanan dukungan Industri: layanan Ini termasuk inkubator dan area pengembangan usaha, yang biasanya dikelola oleh pihak swasta;
- c. layanan dukungan Keuangan: layanan Ini termasuk modal ventura, lembaga pembangunan daerah dan bank.
- d. Analisis permintaan internal dan atau eksternal kebutuhan adalah sumber utama informasi untuk proses *positioning* Teknopolitan dan juga melakukan intervensi:

- e. Prioritas Kebijakan Pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan fokus strategis teknopolitan misalnya pemilihan sektor, teknologi, dan platform pengembangan mengingat bahwa sektor atau skema keuangan daerah atau fasilitas insentif sangat mempengaruhi perkembangan Teknopolitan tersebut.
- f. Keberadaan Teknopolitan kadangkala duplikasi dengan institusi serupa di wilayah yang sama sehingga dapat mempengaruhi keputusan untuk menetapkan fokus dan kompetensi atau sektor tertentu, dan menghindari redundansi.
- g. Peraturan internasional misalnya aturan perdagangan dalam perjanjian Putaran Uruguay atau peraturan hak kekayaan intelektual [HAKI] dapat mempengaruhi arus teknologi, sebagai hasil dari penilaian risiko suatu negara.

Tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Teknopolitan, adalah :

- a. Konten paling penting. Posisi Teknopolitan seharusnya bergantung kepada strategi kawasan industri lokal dan nasional, dan infrastruktur seharusnya dibangun untuk memfasilitasi teknopolitan.
- b. Pengelompokan sangat krusial. Pengelolaan teknopolitan tidak dapat menyelesaikan semua keinginan dan layanan yang diperlukan oleh pengguna dan para pemangku kepentingan. Masalah yang dihadapi adalah kelangkaan pembiayaan, kompetensi internal atau kritikal massa. Kelompok tersebut selanjutnya akan menerima manfaat dari koneksi nasional dan internasional untuk mengembangkan kapasitas layanan, layanan keahlian, pengembangan teknopolitan dan para pemangku

internasional, proyek kolaboratif, dan pertumbuhan kompetensi yang dikembangkan di dalam teknopolitan serta diantara teknopolitan.

- c. Integrasi kawasan merupakan keharusan. Suatu kawasan teknopolitan seharusnya dipertimbangkan menjadi salah satu pusat kota. Teknopolitan harus dapat menciptakan pekerjaan, pengetahuan, perubahan sosial dan pada akhirnya nilai ekonomi kawasan tersebut. Teknopolitan juga sebagai sarana promosi masyarakat kota dan pelaku-pelaku ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, terkait dan berhubungan dengan para pelaku inovasi di daerah tersebut yang perlu diberikan perhatian khusus. Tata kelola Teknopolitan seharusnya merefleksikan pengintegrasian tersebut.

Teknopolitan sebagai Kota Pengetahuan dalam pengembangan perkotaan juga memiliki kekhasan seperti :

- a. Teknopolitan dibangun di areal yang menarik dan dilengkapi dengan bangunan arsitektur yang indah dan tersebar secara spasial di mana ilmu pengetahuan dan teknologi diseleksi/dipilih atau fungsi litbang perusahaan, untuk penelitian baru atau terapan.
- b. Melakukan kerjasama litbang dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari sumberdaya teknologinya.
- c. Sistematis menarik dukungan dari manajemen Technopark dalam rangka mengembangkan keterampilan manajemen, menemukan solusi untuk pembiayaan di semua tingkat proses inovasi, dan membuat lebih ekstensif penggunaan semua fasilitas kantor dan jasa konsultasi.
- d. Merealisasikan proses transfer teknologi yang kuat antara universitas,

laboratorium penelitian dan industri.

Teknopolitan sebagai suatu kawasan khusus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Suatu kawasan khusus/spesifik dengan batas kawasan yang jelas.
- b. Terdapat keterkaitan antara lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian.
- c. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan penelitian dan pengembangan (research and development).
- d. Terdapat pengelola kawasan.
- e. Berorientasi pada penemuan baru (*invention*) dan inovasi (*inovation*) teknologi tinggi Terdapat industri-industri yang berbasis teknologi tinggi, baik pemula (*start up firms*) maupun yang sudah mapan.
- g. Terdapat peraturan atau kerangka hukum.

#### 2.4.1 Persyaratan Kawasan Teknopolitan

Adapun syarat yang ditetapkan dalam pengembangan kawasan teknopolitan antara lain :

- a. Memiliki sumberdaya manusia yang handal untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada penemuan baru, inovasi, dan komersialisasi teknologi.
- b. Memiliki sumberdaya lahan yang dapat dikembangkan sebagai Kawasan Teknopolitan.
- c. Memiliki prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan teknopolitan seperti lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, sarana produksi, jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya.

Para *stakeholder* termasuk pemerintah memiliki tanggung jawab atas pengembangan lokasi teknopolitan yang akan dibangun. Perguruan tinggi beserta lembaga Penelitian dan pengembangan didorong untuk menciptakan hasil temuan yang memiliki nilai “*value*” bagi pengembangan teknopolitan. Namun demikian *value* yang diciptakan tidak perlu berada di dalam Teknopolitan, tetapi harus terkait dengan fasilitas atau kegiatan yang dikembangkan di dalam Teknopolitannya. Perusahaan juga memiliki peran sangat penting dalam aktivitas teknopolitan baik secara langsung maupun hanya menempatkan perwakilannya di Teknopolitan. Akhirnya, dalam pembangunan Teknopolitan, instansi pemerintah yang memang memiliki kepentingan secara nasional harus berpartisipasi aktif pada setiap pertemuan dan diskusi awal pembangunan teknopolitan. (BPPT,2012)

Untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengelolaan teknopolitan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harus diberikan tugas koordinasi yang jelas;
- b. Kesepakatan harus dibuat antara asosiasi, pengembang, kontraktor perencanaan, dan para mitra yang bersangkutan, yang menghubungkan berbagai aspek proyek, seperti calon pelanggan perusahaan, pengembangan instalasi dan fasilitas, koordinasi, dan promosi;Prosedur
- c. Konsultasi dan badan koordinasi harus ditetapkan untuk mendorong pengembangan rasa saling percaya;
- d. Sebuah badan penyelesaian perselisihan/sengketa (*arbitrase politik*) sangat penting untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara mitra;
- e. Pembuat kebijakan tidak harus diminta untuk menjadi anggota asosiasi:

selain itu dewan direksi harus dibentuk berdasarkan masukan dari para perintis awal Teknopolitan, termasuk wakil yang mereka pilih, ke dalam lembaga-lembaga yang berbeda. Pelaku ekonomi dan keuangan, serta peneliti dan akademisi juga harus dikelompokkan ke dalam lembaga-lembaga yang relevan di dalam organisasi Teknopolitan.

Konsep pengembangan kawasan Teknopolitan bukan hanya focus pada *Economic capital*, tetapi juga *Intellectual capital* dan *Social capital*. Pengembangan Kawasan Teknopolitan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan/penguatan/revitalisasi “sentra-sentra iptek”;
- b. Penguatan “keterkaitan” dan “jaringan”;
- c. Gerakan masyarakat ~ semangat, partisipasi aktif, gerakan bersama;
- d. Perkembangan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran;
- e. Membangun reputasi global yang dimulai dari tindakan dan kemanfaatan lokal.

Esensi yang perlu ada dalam konsep Teknopolitan adalah :

- a. Kombinasi kemitraan universitas dan pusat riset dengan industri dan pemerintah.
- b. Kombinasi usaha kecil, besar, dan *entrepreneur*.
- c. Klaster bangunan dalam lingkungan R&D dengan tema multi disiplin berdasarkan program pelatihan universitas termasuk teknologi komunikasi maju, biosains dan bioteknologi, material maju, teknologi lingkungan.
- d. Pembentukan kemitraan yang intensif antara penghuni industri, pemerintah, dan universitas pada suatu komunitas yang tinggal sangat

- berdekatan (*pedestrian-scale community*).
- e. Infrastruktur teknologi maju untuk jaringan komunikasi.
  - f. Sistem transportasi yang baik digabungkan dengan jaringan berskala regional.
  - g. Balai pertemuan dan hotel untuk pertemuan, pelatihan, dan hiburan.
  - h. Lingkungan tempat tinggal sangat dekat sekali dengan fasilitas R&D (dapat ditempuh dengan berjalan kaki).
  - i. Fasilitas olah raga seperti jogging, bersepeda, pusat kebugaran.

Seperti yang diutarakan oleh *Castells and Hall*, 1994, pembangunan Teknopolitan perlu memperhatikan sedikitnya 12 (dua belas) hal penting yang meliputi :

1. Strategi pengembangan teknopolitan perlu disusun secara jelas.
2. Cabang perusahaan/pabrik di kawasan teknopolitan lebih baik dari pada tidak ada perusahaan/pabrik sama sekali.
3. Sinergi sebagai sumber inovasi sangat penting dalam jangka panjang.
4. Perlu dikembangkan visi jangka panjang.
5. Sumber inovasi harus diidentifikasi.
6. Jaringan (*networks*) harus dibentuk sejak awal. Harus ada jaringan dan saluran(*channels*) agar informasi dapat mengalir.
7. Strategi jangka pendek memang lebih mudah, bahkan tindakan (*move*) jangka pendek dapat menjadi negatif jika antar institusi tidak berkomunikasi satu dengan lainnya. Lab swasta perlu didorong untuk bergerak bersamaan dengan badan riset pemerintah, atau tidak akan ada *spin-off*.

8. Strategi jangka panjang memerlukan pilihan-pilihan yang selektif. Membangun hubungan yang sinergis di wilayah yang jauh dari keramaian memerlukan satu atau dua target area yang menawarkan prospek terbaik dalam hal fasilitas yang sudah ada sebelumnya, seperti, universitas, kapasitas wirausaha, kepemimpinan politik.
9. Daya dorong (*Inducement*) sentral yang utama. Sebagai contoh, pengeluaran hankam AS berperan besar di Silicon Valley.
10. Identifikasi ceruk yang baru. Sebagai contoh, kembangkan industri *high-tech* yang khusus untuk memenuhi kebutuhan lokal, kemudian gali potensi ekspor-nya.
11. Jaga konsistensi. Misalnya, suatu *technopark* tidak boleh diubah menjadi *office park* (perkantoran) murni hanya karena yang terakhir itu lebih menguntungkan.
12. Terbaik mungkin menjadi musuh bagi yang baik. Negara dan daerah sebaiknya tidak menilai semua usaha mereka hanya dengan kriteria yang paling ketat dan eksklusif.

Dalam menentukan lokasi Kawasan Teknopolitan perlu diidentifikasi berbagai kebutuhan Kawasan Teknopolitan dengan mempertimbangkan :

- a. Potensi Sumberdaya Lahan.
- b. Potensi Sumberdaya Manusia.
- c. Potensi Sumberdaya Buatan (Infrastruktur).
- d. Rencana Pembangunan (RPJPD dan RPJMD).
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- f. Pasar Nasional dan Pasar Global.

## 2.4.2 Dasar Hukum Teknopolitan

Secara spesifik peraturan yang mengatur kawasan teknopolitan belum ada, namun mengacu pada konsep teknopolitan terdapat beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar pembentukan Kawasan Teknopolitan Pelalawan, yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

### 1. Peraturan terkait Dengan Kebijakan Kawasan Berbasis Iptek.

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- b. Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dapat membangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana Iptek lain untuk memfasilitasi sinergi dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya Iptek di kalangan masyarakat (Pasal 14 UU18/2002).
- c. Untuk mengembangkan jaringan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), badan usaha, dan lembaga penunjang, wajib mengusahakan kemitraan. (Psl 15 (2) UU 18/2002). (BPPT,2013)

### 2. Peraturan Terkait Dengan Kebijakan Kawasan Berbasis Ekonomi.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025.
- b. Telah ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi di arahkan kepada peningkatan daya saing dan ekonomi berbasis pengetahuan.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

- d. Fungsi kawasan ekonomi khusus (KEK) dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.
- e. KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: pengolahan ekspor; logistik; industri;
- f. pengembangan teknologi; pariwisata; energi; dan/atau ekonomi lain.
- g. Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah
- h. (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan menjadi KEK, harus memenuhi kriteria adalah:

- a. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
- b. Pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota yang bersangkutan mendukung KEK;
- c. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan
- d. Mempunyai batas yang jelas.

## 2.5 Teori George C.Edwards III

Dalam pandangan *Edwards III*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

### 1) **Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

### 2) **Sumber daya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

### 3) **Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

#### 4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. (Demartoto, 2008)

#### 2.6 Teori *Good Governance*

Menurut Koiman *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

*Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita Hak Azasi Manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan.

Menurut Mardiasmo mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut *OECD* dan *World Bank* (Sedarmayanti, 2009), Good Governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangkakerja politik dan hukum bagi tumpulnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Rochman Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen United Nation Development Program (*UNDP: 2004*), tata kelola pemerintahan yang baik adalah "Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas social dalam masyarakat.

Dalam hal *Good Governance*, (Basuki 2006) mengartikan sebagai upaya merubah watak pemerintah (Government) yang semula cenderung bekerja sendiri

tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintah yang aspiratif. Lain halnya dengan Basuki, (*Tjiptoherijanto 2010*) mendefinisikan Good Governance dari sudut pandang harapan aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, yang menyatakan bahwa Good Governance adalah tata kelola yang berupaya memenuhi harapan-harapan pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya keterlibatan para stakeholder, maka pengambilan keputusan dalam pelayanan publik akan mendapatkan pertimbangan yang matang dan semua keinginan para stakeholder akan tercapai.

Adapun unsur-unsur stakeholder Governance menurut (*Sjamsuddin 2006*) meliputi; individual, organisasi, institusi, dan kelompok sosial yang keberadaannya sangat penting bagi terciptanya tata pemerintahan yang efektif. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

**a. Negara (*State*)**

Pengertian negara/pemerintah (*State*) dalam hal ini secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional dan global.

**b. Sektor Swasta**

(*Private sector*) Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufactur*), perdagangan perbankan, dan koperasi, termasuk juga kegiatan sektor informal.

Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai peluang untuk perbaikan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

**c. Masyarakat Madani (*Civil society*)**

Masyarakat madani meliputi perseorangan dan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Masyarakat madani tidak hanya melakukan check and balances terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta tetapi juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur yang lain, seperti membantu memonitor lingkungan, penipisan sumber daya, polusi dan kekejaman sosial, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat, dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka.

(MughtarLuthfi Malik AlAzhar, dkk. 2013:1048-10).

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Data / Variabel	Metode Analisis	Hasil Pembahasan
1.	Warseno Universitas Jember (jurnal,2014)	Model Pengelolaan Kawasan Teknopolitan	Menyusun model pengelolaan kawasan teknopolitan dalam kerangka sistem inovasi daerah (SID)	a. Konsep Kawasan Teknopolitan Pelalawan b. Strategi Implementasi Kawasan Teknopolitan Pelalawan	Metode rekonsolidasi dan fungsionalisasi (rekonfu) dan metode deskriptif	Konsep teknopolitan merupakan hasil konsensus bersama dan keharmonian antara berbagai pihak yang dapat menciptakan keuntungan yang jelas terutama pihak-pihak yang menjadi peran sentral dalam kawasan teknopolitan yaitu pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri.
2.	Astri Priyani Meiningrum Universitas Riau (Jurnal,2017)	Kapasitas Pemerinth Kabupaten Pelalawan Dalam Pembangunan Kawasan Teknopolitan (Studi Pembangunan Kawasan Pendidikan)	a. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan pendidikan b. Untuk mengetahui kendala pemerintah kabupaten pelalawan dalam pembangunan kawasan pendidikan	a. Upaya pemerintah dalam pembangunan kawasan pendidikan b. Kendala pemerintah dalam pembangunan kawasan pendidikan	Metode kualitatif dan metode deskriptif	Kedala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan dalam mengalih fungsikan kawasan hutan penyangga menjadi kawasan teknopolitan adalah mendapatkan izin alih fungsi hutan, selanjutnya anggaran untuk melakukan pembangunan kawasan pendidikan, karena untuk membangun kawasan pendidikan dibutuhkan dana sebesar 30 milliar Rupiah. Anggaran yang besar ini mesti dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pelalawan dengan proyek multi year.
3.	Sucia	Peluang dan	Untuk mengetahui	Peran teknopolitan	Metode	Dalam pengembangan

	Miranti,S.IP (jurnal,2016)	Tantangan Pengembangan Teknopolitan dalam Meningkatkan Daya Saing Indonesia	peluang dan tantangan mengembangkan teknopolitan di Indonesia	dalam meningkatkan daya saing nasional	kualitatif serta dengan melakukan wawancara	teknopolitan tentu terdapat pula tantangan dan hambatan seperti belum adanya landasan hukum yang mengatur dan komitmen yang rendah dari pelaksana menjadi tantangan dalam pengembangan teknopolitan. Selain itu, diperlukannya pembangunan sumber daya manusia dan jejaring antara teknopolitan, perguruan tinggi serta pelaku industri serta dorongan dari masyarakat dan pelaku bisnis.
4.	Karmila Sari Sukarno (Jurnal,2009)	Implementasi Prinsip “ GOOD GOVERNANCE” dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.	Untuk mengetahui apakah pemerintah Kabupaten Karangayer telah menerapkan prinsip good governance dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.	Peran pemerintah Kabupaten Karangayer dalam penerapan prinsip good governance khususnya partisipatif dan keterbukaan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2009.	Metode nomatif, dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual	APBD Karangayer 2009 belum sepenuhnya menerapkan prinsip good governance khususnya keterlambatan waktu prses penyusunan APBD tahun 2009, penerapan asas partisipatif pada proses penyusunan APBD tahun 2009 masih belum optimal, masyarakat emiliki ruang yang minimalis dalam proses tersebut, sehingga prinsip partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran daerah hanya bersifat formalitas.
5.	Fathur Rahman Universitas Mulawarman Samarinda	Penerapan Konsep Teknopolitan Sebagai Strategi Untuk	Untuk mengetahui penerapan konsepp teknopolitan sebagai strategi untuk	Penerapan Konsep Teknopolitan sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja	Metode Kualitatif	Peran teknopolitan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi peluang besar bagi Indonesia agar mampu bersaing di kancah

	(Tugas Akhir,2016)	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN	meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN	indonesia di era masyarakat ekonomi ASEAN		internasional. Namun, penerapan konsep teknopolitan yang dilakukan pemerintah masih belum tepat sasaran, sebab tujuan utama dari pembangunan proyek teknopolitan tersebut tidak dapat dicapai. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya kekuatan ekonomi dan rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia. Proyek teknopolitan yang diterapkan dalam skala besar membutuhkan biaya yang tinggi dan jangka waktu yang panjang.
6.	Wawan K. Tolinggi (Jurnal,2019)	Strategic Role Identification Of Agro-Science Technopark Management In Gorontalo Province	Untuk menentukan peran strategi terkait dengan pengelolaan technopark agro-sains berdasarkan kondisi eksternal dan kondisi internal.	Faktor – faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pengelolaan tecnopark agro-sains	Metode kuantitatif dan kualitatif	Posisis strategi agro-sains technopark di Provinsi Gorontalo berada pada kuadran pertama (SO Strategi) dengan koordinat 0,76 dan 2,52. Prioritas global dengan nilai tertinggi dari kelompok peran strategis masing-masing adalah PS1 (0,419) peran pemerintah daerah, pemangkung kepentingan terkait, dan manajemen kelembagaan, PS2(0,329) peran lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan, PS3 (0,210) peran masyarakat dan dunia usaha, PS4 (0,131) peran lembaga dan sistem pemasaran, PS5 (0,136) peran kondisi

					<p>regional dan ketersediaan bahan baku. Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu: kesiapan pemerintah daerah seperti dukungan infrastruktur, regulasi, dan program yang terkait dengan manajemen situr, peningkatan dukungan dari lembaga penelitian dalam mengembangkan riset dan teknologi kegiatan pemindahan yang memiliki potensi untuk mengadopsi, beradaptai dan meningkatkan daya saing situs, dukungan dari dunia bisnis dalam meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat, peningkatan motifasi dalam komunitas situs untuk melakukan pengolahan komoditas unggulan.</p>
--	--	--	--	--	---

Sumber : Analisis, 2019



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu untuk menggambarkan fenomena yang ada. Penelitian destriftif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala sosial yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variabel yang lain (Utama,2012).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.Pada metode penelitian kualitatif fokus masalah penelitian melakukan pengkajiann secara sistematis, mendalam dan bermakna (Kriyantono,2006).

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kawasan teknopolitan dengan luas lokasi 3.650 hektar yang terdiri dari zona pendidikan, zona riset, zona industri, zona permukiman, zona perkantoran, zona perdagangan dan jasa, dan zona fasilitas umum.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama satu tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2019 setelah seminar proposal selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder dan primer , pengolahan data yang telah didapat dan

menganalisis, selanjutnya penyusunan laporan seminar hasil penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Tahap dan Kegiatan Penelitian	(Waktu/Bulan)																	
		2018									2019								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persiapan penyusunan proposal tugas akhir	√	√	√	√	√	√												
2.	Seminar proposal tugas akhir							√											
3.	Pengumpulan data primer dan sekunder								√	√									
4.	Pengolahan, analisis, dan penyusunan laporan hasil penelitian										√	√	√	√	√				
5.	Bimbingan penyusunan hasil penelitian														√	√	√		
6.	Seminar hasil penelitian																	√	

Sumber: analisis, 2019

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian menggunakan metode Kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri pada dasarnya penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (saryono,2010).

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini mendeskripsikan secara rinci tentang implementasi kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan. Untuk memahami hal tersebut, perlu diteliti faktor penghalang dari pembangunan kawasan teknopolitan.

### 3.3.1 Jenis Data

Data – data yang diperlukan dan dikaji dalam penelitian ini meliputi data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian baik dalam bentuk uraian kalimat ataupun penjelasan yang meliputi, aspek fisik wilayah, penggunaan lahan, keadaan ekonomi, sosial dan budaya wilayah penelitian, maupun karakteristik wilayah penelitian.

### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah :

#### a. Data primer

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung pada lapangan atau sering juga disebut observasi lapangan. Sehingga diperoleh hasil berupa data atau informasi mengenai keadaan sebenarnya bertujuan untuk mengetahui fakta dan kondisi aktual pada lapangan. Data primer meliputi kegiatan observasi visual (keadaan kondisi eksisting), dokumentasi maupun wawancara.

#### b. Data sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh melalui instansi – instansi terkait baik dalam bentuk tabulasi maupun deskriptif meliputi aspek fisik wilayah, aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, hasil perkebunan, hasil produksi, regulasi pemanfaatan ruang dan peta – peta terkait dengan penelitian. Instansi yang terkait meliputi Badan Pusat Statistik, Badan Perencana Daerah (Bappeda) Kabupaten

Pelalawan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta instansi lainnya.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

**a. Observasi**

Merupakan pengamatan langsung pada lapangan yang mengetahui dan mengamati keadaan kehidupan di lokasi. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui objektifitas dari kenyataan maupun keadaan kondisi kawasan teknopolitan.

**b. Telaah pustaka**

Merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca atau mengambil literatur laporan, jurnal, artikel, bahan seminar, bahan perkuliahan, dan sumber – sumber lainnya yang ada kaitannya dengan kawasan teknopolitan baik secara umum maupun secara perkembangannya.

**c. Wawancara**

Wawancara atau sering dikenal dengan istilah interview atau kuesioner lisan. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data mengenai Analisis Implementasi kawasan teknopolitan. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan pada pembahasan ini. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber adalah BAPEDDA Kabupaten Pelalawan, PU Kabupaten Pelalawan, dan Kecamatan Langgam.

#### **d. Dokumentasi**

Untuk melengkapi data maka diperlukan informasi berupa dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek yang menjadi studi. Caranya yaitu dengan mengambil gambar, brosur objek, dan dokumentasi foto kawasan teknopolitan. Pada penelitian ini dokumentasi yang dilakukan adalah melihat dan mendokumentasikan berupa gambar kondisi eksisting pada kawasan teknopolitan.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan – satuan individu – individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan – satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang – orang, institusi – institusi dan benda – benda (Sugiyono,2015). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan yang ada pada kawasan teknopolitan Pelalawan

#### **3.5.2 Sample**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang kakarakteristiknya hendak diteliti (Djarwanto dalam Perdana, 2015). Sample yang diambil dalam penelitian ini adalah kegiatan pembangunan yang ada di kawasan teknopolitan Pelalawan.

### 3.6 Teknik Sample

Teknik sampel digunakan untuk menghemat biaya penelitian, waktu penelitian, tenaga dan mengingat ruang lingkup studi yang sangat luas dan waktu studi yang terbatas. Dalam melaksanakan penelitian dilapangan dibutuhkan penentuan jumlah sample, sample merupakan bagian dari populasi yang dapat menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan (Nursalam, 2008).

Tekni Pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik Sampling Purposive dimana penetapan sample berupa pembangunan fisik dan kegiatan yang ada sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.

### 3.7 Teknik Analisis

#### 3.7.1 Teknik Analisis Deskriptif

Untuk mencapai tujuan mengetahui implementasi kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan diperlukan analisis data. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dan keadaan eksisting kawasan teknopolitan Kabupaten Pelalawan.

### 3.7.2 Teknik Analisis Logical Framework Approach (LFA)

Dalam penyusunan rencana program perlu lebih dahulu dianalisis dan ditetapkan masalah prioritas. Setelah itu ditetapkan suatu strategi pengembangan dan penanganan, selanjutnya disusun rencana program untuk direkomendasikan kepada pihak terkait. Perencanaan program dimaksud dilakukan dengan metode *Logical Frame Approach (LFA)* dan melibatkan stakeholders terkait (Firdaus,2006). Analisis LFA pada penelitian ini digunakan dalam menentukan strategi yang tepat untuk pengembangan kawasan teknopolitan.

*Logical Framework Analysis (LFA)* merupakan suatu instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencanaan untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi risiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Lutfi ,2015).

Pendekatan LFA diimplementasikan dalam dua tahapan utama, yaitu tahap analisis dan tahap perencanaan. Tahap analisis terdiri dari langkah – langkah sebagai berikut : (1) analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*); (2) analisis permasalahan’ (3) aalisis tujuan; dan (4) analisis strategii. Adapun tahap perencanaan terdiri dari langkah penyusunan *matriks logical framework* yang disertai dengan penjadwalan kegiatan dan sumberdaya yang dibutuhkan (European Integration Office, 2011). Dalam penelitian ini LFA digunakan

untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan didalam pengembangan kawasan teknopolitan.

#### a. Analisis Stakeholder

Analisis *stakeholder* perlu dilakukan mengingat semua program dipengaruhi oleh stakeholder yang memiliki beragam kepentingan, potensial, kekurangan, dan karakteristik lainnya. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan dan implementasi program. Banyak pengalaman program yang gagal karena tidak mempertimbangkan kelompok stakeholder yang berpengaruh di masyarakat. Karena itu, amatlah penting untuk melakukan analisis terhadap stakeholder sebagai bagian dalam proses perencanaan. Analisis *stakeholder* ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari satu kegiatan program/proyek. Tujuan analisis *stakeholder* yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam isu-isu yang digarap dalam program, peran-perannya, kepentingannya, dan dampak/efek yang ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut terhadap isu. Analisis *stakeholder* dalam penelitian ini terdiri dari BAPPEDA, PUPR, Kantor kecamatan. Agar lebih jelas analisis *stakeholder* dapat dilihat pad tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Identifikasi *Stakeholder* yang terkait**

No	Stakeholder	Keterangan
1	BAPPEDA Kabupaten Pelalawan	Bidang Penataan Ruang
2	Dinas PU dan Penataan Ruang	Bidang SDA
3	Kantor Kecamatan	Bidang Umum & Kemasyarakatan

Sumber : Hasil Analisis,2019

Analisis *stakeholder* dalam konteks logframe mencakup analisis masalah, kekuatiran, kepentingan, harapan, keterbatasan, dan potensi dari kelompok penting, organisasi, pelaksana program, program lain, dan para individu. Karena itu Analisis *stakeholder* mengidentifikasi karakteristik *stakeholder*, target group penerima manfaat, dan menentukan program apa saja yang akan diselesaikan melalui program intervensi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memahami *stakeholder* yang paling terkena dampak dari problem yang sedang dihadapi dan memahami peran dan kepentingan berbagai *stakeholder* dalam menyelesaikan masalah.

Dalam penelitian ini analisis *stakeholder* berperan sebagai sumber informasi yang nantinya akan digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan strategi penanganan implementasi kawasan teknopolitan

**b. Analisis Masalah**

Analisis masalah dilakukan untuk mengidentifikasi masalah kunci, tantangan dan kesempatan, serta hubungan sebab-akibat. Analisis masalah ini sangat penting mengingat pengembangan program umumnya dalam

rangka mengatasi masalah pembangunan. Karena itu analisis masalah mencoba mencari ‘akar masalah’ bukan sekedar gejala, sehingga desain program yang dibangun dapat menyelesaikan masalah. Salah satu alat yang sering digunakan dalam analisis ini adalah ‘pohon masalah’ yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu: identifikasi daftar masalah utama, identifikasi inti masalah, identifikasi hubungan sebab-akibat, melakukan pengecekan logika, dan menyusun diagram pohon masalah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan informasi dari stakeholder tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi didalam pembangunan dan pengembangan kawasan teknopolitan. Dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Pohon Masalah**

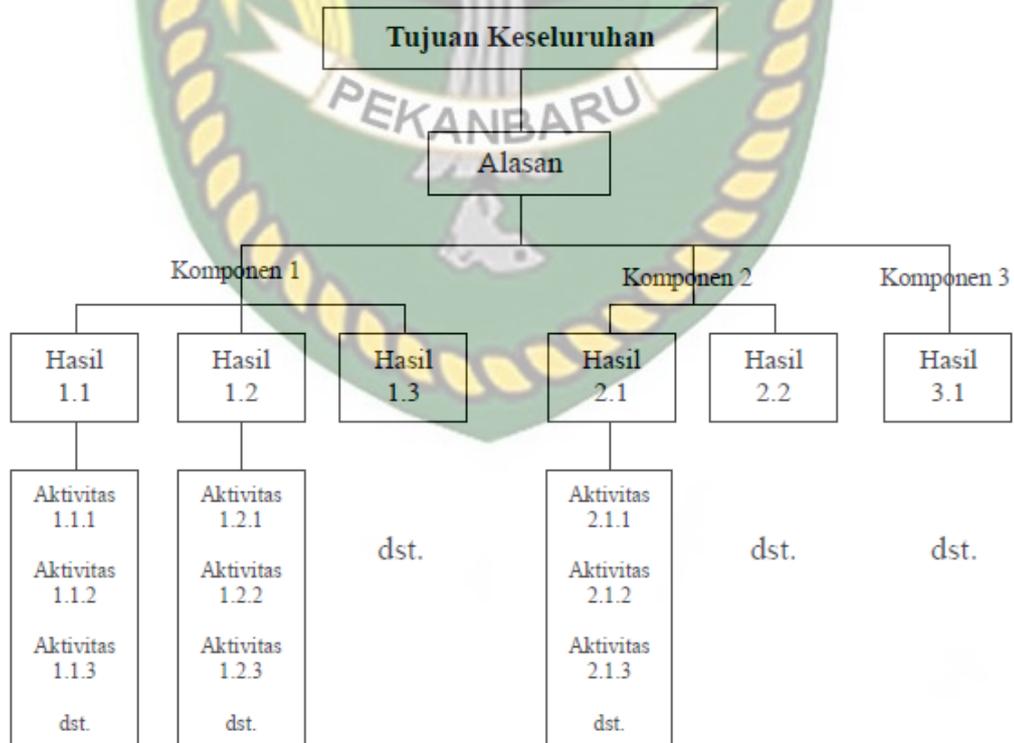
Sumber: Herlina,2012

### c. Analisis Tujuan

Analisis tujuan dalam arti luas merupakan prosedur yang secara sistematis mengidentifikasi, mengkategorikan, menetapkan,

dan jika dianggap perlu menyeimbangkan tujuan-tujuan dari para pihak yang terlibat. Analisis tujuan dan analisis masalah saling mempengaruhi satu dengan lainnya, makin banyak informasi tentang situasi masalah, maka makin lebih spesifik dalam merumuskan tujuan, jenis dan outline dari tujuan-tujuan yang dianalisis mempengaruhi persepsi terhadap masalah-masalah tersebut.

Pohon masalah ditransformasikan menjadi pohon tujuan (*objective tree*) dengan menyatakan kembali masalah-masalah tersebut sebagai tujuan-tujuan. Pohon tujuan dapat dianggap sebagai citra cermin positif dari pohon masalah. Dalam hal ini penting untuk menyusun ulang posisi dari tujuan-tujuan saat pohon tujuan dikembangkan.



**Gambar 3.2 Pohon tujuan**  
 Sumber : Herlina,2012

#### d. Analisis Strategi

Analisis strategi adalah tahapan identifikasi pilihan-pilihan strategi untuk mencapai tujuan program. Dari pilihan yang ada kemudian ditentukan strategi yang paling tepat berdasarkan tujuan utama pengembangan program. Pilihan strategi mesti mempertimbangkan resiko yang mungkin muncul serta membangun kriteria seperti target group penerima manfaat, keberlanjutan manfaat, kemampuan memelihara aset setelah program selesai, jumlah biaya yang dibutuhkan, kelayakan teknis, kontribusi terhadap penguatan institusi, dampak terhadap lingkungan, dan kesesuaian dengan prioritas program pemerintah.

#### e. Matrix Logical Framework

Matrix akan menjelaskan keterkaitan hirarki logis mulai dari input, aktifitas, output, purpose dan goal dari project. Matrix juga menerangkan setiap hirarki logis tersebut dengan indikator, alat verifikasi indikator dan asumsi yang digunakan. Ada 2 analisis logis yang digunakan; yaitu analisis logis vertikal dan analisis logis horizontal.

- a. Analisis vertikal dilakukan menjelaskan mengapa dan bagaimana project akan dilakukan dalam mencapai target secara bertingkat.
- b. Analisis horizontal dilakukan untuk menjelaskan prasyarat apa yang dibutuhkan supaya setiap kegiatan dapat dilakukan.

Struktur matriks logframe terdiri dari hirarki tujuan (*goal, purpose, outcome*), kegiatan, indikator pengukuran, metode verifikasi, dan asumsi.

**Tabel 3.3 Struktur Matriks Logframe**

Hirarki Logis	Indikator	Alat Verifikasi Indikator	Asumsi Dan Resiko
Goal/Tujuan	indikator yang menunjukkan kondisi tercapainya maksud program/project	bukti fisik/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur indikator	asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external
Purpose/ Maksud	indikator yang menunjukkan kondisi tercapainya maksud program/project		asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external
Output/ Keluaran			
Activities/ Input/ Kegiatan	indikator yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan (termasuk biaya, sdm, dll)		asumsi yang digunakan dengan melihat faktor external

Sumber : Ausaid,2005

Umumnya matriks logframe tidak mencantumkan keseluruhan daftar kegiatan, melainkan hanya kegiatan utama saja. Hal ini dimaksudkan agar matriks logframe hanya berisi ringkasan apa yang menjadi tujuan proyek ketimbang menggambarkan terlalu banyak detail tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut. Deskripsi kegiatan lebih baik ditempatkan pada dokumen yang berbeda.

Beberapa matriks logframe lebih memilih menggunakan resiko daripada asumsi. Perbedaan antara keduanya adalah resiko menggunakan pernyataan negatif tentang apa yang mungkin bisa terjadi dan menghalangi pencapaian tujuan, sementara asumsi menggunakan pernyataan positif tentang kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kegiatan berjalan sesuai rencana. Pemilihan

penggunaan asumsi atau resiko tidak jadi masalah sebab keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menilai faktor eksternal diluar kontrol pengelola proyek yang bisa mempengaruhi proyek, seperti kenaikan harga, perubahan cuaca, perubahan kebijakan pemerintah, dsb (Ausaid,2005)

Konstruksi matriks logframe memerlukan logika sebab-akibat yang merupakan rasionalisasi dari setiap hirarki tujuan, seperti gambaran berikt ini:

- Jika input disediakan, maka rencana kerja akan dilaksanakan
- Jika rencana kerja dilaksanakan, maka output akan dihasilkan.
- Jika output dihasilkan, maka component objective akan tercapai
- Jika component objective tercapai, maka purpose akan tertopang
- Jika purpose tertopang, maka akan berkontribusi pada ultimate goal.

### **3.8 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah apa saja yang menjadi objek dari suatu penelitian atau suatu yang diperhatikan (Arikunto dalam Perdana,2015). Variabel penelitian merupakan suatu atribut, nilai atau sifat dari suatu objek, individu atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dengan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian dalam penelitian Analisis Implementasi Kawasan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan bertujuan untuk mempermudah dalam proses penyusunan skripsi ini, dapat dilihat pada Tabel 3.4 Berikut :

**Tabel 3.4 Variabel Penelitian**

Variabel	Sub Indikator	Indikator	Metode/Alat Penelitian
Kebijakan Dasar Program	Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Politik dan akademisi</li> <li>2. Keberadaan Kewirausahaan</li> <li>3. Ketersediaan Komunitas Santifik dan Enterpreneur</li> <li>4. Jaringan Informasi</li> <li>5. Promosi</li> <li>6. Keberadaan Inkubator</li> </ol>	Deskriptif Kualitatif
	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pelalawan		
	Kebijakan Dasar Teknopolitan		
Persyaratan Teknopolitan	Sumber Daya Manusia yang Handal	Deskriptif Kualitatif	
	Sumber Daya Alam yang dapat Dikembangkan		
	Sarana dan Prasarana Pendukung		
Kondisi Eksisisting	Zona Pendidikan	Deskriptif Kualitatif	
	Zona Riset		
	Zona Industri		
	Zona Permukiman		
	Zona Perkantoran		
	Zona Pedagangan dan Jasa		
	Zona Fasilitas Umum		
Tujuan, Maksud, dan Kegiatan pada Kawasan Teknopolitan	Kesesuaian perkembangan dengan dokumen	Stakeholder, masalah, tujuan, dan matrik LFA	Deskriptif Kualitatif

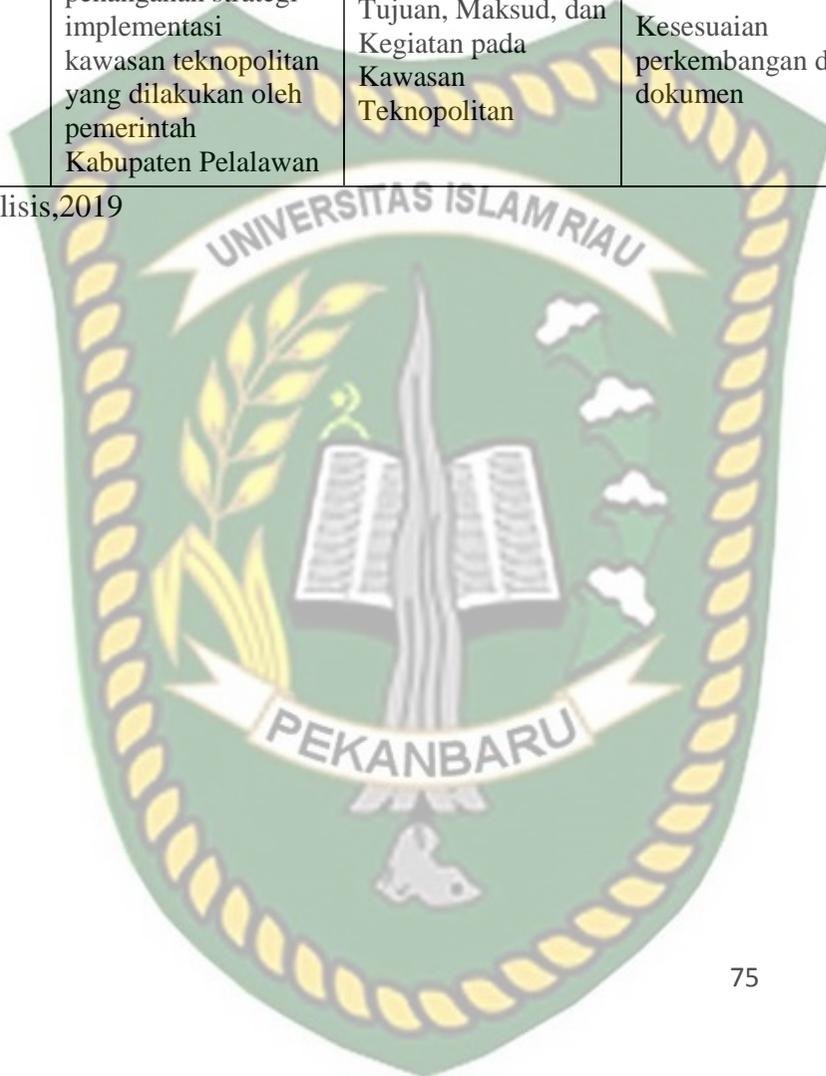
Sumber : Analisis, 2019

Tabel 3.5 Desain Penelitian

Tujuan	Sasaran	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber	Metode Analisis
mengetahui implementasi kebijakan di dalam pembangunan teknopolitan serta mengetahui perkembangan kawasan teknopolitan dan strategi penanganan dalam pembangunan kawasan teknopolitan	Teridentifikasi kebijakan implementasi teknopolitan	Kebijakan Dasar Program	Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau		RPJP dan RPJM Provinsi Riau	Deskriptif kualitatif
			Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pelalawan		RPJM Kabupaten Pelalawan	Deskriptif kualitatif
			Kebijakan Dasar Teknopolitan	1. Dukungan Politik dan akademisi	BPPT	Deskriptif kualitatif
				2. Keberadaan Kewirausahaan		
				3. Ketersediaan Komunitas Santifik dan Enterpreneur		
				4. Jaringan Informasi		
		5. Promosi				
		6. Keberadaan Inkubator				
		Persyaratan Teknopolitan	Sumber Daya Manusia yang Handal	BPPT	Deskriptif kualitatif	
			Sumber Daya Alam yang dapat Dikembangkan			
Sarana dan Prasarana Pendukung						
Mengidentifikasi sejauh mana perkembangan	Kondisi Eksisisting	Zona Pendidikan	Observasi Lapangan dan	Deskriptif kualitatif		
		Zona Riset				
		Zona Industri				

kawasan teknopolitan yang telah terimplementasi.		Zona Permukiman			Wawancara
		Zona Perkantoran			
		Zona Pedagangan dan Jasa			
		Zona Fasilitas Umum			
Menganalisis penanganan strategi implementasi kawasan teknopolitan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan	Tujuan, Maksud, dan Kegiatan pada Kawasan Teknopolitan	Kesesuaian perkembangan dengan dokumen	Stakeholder, masalah, tujuan, dan matrik LFA	Olahan atau Analisis	Logical Framework Approach (LFA)

Sumber : Analisis,2019



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM WILAYAH

#### 4.1 Kondisi Geografis Kawasan Teknopolitan Pelalawan

Kawasan Techno Park Pelalawan berada di Kecamatan Langgam yang terletak di bagian barat Kabupaten Pelalawan dan berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Langgam memiliki luas 1.442 km<sup>2</sup> atau sekitar 10,36% dari total wilayah Kabupaten Pelalawan. Sebagian wilayah adalah daratan (98,72%) banyak digunakan untuk perkebunan sawit (38,27%) dan hutan lebat (39,05%). Kecamatan Langgam berada di ketinggian 30 m dari permukaan laut dan berjarak ke ibukota kabupaten sejauh 20,1 km. Kecamatan tersebut juga memiliki sungai sebanyak 39 buah dengan panjang 348 km dan danau sebanyak 21 buah dengan luas mencapai 66,5 ha. Kecamatan Langgam terdiri dari 1 kelurahan yaitu kelurahan Langgam dan tujuh desa yaitu Desa Segati, Desa Sotol, Desa Tambak, Desa Langkan, Desa Pangkalan Gondai, Desa Penarikan dan Desa Padang Luas. Kecamatan langgam tidak seluruh luas arealnya masuk menjadi wilayah fungsional Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan. Dari total luas tujuh desa yang ada di Kecamatan Langgam, areal yang masuk Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan adalah sekitar 4.830 hektar.

Kawasan Teknopolitan Pelalawan mempunyai bentang lahan total  $\pm 4.830$  hektar. Luasan lahan tersebut saat ini masih belum bisa digunakan secara keseluruhan karena sebagian lahan masih mempunyai status Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT MUP. Total luasan lahan yang mempunyai status HGU tersebut seluas  $\pm 1082$  Ha, sedangkan status lahan seluas 3.650 Ha sudah mendapatkan izin

prinsip dan dilakukan pembangunan oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lahan seluas 3.650 Ha yang sudah mendapatkan izin tersebut secara sistem lahan mempunyai lahan gambut (GBT) seluas ±2228 dan lahan Muara Beliti (MBI) seluas ±1520. Dalam tahapan pembangunannya, kawasan Teknopolitan Pelalawan akan dibagi menjadi 2 zona, yaitu zona prirotas pembangunan 1 dan zona prirotas pembangunan 2. Zona prioritas pembangunan 1 ditujukan untuk lahan yang saat ini sudah ditetapkan oleh Lampiran Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No S.602/Menhut-II/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dan Surat Kepka BKPM No. 1/1/PKH/D/2015 luas kawasan untuk lahan pengembangan Techno Park sebesar 3.650 Ha.

Lokasi Kawasan Techno Park berada di Kecamatan Langgam lebih kurang 30 Km dari ibukota kabupaten (Pangkalan Kerinci), dengan keunggulan komparatif ;

- a. Berada dekat dengan ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) dengan jarak tempuh darat lebih kurang 60 Km.
- b. Dekat dengan sumber energi, yakni terdapat sumur gas di sekitar lokasi, dan sedang dibangun Pusat Listrik Tenaga Gas di mulut tambang tersebut.
- c. Berada pada jalur alternatif lintas timur sumatera.
- d. Akses bahan baku industri pada empat arah, dari utara berasal dari Kecamatan Bandar Seikijang, dari timur berasal dari kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pelalawan, dari selatan berasal dari Kecamatan Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung, dan Ukui, dan dari arah barat berasal dari Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi.
- e. Akses ke pelabuhan laut relatif mudah.

- f. Lahan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Technopark.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Peta Orientasi kawasan teknopolitan pelalawan



#### 4.1.1 Penggunaan lahan

secara umum, penggunaan lahan pada kawasan teknopolitan diklasifikasikan ke dalam 3 peruntukan, yaitu kawasan budidaya, dan kawasan konservasi dan lindung. Adapun pembagian lahanya sebagai berikut :

- a. Kawasan budidaya secara status lahan, kawasan tersebut merupakan zona yang sudah siap dilakukan pembangunan. Penggunaan lahan pada kawasan ini terdiri dari, permukiman, perdagangan dan jasa, sarana dan prasarana, industri, RTH publik, RTH pribadi, area pendidikan, dan area riset.
- b. Kawasan konservasi dan lindung secara umum lahan tersebut merupakan lahan gambut, sehingga dalam pemanfaatannya akan terbatas sesuai dengan permen No. 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan saat ini sedang merencanakan Teknopolitan (*Technopark*) Pelalawan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan pula mengenai rencana pengembangan Teknopolitan Pelalawan ini, yang dikatakan bahwa pembangunannya nanti akan melibatkan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan dokumen pamflet yang membahas mengenai Teknopolitan Pelalawan, pembagian zonasi di Teknopolitan Pelalawan dibedakan atas beberapa fungsi sebagai berikut:

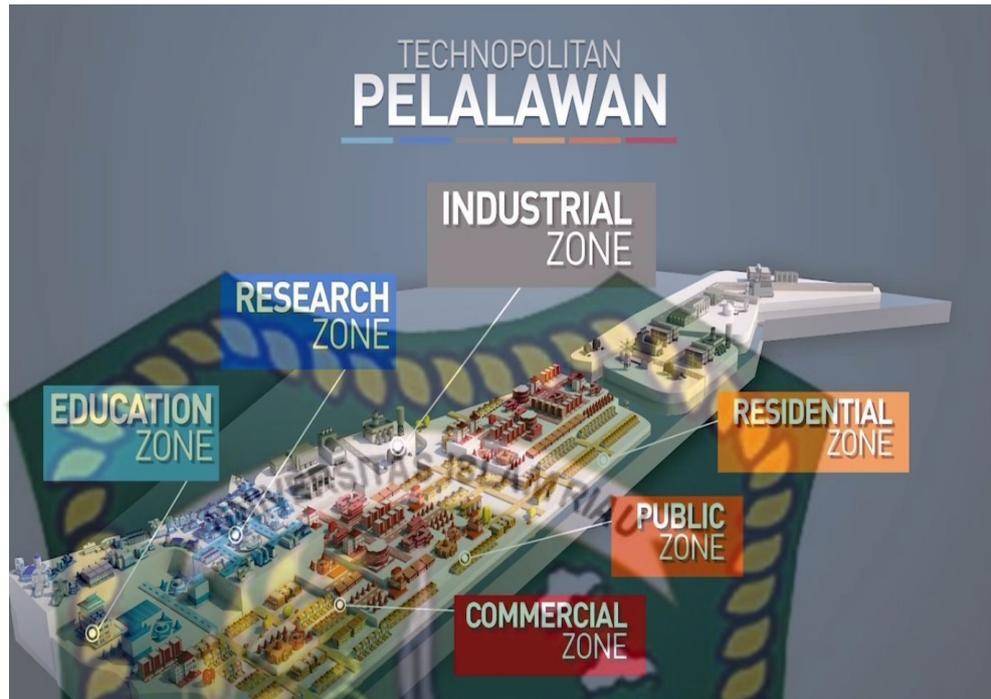
- a) Zona Pendidikan
- b) Zona Riset

- c) Zona Industri
- d) Zona Perkantoran
- e) Zona Perumahan
- f) Zona Perdagangan dan Jasa
- g) Zona Sarana Pelayanan Umum
- h) Zona Lindung

**Tabel 4.1 Penggunaan Lahan di Teknopolitan Pelalawan**

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Zona
1.	Kawasan Research dan Development	80	<b>A</b>
2.	Kawasan Perguruan Tinggi	100	<b>A</b>
3.	Kawasan Industri dan UKM	600	<b>B</b>
4.	Kawasan Permukiman	140	<b>C</b>
5.	Fasilitas Sosial dan Umum	80	<b>C</b>
6.	Kawasan Perkantoran	40	<b>D</b>
7.	Kawasan Jasa dan Komersial	40	<b>E</b>
8.	Kawasan Mixed Use	40	<b>E</b>
9.	Kawasan Rekreasi	40	<b>F</b>
10.	Kawasan RTH	600	<b>F</b>
11.	Kawasan Golf dan Sport Club	40	<b>F</b>
12.	Kawasan Lahan Basah	1.589	<b>F</b>
13.	Infrastruktur	175	<b>G</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.754</b>	

Sumber: Paparan Teknopolitan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan



**Gambar 4.2** Pembagian Zonasi di Technopolitan Pelalawan

Sumber: Dokumen Pamflet Technopolitan Kabupaten Pelalawan

Peta penggunaan lahan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Peta zonasi kawasan teknopolitan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## 4.2 Konsepsi Kawasa Teknopolitan

Teknopolitan adalah konsepsi kawasan berdeminsi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, yang memiliki sentra kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat yang mendukung percepatan perkembangan inovasi, difusi dan pembelajaran. Sementara itu, Kawasan Tekopolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan iptek, kegiatan produktif dan gerakan masyarakat pada wilayah tertentu sebagai sistem pembangunan yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem inovasi.

Suatu Techno Park harus memiliki infrastruktur sains dan teknologi, infrastruktur fisik, basis bisnis, dan pasokan SDM dari universitas dan lembaga riset di sekelilingnya. Selain itu, suatu Teknopolitan juga membutuhkan dukungan pimpinan politik, akademisi, budaya kewirausahaan, kaitan yang kuat antara komunitas scientific dan technopreneur, jaringan informasi, inkubator dan pencitraan Techno Park. Kawasan Teknopolitan memiliki fungsi sebagai sarana dalam membangun jaringan inovasi dan sarana pembelajaran dalam pengembangan inovasi. Dalam pengembangan kawasan Teknopolitan selain membutuhkan economic capital juga membutuhkan intellectual capital dan social capital. Modal intelektual (intellectual capital) merupakan aset dan sumberdaya nontangible atau non-physical dari sebuah organisasi, yaitu mencakup proses, kapasitas inovasi, pola-pola, dan pengetahuan dari para anggotanya dan jaringan kolaborasi dan hubungan organisasi. Sedangkan Modal sosial (social capital) adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan masyarakat,

norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengembangkan kawasan teknopolitan Pelalawan membutuhkan luas lahan sekitar 3.650 hektar yang terletak di Kecamatan Langgam. Pada prinsipnya konsep dasar kawasan teknopolitan merupakan hasil konsensus bersama dan keharmonian antara berbagai pihak dapat menciptakan keuntungan yang jelas. Pihak-pihak yang menjadi peran sentral dalam kawasan teknopolitan antar lain pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri.

Pembentukan kawasan teknopolitan Pelalawan dilakukan dengan bertujuan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antar komunitas academia, bisnis, pemerintah (ABG) dalam rangka meningkatkan daya saing daerah berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan (knowledge based economy).

Dengan mendasarkan kepada urgensi pembentukan Kawasan Teknopolitan Pelalawan tersebut, rencana pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan ditetapkan dengan visi “Menjadi kawasan utama Pelalawan bagi pemajuan dan pemanfaatan iptek dan inovasi berkelas dunia yang ramah lingkungan”. Kemudian dari visi tersebut dijabarkan kedalam misi pembangunan Kawasan Teknopolitan Pelalawan dirumuskan sebagai berikut:

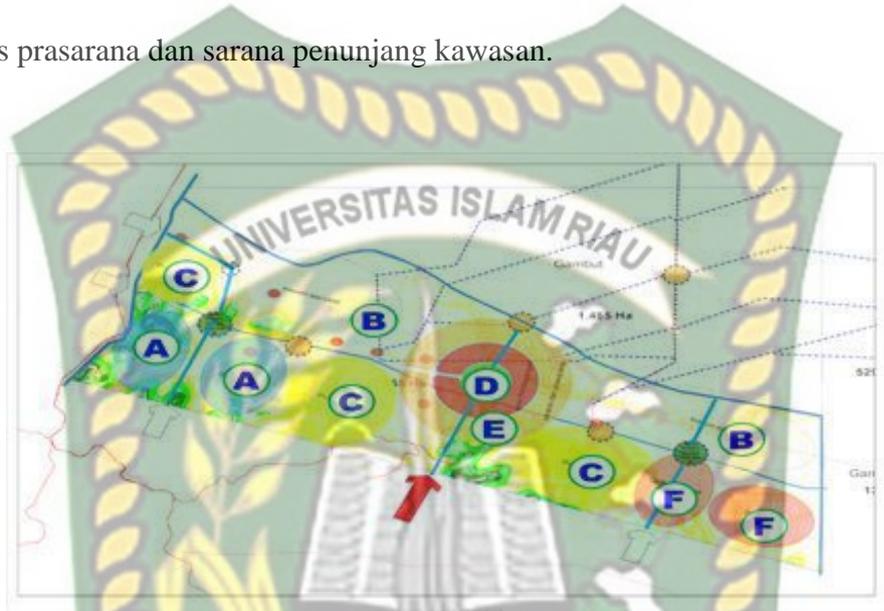
- a) Mengembangkan SDM berkualitas;
- b) Mendorong pengembangan budaya kreatif inovatif masyarakat daerah
- c) Mengembangkan pusat-pusat keunggulan untuk mendorong pemajuan dan pemanfaatan iptek dan inovasi
- d) Menumbuhkembangkan bisnis-bisnis inovatif

- e) Mendukung pengembangan keunggulan (daya saing) khas daerah
- f) Memberikan pelayanan berbasis iptek
- g) Mengelola pembangunan hijau (green development) di kawasan. Untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Teknopolitan

Pelalawan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan berkelanjutan, secara umum kawasan perencanaan akan dibagi menjadi tujuh Blok, yaitu:

1. Blok A: Blok Kegiatan Pendidikan dan R&D Center meliputi Institut Teknologi Pelalawan, Akademi Komunitas/Politeknik dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (R&D Center).
2. Blok B: Blok Kegiatan Industri dan UKM; beberapa bangunan fasilitas utama yang ada di areal ini adalah bangunan pabrik oleo kimia, oleo pangan, dan limbah sawit.
3. Blok C: Blok Kegiatan permukiman yang berwawasan lingkungan, seperti kawasan hunian, rumah ibadah, rekreasi, dan rumah sakit.
4. Blok D: Blok Kegiatan perkantoran; beberapa bangunan fasilitas utama yang ada di areal ini adalah kantor pengelola kawasan, kantor pelayanan pengurusan perijinan, kantor pengelola keamanan kawasan.
5. Blok E: Blok Kegiatan perdagangan dan jasa beberapa fasilitas utama yang ada di areal ini adalah kawasan perdagangan dan layanan jasa.
6. Blok F: Blok Kegiatan Rekreasi, Olah Raga, Rumah Ibadah, Ruang Terbuka Hijau dan Buffer. Area Fasilitas prasarana dan sarana penunjang kawasan meliputi Badan jalan, drainase dan sanitasi lingkungan, jaringan TIK, pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, jaringan listrik, pengolahan sampah.

Pengembangan kawasan ini akan dilayani oleh blok-blok yang tersebar dan merata. Blok A, B, C, D, E, dan F merupakan area kegiatan seperti tampak dalam Gambar 1.1. Blok-blok ini dianggap satu kesatuan karena lokasinya yang berdekatan dan mempunyai hubungan yang berkaitan erat serta dilengkapi dengan fasilitas prasarana dan sarana penunjang kawasan.



**Gambar 4.5 Peta pembagian Blok Kawasan Teknopolitan Pelalawan**

Sumber: Dokumen Pamflet Teknopolitan Kabupaten Pelalawan

Untuk membedakan pengembangan kawasan teknopolitan dengan kawasan yang lain tercermin pada karakteristik dari teknopolitan tersebut, yaitu:

- a) Sebagai kawasan khusus yang berdemensi pada pembangunan ekonomi berbasis teknologi.
- b) Kegiatan penelitian dan pengembangan (lembaga riset)
- c) Kegiatan pendidikan (universitas /perguruan tinggi)
- d) Kegiatan industri (kawasan industri)
- e) Kegiatan pendukung lainnya (misalnya dukungan infrastruktur, perumahan, dan dukungan fasilitas lainnya).

Karena itu, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kawasan teknopolitan, yaitu adanya:

- a) Sumber daya (alam) yang unggul (misalnya kelapa sawit).
- b) Fasilitas pengolahan sumber daya (alam) yang unggul (perlunya kawasan industri).
- c) Sumber daya manusia yang handal dan bekerja keras (perlu universitas / training centre).
- d) Fasilitas penelitian dan pengembangan (perlunya lembaga litbang/riset).
- e) Aksesibilitas yang mudah (transportasi dan telekomunikasi).
- f) Fasilitas untuk keperluan sehari-hari (shopping, hiburan).
- g) Fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk anak (perlu medical centre dan education centre).
- h) Keamanan dan ketentraman (perlu kantor polisi).
- i) Kemudahan birokrasi dan perpajakan (perlu kebijakan dari pemerintah yang mendukung investasi).
- j) Tempat tinggal yang nyaman dan aman (perlu perumahan yang terjaga).

#### **4.3 Potensi Pengembangan Kawasan Teknopolitan**

Kawasan Teknopolitan yang berada di Kecamatan Langgam mempunyai potensi pertanian baik pertanian tanaman pangan maupun palawija. Komonitas yang berpotensi adalah jagung dan ubi kayu, dan yang paling dominan ubi kayu. Kelapa sawit menjadi komoditas utama perkebunan di Kecamatan Langgam selain itu juga ada perkebunan karet. Total luas tanaman kelapa sawit mencapai 11.656 Ha dengan total produksi 42.063 ton. Perkebunan karet tercatat menjadi

luas tanam 2.552 Ha dengan total produksi 3.297 ton. Perkebunan kelapa sawit dimiliki perusahaan dan masyarakat, masyarakat dapat mengelola sendiri lahan perkebunannya maupun dikelola perusahaan. Berikut tabel indikator perkebunan Kecamatan Langgam Tahun 2018. Berikut Tabel 4.2 indikator perkebunan kecamatan langgam tahun 2018.

**Tabel 4.2 Indikator Perkebunan Kecamatan Langgam Tahun 2018**

Jenis Tanaman	Belum Menghasilkan (Ha)	Menghasilkan (Ha)	Rusak/Tua (Ha)	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)
Karet	233,00	2.317,00	2,00	2.552,00	3.297,00
Kelapa	21,00	30,00	0,00	52,00	45,00
Kelapa Sawit	337,00	11.189,00	30,00	11.656,00	42.063,00

Sumber: BPS Dalam Angka 2018

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa komunitas unggulan pada Kecamatan Langgam adalah perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet dimana pada kawasan teknopolitan nantinya komunitas unggulan ini akan dimanfaatkan menjadi produk unggulan untuk dapat menjadi komunitas yang lebih unggul dan lebih bervariasi.

## BAB V

### HASIL PEMBAHASAN

#### 5.1 Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program Kawasan Teknopolitan

##### 5.1.1 Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Riau

Pengembangan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan memerlukan dukungan kebijakan yang sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Riau. Kebijakan yang harmoni dan selaras antara Provinsi Riau dengan Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu faktor utama bagi keberhasilan pengembangan Teknopolitan di Kabupaten Pelalawan. Dukungan kebijakan yang kondusif dari Pemerintah Provinsi Riau akan meningkatkan daya tarik investasi di Kawasan Teknopolitan.

Dukungan kebijakan pembangunan Provinsi Riau terhadap pengembangan Teknopolitan Pelalawan akan tercermin pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP/RPJM) Provinsi Riau. Beberapa kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Riau berikut sasaran pokok yang hendak dicapai yang diharapkan dapat mendukung pengembangan Teknopolitan Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian
2. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan bersaing
3. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah
5. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah

Untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Riau, peranan pemerintah diharapkan dapat:

1. Mendorong terbentuknya struktur ruang yang lebih menjamin pengurangan disparitas perkembangan antar wilayah di Provinsi Riau.
2. Meningkatkan aksesibilitas di wilayah Provinsi Riau terutama pada pusat – pusat kegiatan ekonomi.
3. Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan prasarana
4. Meningkatkan kapasitas pelabuhan seperti, pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan Pekanbaru sebagai pelabuhan internasional juga peningkatan kapasitas peabuhan regional untuk melayani pergerakan barang dan penumpang serta produksi perikanan setempat.
5. Membangun bandar udara pengganti SSQ II
6. Meningkatkan kinerja transportasi sungai
7. Mengintegrasikan sistem transportasi antar moda yaitu darat, laut, udara
8. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana guna mendukung perkembangan pusat sub wilayah
9. Mengalokasikan ruang bagi kegiatan budidaya perkotaan, pertambangan, pertanian, industri, perikanan, peternakan, dan pariwisata sesuai RTRW Provinsi Riau.
10. Membangun prasarana kelistrikan, energi, dan telekomunikasi
11. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan kualitas aparatur pelaksanaannya melalui perkuatan institusi, koordinasi penataan ruang daerah

12. Menjalin kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun prasarana dan infrastruktur wilayah berskala besar

### 5.1.2 Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pelalawan

Dalam mewujudkan prioritas pembangunan dan fokus sasaran unggulan pembangunan, ditemukan kendala seperti keterbatasan sumber daya keuangan pembangunan, di tengah-tengah banyaknya tuntutan pemenuhan kebutuhan akan pembangunan yang harus dicapai dalam masa lima tahun sesuai tercantum RPJMD 2011-2016, maka diperlukan pemulihan dan penentuan prioritas pembangunan serta fokus sasaran unggulan yang diperhitungkan mampu dicapai pada tahun akhir masa pimpinan daerah.

Untuk mencapai visi RPJMD Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 terdapat misi yang salah satunya yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi, mendorong investasi, pengembangan pariwisata dan usaha strategis daerah yang berwawasan lingkungan. Agar misi tersebut bisa diwujudkan, tentunya tidak terlepas dari aspek daya saing, isu ketimpangan antar wilayah, ketimpangan asset, dan kemiskinan. Keterlibatan serta peran aktif seluruh aktor pembangunan sangat diharapkan dalam membangun kemandirian ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat dan sektor swasta memiliki sumbangan yang besar bagi keberhasilan kemandirian ekonomi suatu wilayah.

Kabupaten Pelalawan memiliki kekuatan dari potensi ekonomi untuk membangun kemandirian ekonomi. Sumber daya berupa kekayaan alam disektor gas alam, batubara, bentonit, pariwisata dan perkebunan merupakan potensi unggulan seperti antara lain gas alam di Kecamatan Langgam. Hal ini mampu

menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Pelalawan bila dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

### 5.1.3 Kebijakan Dasar Teknopolitan

Merujuk kepada dasar hukum teknopolitan menurut Carlos Quandt untuk keberlangsungan dan keberlanjutan teknopolitan ditentukan dengan beberapa faktor yaitu :

#### 5.1.3.1 Ketersediaan Dukungan dari Pihak Politik dan Akademis

Dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan teknopolitan, khususnya kawasan pendidikan telah dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), yang mana telah terdapat di dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Teknopolitan Pelalawan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pelalawan. Adapun fungsi dari UPT ini adalah sebagai pengelola administrasi yang berfungsi sebagai mengelola dan mengkoordinasikan kebijakan agar nantinya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, promosi dan publikasi dalam hal ini berfungsi sebagai pengenalan kepada masyarakat serta investor tentang fungsi dan manfaat dari terbentuknya kawasan teknopolitan, penghubung antara masyarakat, pengusaha, investor dengan tim kebijakan serta pengawasan lapangan, implementasi program pembangunan kawasan teknopolitan, koordinasi implementasi program pembangunan kawasan teknopolitan sehingga terjadi hubungan yang saling berkesinambungan, dan memfasilitasi perizinan di dalam kawasan teknopolitan.

Adapun dengan ketersediaan dukungan dari pihak politik (pemerintah) memberikan keuntungan atas peran keterlibatannya dalam pengembangan teknopolitan seperti bagi pemerintah (politik) terjadi peningkatan aktivitas bisnis, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pendapatan retribusi pajak, meningkatkan jumlah lapangan kerja, meningkatkan ekonomi berbasis *R&D*, meningkatkan ekspor dan investasi daerah. Pada bidang akademis, keuntungan yang akan diperoleh yaitu menyediakan lapangan kerja untuk lulusan, meningkatkan kualitas perguruan tinggi, meningkatkan transfer teknologi, meningkatkan interaksi dengan industri, mendapatkan dana, dan aplikasi teknologi untuk ekonomi regional.

#### **5.1.3.2 Keberadaan Kewirausahaan**

Kewirausahaan berperan aktif di dalam pembangunan kawasan teknopolitan dimana untuk menjadi kawasan terpadu yang menggabungkan dunia industri, perguruan tinggi, dan riset menggunakan teknologi diperlukan peran dari kewirausahaan. Kewirausahaan di sini berperan menjadi fasilitator dalam mewadahi pengembangan riset yang di lakukan di kawasan teknopolitan. Kehadiran kewirausahaan memberikan pengaruh yang baik nantinya sebab, peran kewirausahaan disini nantinya akan mewadahi kegiatan riset yang dilaksanakan di pusat riset teknopolitan yang nantinya produk hasil produksi bisa menjadi barang yang bernilai ekonomis yang bisa dijual.

Dalam pengembangan kawasan teknopolitan terdapat 5 pihak wirausahaan yang bekerjasama yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI, PT. Rekayasa Engineering, PT. PINDAD (PERSERO), Dewan Minyak Sawit

Indonesia (DMSI), dan PPKS Medan dimana, peran pihak wirausahaan yang bekerja sama dalam pembangunan kawasan tenopolitan memiliki peran penting yakni wirausahaan yang bekejasama dalam pengembangan kawasan teknopolita in akan membantu dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit dan dapat memberdayakan petani dan masyarakat pada kawasan teknopolitan.

Perguruan tinggi dan lembaga riset menyediakan tempat pelatihan bagi pengusaha dan mendukung teknologi bagi kewirausahaan sesuai dengan kompetensi masing –masing.

#### **5.1.3.3 Keberadaan Komunitas Sainifik dan *Enterpreneur***

Komunitas saintifik dan *enterpreneur* sangat penting di dalam pembangunan teknopolitan, dalam upaya mewujudkan visi misi teknopolitan Pelalawan yakni pembangunan yang berbasis masyarakat, maka terjalinlah kerjasama antara 5 pihak yang nantinya akan memberdayakan masyarakat dan merevitalisasi kebun kelapa sawit masyarakat. 5 pihak yang bekerja sama dalam pembangunan kawasan teknopolitan yakni Pemkab Pelalawan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI, PT. Rekayasa Engineering, PT. PINDAD (PERSERO), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), dan PPKS Medan. Dimana 5 perusahaan ini sepakat untuk melakukan upaya pemberdayaan dan revitalisasi kebun sawit swadaya sekaligus membangun berbagai pabrik terkait sebagai wujud kemandirian dan fungsionalisasi kawasan teknopolitan Pelalawan.

Lembaga riset akan mendorong menggerakkan inovasi dan dapat menciptakan produk – produk unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Lembaga riset juga berguna dalam penemuan inovasi teknologi baru yang dapat

mempermudah dalam memproduksi hasil perkebunan dan dapat menunjang industri yang efisien dan berdaya saing tinggi dalam pasarnya.

*Entrepreneur* mendorong dalam pemasaran dan mengenalkan produk yang dihasilkan oleh lembaga riset kepada masyarakat dan pasar sehingga terjalin hubungan yang saling keterkaitan dan dapat meningkatkan ekonomi.

#### **5.1.3.4 Jaringan Informasi**

Pengembangan kawasan teknopolitan yang bertujuan membuka dan mengembangkan industri pada sektor perkebunan khususnya pengembangan perkebunan kelapa sawit berbasis teknologi yang nantinya akan menghasilkan produk yang juga dalam pemasaran produk ini juga membutuhkan akses jaringan informasi serta kerjasama yang melibatkan beberapa pihak. Kehadiran jaringan informasi menjadi akses untuk berbagai pihak bisa saling berinteraksi dan berkoordinasi dalam keterlibatan jaringan di dalam pengembangan kawasan teknopolitan.

Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi penyediaan teknologi transportasi kebutuhan teknologi, pertahanan, dan teknologi dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia dan riset.

Jaringan informasi dalam pengembangan teknopolitan bertujuan untuk memberikan informasi kepada investor dan masyarakat tentang manfaat dan fungsi dari teknopolitan itu sendiri sehingga dalam pengembangan dapat menarik investor untuk berinvestasi pada kawasan teknopolitan ini.

Jaringan informasi pada teknopolitan bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri dimana perguruan tinggi dan lembaga tinggi menciptakan inovasi – inovasi dan nantinya perusahaan yang akan bekerjasama dalam memberikan informasi produk dan inovasi apa yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan lembaga riset. Informasi ini diberikan dengan cara mengadakan seminar, sosialisasi dengan masyarakat, dan pemberian bekar ilmu pengetahuan tentang manfaat dan fungsi kawasan teknopolitan. Informasi juga menyediakan dan menyearluaskan data informasi yang lengkap mengenai project profile, dan peluang – pluang investasi yang terdapat pada kawasan teknopolitan kepada investoor.

Informasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan kawasan teknopolitan dapat mencapai hasil yang diinginkan, seperti informasi yang tepat diberikan kepada investor daan masyaarakat agar investor daan masyarakat tertarik dan dapat bekerjasama dalam pembangunan kawasan teknopolitan.

#### **5.1.3.5 Promosi**

Sebagai upaya mengembangkan terobosan baru dalam format science technopark yang akan dikembangkan melalui organisasi UPT yang telah dibenuk sebelumnya promosi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menguatkan peran iptek dalam pengembangan ekonomi dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing usaha terkait serta lembaga – lembang berbasis pengetahuan, sehingga dapat mencapai tujuan untuk mengatur perngetahuan dan teknologi antara perguruan tinggi, riset dan, industri.

Rancangan untuk menjadikan kawasan yang mensinergikan SDM terdidik dan terlatih dilakukan untuk meningkatkan citra kawasan teknopolitan yang terpadu dan berdaya saing, dimana SDM handal serta menghasilkan berbagai hasil invensi dan inovasi terkait dengan sumber daya alam Pelalawan. Melalui publikasi atau promosi dapat mengenalkan sumberdaya serta hasil inovasi kepada publik dalam bentuk iklan media, brosur, booklet, dan sosialisasi.

Promosi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan kepada investor dan masyarakat dengan cara memberikan seminar terkait tentang kawasan teknopolitan pada hari peringatan kebangkitan teknologi nasional (HAKTEKNAS) yang mana seminar ini bertujuan untuk mendukung program Pelalawan inovatif, membuat iklan tentang kawasan teknopolitan yang akan dan sedang berlanjut, dan memberikan promosi dengan menggunakan website.

#### **5.1.3.6 Keberadaan inkubator**

Suatu teknopolitan harus memiliki infrastruktur sains dan teknologi, infrastruktur fisik, basis bisnis, dan pasokan SDM dari perguruan tinggi dan lembaga riset di sekelilingnya. Selain itu, suatu teknopolitan juga membutuhkan peran serta dan dukungan dari pimpinan politik, akademis, jaringan informasi, dan inkubator . kawasan teknopolitan memiliki fungsi sebagai sarana dalam membangun jaringan inovasi dan sarana pembelajaran dalam pengembangan inovasi. Dalam pengembangan kawasan teknopolitan selain membutuhkan *economic capital* juga membutuhkan *intellectual capital* dan *social capital*. Modal intelektual (*intellectual capital*) merupakan aset dan sumberdaya nontangible atau non-physical dari sebuah organisasi, yaitu mencakup proses, kapasitas inovasi,

pola-pola, dan pengetahuan dari para anggotanya dan jaringan kolaborasi dan hubungan organisasi. Sedangkan Modal sosial (*social capital*) adalah bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan masyarakat, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi.

Dalam pengembangan kawasan teknopolitan terlepas dari pemilihan lokasi kawasan yang dikembangkan inkubator menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi didalam pengembangan kawasan teknopolitan, dimana inkubator berperan didalam riset, pengembangan inovasi, serta pemasaran produk yang dihasilkan, serta sarana untuk mengembangkan institusi bermuatan teknologi, atau dengan kata lain sebagai tempat inkubator bisnis.

#### **5.1.4 Persyaratan Teknopolitan**

Teknopolitan bukanlah sebagai tujuan melainkan sebagai wahana untuk memacu pembangunan. Mengingat karakteristik teknopolitan yang memerlukan koordinasi yang intensif, oleh karena itu perludanya persyaratan khusus yakni :

##### **5.1.4.1 Memiliki Sumber Daya Manusia yang Handal**

Dalam Permen PU nomor 20 tahun 2011 Tentan Ketentuan Teknis RDTR dan peraturan Zonasi, Pengembangan pola ruang dan zonasi suatu kawasan dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, sehingga didalam teknopolitan peran akademis dan riset sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Dalam misi teknopolitan yang berlandaskan pada misi pembangunan pemerintah Pelalawan adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat sehingga tercipta sumber daya manusia yang dapat berdaya saing tinggi dan dapat mengembangkan inovasi yang berbasis iptek.

Peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia pada kawasan teknopolitan dilakukan dengan menciptakan perluasan pembangunan prasarana dan mutu pelayanan pendidikan hingga jenjang sekolah tinggi sehingga menciptakan kualitas yang berdaya saing tinggi dan unggul. Pada kawasan teknopolitan sumberdaya manusia didalam bidang akademis mengembangkan sumber daya alam pada kawasan teknopolitan sehingga tercipta inovasi dan produk yang dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia juga sebagai pemasok tenaga kerja yang terlatih yang dikembangkan dalam perguruan tinggi dan lembaga riset pemerintah di kawasan teknopolitan.

Pada tahun 2012 pemerintah Kabupateen Pelalawan menyediakan beasiswa S2 dan S3 yang dilakukan untuk mempersiapkan tenaga pengajar yang berkualitas dalam mengembangkan kawasan teknopolitan. Pemerinah Kabupaten Pelalawan mengirimkan 5 orang yang mendapatkan beasiswa ke UTM Johor

Malaysia dimana 2 orang jurusan agroteknologi, 1 orang teknik kimia, 1 orang teknik industri, dan 1 orang teknik elektro. Sumber daya manusia pada teknopolitan saat ini sudah memasuki tahapan pengembangan ilmu pengetahuan dan meneliti penyakit pada kelapa sawit dan mulai memberikan tahapan pengembangan bibit unggul dan memberdayakan para petani kelapa sawit.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengembangkan sumber daya manusia dengan menyediakan program pendidikan untuk semua, peningkatan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan peningkatan proses belajar mengajar, sehingga terjalin kerjasama penyediaan peralatan, pelatihan dan serifikasi terhadap sumber daya manusia.

#### **5.1.4.2 Sumber Daya Alam yang dapat Dikembangkan**

Konsep teknopolitan Pelalawan adalah menyiapkan suatu kawasan khusus yang memiliki suatu keunggulan komparatif dan diminati oleh para investor untuk bekerjasama terutama dibidang industri yang nantinya akan memberikan nilai tambah terhadap produk unggulan yang di produksi daerah. Perkebunan kelapa sawit menjadi komunitas unggulan pada kawasan teknopolitan ini dimana luas lahan yang ditanami sawit seluas 11.656 Ha dengan hasil panen mencapai 42.063 Ton, selain kelapa sawit kebun karet juga menjadi salah satu perkebunan yang cukup luas dimana luas kebun karet mencapai 2.552 Ha dengan hasil panen mencapai 3.297 Ton dan 75 persen dari masyarakat sekitar kawasan teknopolitan menggantungkan hidupnya pada perkebunan kelapa sawit.

Untuk mendorong berkembangnya kawasan teknopolitan, pemerintah meluncurkan kebijakan dis-insentif berupa bea keluar yang bertujuan untuk

menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan baku dalam negeri dan dapat melindungi kelestarian sumber daya alam. Dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing sumber daya alam berperan penting didalam pembangunan teknopolitan memiliki potensi unggulan dalam pengembangan industri kelapa sawit, sehingga pengembangan kapasitas inovatif daerah dan setral pertumbuhan baru daerah dapat dilaksanakan.

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, disamping itu untuk mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan mampu berdaya saing pemanfaatan sumber daya alam yang dengan baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Penataan ruang wilayah ikut berperan penting dalam mewujudkan pemanfaatan segenap sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, sehingga mempunyai nilai atau manfaat ekonomi dan sosial.

#### **5.1.4.3 Sarana dan Prasarana Pendukung**

Sarana dan prasana dibangun dalam kawasan teknopolitan bertujuan untuk mendukung perkembangan kawasan teknopolitan, pembangunan lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, sarana produksi, jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya dibangun untuk mendukung perkembangan kawasan teknopolitan sehingga menciptakan jaringan inovasi.

Sarana yang tersedia pada kawaasan teknopolitan saat ini adalah sekolah dasar berjumlah 4 unit, sekolah menengah pertama berjumlah 1 unit, sekolah

menengah atas 1 unit, dan sekolah tinggi teknologi pelalawan berjumlah 1 unit. Sarana kesehatan pada kawasan teknopolitan terdiri dai 1 praktek dokter, 1 puskesmas, 1 poskesdes, dan 4 posyandu, sarana peribadatan terdiri dari 3 unit mesjit dan 9 unit mushallah. Sarana perekonomian yang ada pada kawasan teknopolitan saat ini berjumlah 86 yang terdiri dari 1 pasar, 75 warung klontong, 10 kedai makan.

Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Langgam prasarana jalan pada kawasan teknopolitan terdiri dari 20 Km jalan yang telah diaspal, 6 Km jalan yang telah di semen, dan 9 Km jalan sudah diperkeras, dimana jalan untuk menuju ST2P masih berupa jalan yang telah diperkeras, selain itu terdapat prasarana dermaga yang dibangun oleh PT. RAPP yang difungsikan sebagai angkutan dalam Kabupaten.

Lembaga tinggi dan riset merupakan salah satu sarana yang dibangun guna untuk terselenggaranya riset yang terarah dan terintegrasi sebagai penentu kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan produk unggulan yang akan didistribusikan kepada petani dan dapat meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada pada kawasan teknopolitan.

Prasarana dibangun guna untuk pengembangan kawasan dimana dengan adanya prasarana yang memadai dapat meningkatkan fungsi – fungsi pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya pusat kegiatan, pembangunan jaringan jalan dan telekomunikasi juga menjadi salah satu cara dalam aksesibilitas untuk mencapai kawasan serta menyalurkan hasil produksi sehingga hasil produksi dapat didistribusikan kepada daerah sekita kawasan atau antar kabuupaten.

Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan untuk mendorong pengembangan teknopolitan sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan. Penyediaan dan layanan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan standar selain akan sangat menunjang aktivitas perekonomian, juga meningkatkan aksesibilitas lokasi sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi investor.

## **5.2 Analisis Perkembangan Kawasan Teknopolitan**

Pengembangan kawasan teknopolitan yang terdiri dari 7 zona yakni zona pendidikan, zona riset, zona permukiman, zona perkantoran, zona industri, zona perdagangan dan jasa, dan zona fasilitas umum. Saat ini fokus utama pengembangan terjadi pada zona pendidikan dan zona riset.

### **5.2.1 Zona Pendidikan**

Zona pendidikan dalam arahan peruntukan rencana yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan akan dibangun pada lahan 100 Ha dengan fasilitas pendidikan yang akan dibangun yaitu TK dan SD, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas/ perguruan tinggi, sekolah kepolisian, akademi komunikasi, dan area perkemahan. pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dikembangkan terpadu sebagai fasilitas permukiman sesuai dengan standar minimum pelayanan yang disyaratkan didalam rencana teknopolitan.

Penepatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkau maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan. Jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam kawasan teknopolitan disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani. Sarana perguruan tinggi pada minimum aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal.

Zona pendidikan dibangun berdekatan dengan zona perumahan dan zona riset hal ini dilakukan untuk efisiensi mobilitas dari tempat hunian menuju zona pendidikan dan zona riset. Strategi pengembangan teknopolitan untuk meningkatkan pengembangan inovasi didukung dengan pemberdayaan masyarakat sehingga terdapat angkatan kerja yang mempunyai tingkat pendidikan/ keahlian yang tinggi dan flaksibel.

Zona pendidikan melalui perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia yang intelektual dan terlatih diharapkan dapat menciptakan kemajuan iptek. Zona pendidikan diperuntukan sebagai penggerak dan menambah pengetahuan baru dan dapat menghasilkan tenaga telatih secara terus menerus.

Akademis dalam hal ini adalah Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang difungsikan sebagai kampus ST2P, pusat inovasi, dan kantor pusat pengelolaan kawasan dibangun pada lahan seluas 100 Ha yang mulai aktif dari tahun 2017. Berdasarkan BPPT pada tahun 2012 telah dilakukan persiapan pendirian perguruan tinggi. Oprasional perguruan tinggi ini menggunakan dana hibah yang sudah tercantum didalam APBD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 4,3 Miliar rupiah. Pembangunan kawasan pendidikan ini baru rampung pada tahun 2016 dan beroperasi pada tahun 2017. Akademis memainkan peran penting dalam

teknopolitan dimana akademis sebagai penggerak pendidikan, pengetahuan baru dan menciptakan tenaga kerja terlatih secara terus menerus yang nantinya dapat menciptakan inovasi baru.

Kampus ST2P ini dikelola oleh yayasan Amanah yang bekerjasama dengan pemerintah dan unit pelayanan teknis dalam mengelola pengembangan dan kegiatan belajar mengajar beserta riset. Saat ini perguruan tinggi ini terdiri dari 2 program studi yakni agroteknologi dan teknik industri, Dimana saat ini tersedia 12 dosen tetap, 6 dosen luar biasa, 3 dosen tamu, dan 2 dosen keahlian khusus kajian islam yang membantu dalam belajar mengajar.

Pada tahun 2017 mahasiswa dan mahasiswi yang terdaftar di ST2P ini berjumlah 33 orang dan pada tahun 2018 jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang terdaftar berjumlah 70 orang. Kampus ST2P saat ini beroperasi dengan menggunakan biaya dari pemerintah Kabupaten Pelalawan di bantuan dari CSR perusahaan melalui beasiswa ST2P.

Pada kampus ST2P ini telah beroperasi pusat inovasi yang berfungsi sebagai inkubator bisnis berbasis teknologi, dimana saat ini telah dilakukan seleksi tenant inkubator dan sedang menginkubasi 5 calon perusahaan pemula yang berbasis teknologi dengan bisnis yang terkait pengelolaan kelapa sawit dengan menggunakan teknologi modern.

Perguruan tinggi yang didirikan berperan penting didalam pengembangan sumber daya alam yang ada pada kawasan teknopolitan, dimana lembaga ini menciptakan dan menghasilkan berbagai investasi dan inovasi dengan memanfaatkan sumber daya alam, selain itu lembaga ini merupakan berbasis penelitian dan pengembangan usaha dimana dilakukan penelitian terhadap sumber

daya alam unggulan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga dapat menyediakan bahan tanaman unggulan bagi para petani dan dapat mencetak kerja yang terampil dalam bidangnya.

### 5.2.2 Zona Riset

Zona riset dalam perencanaannya akan dibangun pada lahan 180 Ha dengan fasilitas berupa perkantoran dan pusat penelitian kelapa sawit, lembaga litbang, perkantoran pusan inovasi, laboratorium perternakan, ccadangan untuk lahan pengembangan pusat inovasi dan fasilitas riset lainnya. Zona riset diperuntukkan untuk kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan riset dan penelitian, tempat bekerja serta dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukung yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horizontal maupun vertikal. Zona riset dibangun pada tahun 2016 sampai 2033 dimana pembangunannya dilakukan secara bertahap. Zona riset dikembangkan dekat dengan kawasan perumahan klaster. Bagunan dalam lingkungan zona riset dan penelitian dikembangkan dengan tema multidisiplin berdasarkan program pelatihan universitas.

Zona riset terletak bersebelahan dengan zona pendidikan dikarenakan zona pendidikan masih satu klaster dengan zona riset. Hal ini sesuai dengan pedoman dalam pengembangan kawasan bahwa harus tersedia klaster bangunan dalam lingkungan riset dengan tema multidisiplin. Zona riset diharapkan nantinya akan menciptakan tenaga kerja terlatih, ilmuwan, insiyur, teknisi yang dibina dalam pengembanagn teknopolitan.

Zona riset didirikan sebagai pendorong inovasi yang nantinya akan menciptakan teknologi atau pun cara yang lebih modern dalam menghasilkan suatu produk. Dalam kawasan teknopolitan dilakukan riset terhadap komunitas unggulan, cara pengelolaan serta alat yang digunakan yang lebih inovasi lai sehingga dapat menghasilkan produk yang handal.

Zona riset pada kawasan teknopolitan saat ini telah tersedia dimana lembaga riset terletak pada area ST2P dan saat ini mulai beroperasi dengan dibantu oleh PPKS Medan. Mahasiswa dan mahasiswi mengembangkan inovasi dibantu oleh PPKS Medan dalam pembangunan kebun bibit kelapa sawit dan klinik kelapa sawit yang saat ini baru terbangun pada lahan seluas 5 Ha dari luas kawasan yang direncanakan sebesar 50 Ha. Nantinya bibit – bibit kelapa sawit yang telah di teliti dapat di salurkan kepada petani sawit yang ada pada kawasan teknopolitan menjadi bibit unggulan sehingga sawit memiliki buah yang lebih bagus dan masa panen yang lebih singkat.

Karakteristik petani yang saat ini perlu ditangani antara lain tingkat produktifitas yang rendah, belum memiliki teknik budidaya sawit yang baik, modal usaha yang minim, dengan adanya lembaga riset para petani diajarkan bagaimana pembibitan dan budidaya kelapa sawit yang baik.

Lembaga riset melalui sosialisasi dan seminar dengan para petani mengimpun para petani kelapa sawit dalam koperasi. Pengelolaan kelapa sawit perorangan akan dipindahkan menjadi manajemen koperasi sehingga lebih mudah dan efektif dalam penerapan praktek budidaya kelapa sawit yang baik. Keuntungan dari koperasi ini akan merangkul para petani yang tadinya pekerja

saja tapi juga menjadi pemilik lahan dan bisa menjadi lebih mandiri dan dapat memasarkan hasil perkebunannya sendiri.

### 5.2.3 Zona Industri

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik dipasar lokal maupun interasional, pada kawasan teknopolitan kawasan industri direnankan di bangun pada lahan seluas 818 Ha dengan fasilitas industri oleo pangan, industri oleo kimia dasar, industri oleo kimia turunan, industri kecil dan menengah (IKM), aneka industri pengolahan pangan yang menghasilkan kebutuhan pokok.

Zona industri dalam perencanaannya dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang. Penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta kebutuhannya memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitarnya. Disediaknya lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar permukiman. Memperhatikan ketentuan peraturan perundangan terkait dengan pengembangan lahan industri.

Zona industri dibagi menjadi 2 lokasi, yaitu zona industri 1 untuk Kawasan industri UKM dan Aneka Industri yang tidak mengandung banyak limbah seluas 193Ha, dan zona industri 2 untuk industri skala menengah dan besar di lahan seluas 625Ha. Zona industri 2 diletakkan pada wilayah yang tidak berdekatan dengan zona perumahan sesuai dengan peraturan pengembangan kawasan industri bahwa kawasan industri harus berjarak minimal 2 Km dari zona perumahan dan dipisahkan dengan sabuk hijau atau *green belt* yaitu zona RTH.

Zona RTH yang dimaksud disini bukan merupakan *green belt* keseluruhan, melainkan terdiri dari RTH publik dan RTH Privat. Zona industri dalam perencanaannya akan dibangun pada tahun 2021 dan diharapkan akan selesai pada tahun 2033

Pengembangan zona industri saat ini sedang mempersiapkan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS), pabrik bioplastik, pabrik pellet untuk bahan bakar power plan listrik, pengembangan pabrik – pabrik ini dibantu oleh 5 perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan, perusahaan – perusahaan yang bekerjasama antara yakni PT. Rekayasa Engineering, PT. Pindad (PERSERO), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) dan PPKS Medan.

Selain membangun pabrik industri pihak yang telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan nantinya akan melakukan upaya pemberdayaan dan revitalisasi kebun sawit swadaya. Saat ini dari pihak perusahaan yang telah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan terdapat 1 pihak yang sudah berperan dalam mewadahi dan memfasilitasi kegiatan riset tentang pembibitan dan klinik kelapa sawit yaitu PPKS Medan, dimana PPKS Medan telah membantu dalam pengembangan pembibitan dan klinik kelapa sawit.

Pemerintah dan pihak terkait pembangunan kawasan industri sepakat untuk bekerjasama dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan revitalisasi kelapa sawit dimana kelapa sawit yang sudah tidak produktif digantikan dengan bibit unggul yang lebih baik. Industri dimangun sebagai pendukung terwujudnya kemandirian dan fungsional kawasan teknopolitan sehingga dapat bersaing di pasar.

#### 5.2.4 Zona Permukiman

Perkembangan permukiman yang diidentifikasi relatif tersebar di kecamatan – kecamatan di Kabupaten Pelalawan, baik yang masih merupakan permukiman perdesaan, maupun yang telah menjadi atau bergeser menjadi permukiman perkotaan.

Zona permukiman menyediakan lahan untuk perkembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi, mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat, dan merefleksikan pola – pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang. Zona permukiman dalam perencanaannya dibangun pada lahan seluas 502 Ha dengan kriteria permukiman yakni permukiman besar, permukiman kecil, dan permukiman sedang dengan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung.

Zona permukiman dibagi menjadi dua kategori yakni zona permukiman kepadatan tinggi dan zona permukiman kepadatan sedang, dimana pada zona permukiman tinggi didalam perencanaan dengan kepadatan bangunan > 100 rumah/hektarnya. Sedangkan zona permukiman kepadatan sedang di dalam perencanaannya memiliki kepadatan bangunan 40 – 100 rumah/hektarnya.

Peruntukan kawasan permukiman di teknopolitan bersifat menyebar dan terintegrasi dengan fasilitas lainnya. Peruntukan lahan permukiman akan berkembang pada lokasi – lokasi yang strategis dan terintegrasi dengan fungsi lain seperti pendidikan dan riset. Permukiman yang diidentifikasi relatif tersebar di sekitar kawasan teknopolitan, baik yang masih merupakan permukiman

perdesaan, maupun yang telah menjadi atau bergerak menjadi permukiman perkotaan.

Permukiman pada kawasan teknopolitan didalam perencanaannya lahann berbentuk pola *grid* yang dibatasi oleh jalan dan perkembangannya dibatasi oleh sungai dan kawasan peruntukan lahan lainnya.

Kawasan permukiman pada teknopolitan saat ini sudah memiliki masterplan dan kondisinya saat ini permukiman berkembang berkembang sepanjang pinggiran jalan yang merupakan permukiman pedesaan. Diharapkan dalam kurun waktu 20 tahun ang akan datang kawasan ini akan berkembang pada kawasan sepanjang jalan lokal dan lingkungan serta pada kawasan pusat pertumbuhan bary kawasan, saat ini permukiman yang berada pada kawasan teknopolitan adalah permukiman pedesaan yang berkembang dan tumbuh dengan sendirinya,

#### **5.2.5 Zona Perkantoran**

Zona perkantoran dibangun pada kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoraan, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitas yang dikembangkan dengan bentuk tunggal/renggang secara horizontal dan vertikal. Kriteria perencanaan zona perkantoran adalah kantor pengelola kawasan dengan skala pelayanan kawasan dan jalan akses minimum adalah jalan kolektor tidak berbatas lagsung degan perumahan.

Pembangunan kawasan perkantoran direncanakan akan dibangun beberapa jenis perkantora diantaranya perkantoran dan pusat riset kelapa sawit, lembaga litbang, perkantoran pusat inovasi, perkantoran pemerintahan,

perkantoran swasta, dan perbankan. Pada bangunan perkantoran kompleks, diwajibkan menyediakan fasilitas tempat parkir sesuai dengan jumlah kebutuhan penyediaan parkir di pekarangan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan.

Kawasan perkantoran merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran, tempat bekerja dengan fasilitas yang dikembangkan. Adanya kawasan perkantoran ini nantinya dapat mengembangkan kegiatan pengelolaan kawasan sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung untuk menjamin pelayanan pada masyarakat dan melindungi penggunaan lahan.

Zona ini merupakan pengelompokan dari fungsi pemerintah dan perkantoran pemerintah kecamatan. Zona ini akan berkembang menjadi dua zona yakni zona fasilitas sosial dan fasilitas umum. Peruntukan lahan pusat pemerintah di kawasan teknopolitan berada di kelurahan langgam. Perkembangan kondisi eksisting saat ini, peruntukan lahan pusat pemerintahan tersebut dapat berkembang menjadi satu dengan pemanfaatan lahan lainnya seperti sosial maupun fasilitas umum.

Kondisi peruntukan lahan perkantoran pemerintahan saat ini terdiri atas perkantoran pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan/desa dan perkantoran lainnya. Kawasan perkantoran saat ini sudah terdapat rencana yang akan dikembangkan pada tahun 2033. Kondisi saat ini perkantoran masih menggunakan fasilitas desa yang sudah terbagun sejak awal.

### 5.2.6 Zona Perdagagn dan Jasa

Zona perdagangan dan jasa akan dibangun pada lahan seluas 282 Ha dengan arah pemanfaatan lahan berupa perdagangan jasa deret dan perdagangan jasa tunggal (pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan), kantor pemerintah dan swasta yang merupakan bagian dari jasa, bangunan penginapan (hotel, guuest house), bangunan tempat pertemuan (aula, tempat konferensi), bangunan pariwisata/rekreasi di ruang tertutup(bioskop, area bermain).

Zona perdagangan dan jasa dibagi menjadi dua kategori yakni zona perdagagn dan jasa pusat pelayanan kawasan, dan zona perdagangan dan jasa subpusat pelayanan kawasan. Zona perdagangan dan jasa pusat pelayanan memiliki kriteria sebagai berikut zona perdagangan dan jasa berada pada lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang,dan rendah dan akan diatur lebih lanjut didalam peraturan zonasi lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal dengan skala pelayanan perdagangan yang direncanakan adalah tingkat kawasan dan regional, dengan akses jalan minimum adalah jalan kolektor tidak berbatasan langsung dengan perumahan.

Zona perdagangan dan jasa subpusat pelayanan kawasan dengan kriteria perencanaan sebagai berikut zona perdagangan dan jasa berada pada lingkungan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi, skala pelayanan perdagangan dan jasa direncanakan adalah tingkat bagian wilayah kawasan, serta akses jalan minimum adalah jalan kolektor sebagai bagian fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

Secara umum, peruntukan lahan pada koridor Jalan kolektor diarahkan pada fungsi perdagangan jasa maupun fungsi campuran, yaitu campuran permukiman dengan perdagangan jasa. Penciptaan citra kawasan perdagangan dan jasa akan dapat menunjukkan identitas kawasan koridor Jalan kolektor dan menunjukkan perkembangan kegiatan perekonomian kawasan kota Langgam.

Pada perencanaannya kawasan perdagangan dan jasa menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja dalam wadah berupa perkantoran, pertokoan, jasa, rekreasi, dan layanan masyarakat, menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan kelengkapan fisik berupa sarana penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari pusat pelayanan kawasan dan sub pusat pelayanan kawasan, pada pusat pelayanan kawasan difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan, tempat bekerja, tempat hiburan rekreasi dengan skala pelayanan regional. Sedangkan sub pusat layanan kawasan terdiri dari pengembangan kelompok kegiatan perdagangan, tempat bekerja, tempat hiburan rekreasi dengan skala pelayanan regional dikembangkan dalam bentuk deret.

Kawasan perdagangan dan jasa saat ini sudah memasuki tahap perencanaan tetapi belum terlaksana sepenuhnya hal ini dikarenakan di dalam perencanaannya akan difokuskan pada tahun 2033, saat ini fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia terdiri atas toko, warung, dan fasilitas pasar. Pada kawasan perdagangan dan jasa menyatu dengan peruntukan lahan permukiman, dan tersebar hampir pada setiap jalan pusat permukiman.

### 5.2.7 Zona Fasilitas Umum

Zona fasilitas umum pada kawasan teknopolitan meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, sarana ekonomi, sarana sosial, sarana olahraga, prasarana jalan, prasarana drainase. Fasilitas kesehatan dalam perencanaannya akan menempatkan penyediaan fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani masyarakat, sarana kesehatan yang dikembangkan dalam zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit pembantu tipe C, rumah sakit wilayah tipe B, rumah sakit tipe A. sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama mengacu pada ketentuanketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan.

Fasilitas olahraga pada kawasan teknopolitan akan direncanakan dengan dikembangkan dalam satu zona tersendiri dengan tingkat pelayanan kecamatan yang meliputi gedung olahraga, kolam renang, gelanggang olahraga, stadion mini, sarana olahraga dengan skala pelayanan lebih rendah dari kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi.

Fasilitas sosial pada kawasan teknopolitan direncanakan dengan kriteria sebagai berikut, sarana sosial yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana sosial tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar yang meliputi balai warga, gedung serba guna, balai latihan kerja, panti sosial, gedung jumpa bakti, gedung pertemuan umum dengan besaran minimum diatur didalam peraturan zonasi sarana sosial dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun satu kesatuan dengan permukiman dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan.

Penataan sistem jaringan jalan dalam kawasan perencanaan antara lain, dilakukannya pelebaran jalan, meningkatkan kualitas badan jalan untuk kenyamanan berkendara, mengembangkan jalur pejalan kaki yang terpisah dengan jalur kendaraan. Jaringan jalan pada kawasan teknopolitan pelalawan membentuk pola linier kosentrik, linier dibentuk oleh jaringan jalan utama yang menghubungkan zona – zona didalam kawasan teknopolitan. Terkait dengan pengembangan drainase kawasan teknopolitan diperlukan pendekatan terhadap pengelolaan air yang berkesinambungan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari dan dapat bermanfaat untuk kelangsungan ekosistem. Konsep drainase baru yang akan dibangun pada kawasan teknopolitan adalah konsep *eco drainase*/drainase ramah lingkungan melalui upaya mengelola kelebihan air dengan cara sebesar – besarnya diresapkan kedalam tanah guna meningkatkan kandungan ar tanah untuk cadangan pada musim kemarau serta memperkuat struktur tanah.

Berdasarkan dari rencana yang ada saat ini fasilitas umum yang akan dibangun pada kawasan teknopolitan meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas

peribadatan, balai pertemuan warga, sarana ekonomi, sarana sosial, sarana olahraga, prasarana jalan dan drainase, prasarana listri, prasarana air bersih, prasarana sanitas, dan prasarana persampahan. Pembangunan zona fasilitas umum dalam pelaksanaannya dibangun pada tahun 2013 – 2033.

Peruntukan lahan fasilitas kesehatan pada kawasan teknopolitan saat ini terdiri atas puskesmas yang melayani pada tingkat kecamatan yang terletak dekat dengan kawasan permukiman. Fasilitas olahraga pada kawasan teknopolitan saat ini tersedia lapangan bolah dan voli yang dibentuk bersama oleh masyarakat. Fasilitas peribadatan yang ada saat ini adalah mesjid dan musholah. Fasilitas sosial saat ini telah tersedia balai adat yang difungsikan oleh masyarakat sekitar sebagai pusat kegiatan sarana ekonomi yang ada saat ini adalah warung, pasar mingguan, dan toko klontong. Sarana sosial yang ada pada kawasan teknopolitan terdiri dari pos kambling, prasarana jalan dan drainase saat ini belum semuanya terpenuhi jalan yang ada pada kawasan teknopolitan terdiri dari jalan yang telah di aspal, jalan yang di semen dan jalan yang telah diperkeras. Sedangkan drainase terdiri dari drainase alami daan buatan. Fasilitas prasarana air bersih masyarakat menggunakan sumur galian dan sudah memiliki MCK (mandi cuci kakus). Sedangkan fasilitas prasarana persampahan masyarakat menggunakan cara dibakar.

**Tabel 5.1 Rencana dan Eksisting Kawasan Teknopolitan**

Rencana	Gambar	Eksisting	Gambar
<p>Zona Pendidikan :                      Dalam arahnya akan dibangun perguruan tinggi, sekolah kepolisian, tk dan sd, smp dan sma, akademis komunikasi, area perkembangan</p>		<p>Zona Pendidikan :                      Kawasan pendidikan saat ini tersedia sekolah tinggi teknologi pelalawan (STTP)</p>	
<p>Zona Riset :                      Dalam arahnya akan dibangun perkantoran dan pusat penelitian kelapa sawit, lembaga litbang, perkantoran pusat inovasi, laboratorium perternakan, dan cadangan untuk lahan pengembangan pusat riset</p>		<p>Zona Riset :                      Kawasan riset saat ini sudah tersedia yang berada dalam satu area kawasan pendidikan sebagai pusat enelitian kelapa sawit</p>	

Rencana	Gambar	Eksisting	Gambar
<p>Zona Industri :                      Dalam arahnya akan dibangun industri oleo pangan, industri oleo kimia dasar, industri kimia turunan, industri kecil dan menengah, aneka industri pengolahan pangan</p>		<p>Zona Industri :                      Kawasan industri saat ini sedang mempersiapkan lahan untuk membangun industri yang telah direncanakan dalam perencanaannya kawasan industri akan dilaksanakan pada tahun 2021 - 2033</p>	
<p>Zona Permukiman :                      Dalam arahnya kawasan perumahan akan dibangun 3 kategori perumahan yakni perumahan besar, kecil, dan sedang</p>		<p>Zona Permukiman :                      Kawasan permukiman saat ini telah tersedia perumahan penduduk yang tumbuh dengan sendirinya berupa permukiman pedesaan dalam perencanaannya kawasan permukiman akan dikembangkan pada tahun 2021 - 2033</p>	

Rencana	Gambar	Eksisting	Gambar
<p>Zona Perkantoran :                      Dalam arahnya akan dibangun perkantoran dan pusat riset kelapa sawit, lembaga litbang, perkantoran pusat inovasi, perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, dan perbankan</p>		<p>Zona Perkantoran :                      Kawasan perkantoran saat ini belum tersedia dan telah tersedia masterplan kawasan, kondisi saat ini perkantoran masih menggunakan fasilitas desa yang sudah terbagun sejak awal dalam perencanaannya kawasan perkantoran akan dikembangkan pada tahun 2033</p>	
<p>Zona Perdagangan dan jasa :                      Dalam arahnya akan dibangun perdagangan jasa deret dan perdagangan jasa tunggal (pasar tradisional, pasar modern, pusat perbelanjaan), kantor pemerintah dan swasta yang merupakan bagian dari jasa, bangunan penginapan (hotel, guuest house), bangunan tempat pertemuan (aula, tempat konferensi), bangunan pariwisata/rekreasi di ruang tertutup(bioskop, area bermain).</p>		<p>Zona Perdagangan dan Jasa :                      Kawasan perdagangan dan jasa saat ini sudah memasuki tahap perencanaan tetapi belum terlaksana sepenuhnya hal ini dikarenakan di dalam perencanaannya akan difokuskan pada tahun 2033, saat ini fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia terdiri atas toko, warung, dan fasilitas pasar</p>	

Rencana	Gambar	Eksisting	Gambar
<p>Zona Fasilitas Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana pelayanan kesehatan yang nantinya akan dibangun rumah sakit tipe A, B, C</li> <li>Sarana pelayanan umum olahraga yang nantinya akan dibangun gedung olahraga</li> <li>Sarana pelayanan umum peribadatan</li> <li>Fasilitas sosial yang meliputi balai warga, gedung serba guna, balai latihan kerja, panti sosial, gedung jumpa bakti, gedung pertemuan umum</li> <li>Jaringan jalan membentuk pola linier kosentrik, linier dibentuk oleh jaringan jalan utama yang menghubungkan zona – zona didalam kawasan teknopolitan.</li> <li>Drainase Konsep drainase baru yang akan dibangun pada</li> </ol>		<p>Zona Fasilitas Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana pelayanan kesehatan saat ini terdiri atas puskesmas yang melayani pada tingkat kecamatan</li> <li>Sarana pelayanan umum olahraga saat ini tersedia lapangan bolah dan voli yang dibentuk bersama oleh masyarakat</li> <li>Sarana pelayanan umum peribadatan saat ini adalah mesjid dan mushola</li> <li>Fasilitas sosial saat ini telah tersedia balai adat</li> <li>Jaringan jalan terdiri dari jalan yang telah di aspal, jalan yang di semen dan jalan yang telah diperkeras</li> <li>Drainase terdiri dari drainase alami dan buatan. Pembangunan fasilitas umum dilaksanakan mulai dari tahun 2013 – 2033 secara bertahap</li> </ol>	

Rencana	Gambar	Eksisting	Gambar
<p>kawasan teknopolitan adalah konsep <i>eco drainase</i>/drainase ramah lingkungan melalui upaya mengelola kelebihan air</p>			

Sumber : Analisi,2019

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dan dilihat dari ciri – ciri yang telah ditetapkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi pada tahun 2012 kawasan teknopolitan Pelalawan sudah sesuai dengan ciri – ciri kawasan khusus teknopolitan. Adapun pencapaian target pengembangan kawasan teknopolitan Pelalawan dapat dilihat pada tabel 5.2 matriks indikasi program berikut :

**Tabel 5.2 Matriks Indikasi Program Pengembangan Kawasan Teknopoitan**

Indikasi Program		Tahun Pelaksanaan									
		2013 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 - 2026	2026 - 2031	2031 - 2033
Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana di dalam Kawasan											
1	Pembangunan Zona Pendidikan										
2	Pembangunan Zona Riset										
3	Pembangunan Pusat Riset Kelapa Sawit										
4	Pembangunan Kawasan Perumahan										
5	Pembangunan Kawasan Industri dan UMKM										
6	Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial										
7	Pembangunan Kawasan Sarana Pelayanan Umum										

Sumber : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi,2015

Berdasarkan matriks tersebut terlihat bahwa untuk pembangunan zona pendidikan sudah dilaksanakan pada tahun 2016 dan saat ini zona tersebut sudah mulai beroperasi. Pada pembangunan zona riset, sudah mulai dibangun sejak tahun 2016 dan akan dilakukan secara bertahap hingga pada tahun 2033 sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pada tahun 2017 pembangunan riset kelapa sawit yang dibantu oleh PPKS Medan saat ini sudah mulai beroperasi. Pada kawasan perumahan untuk di kawasan teknopolitan itu sendiri sesuai dengan perencanaannya akan dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2021 hingga target waktu yang telah ditentukan. Pada kawasan industri dan UMKM (Usaha

Mikro Kecil Menengah) waktu pelaksanaan pembangunannya baru akan dimulai pada tahun 2021.

Kawasan perdagangan dan jasa menjadi salah satu kawasan yang masuk ke dalam perencanaan pembangunan kawasan teknopolitan yang mana sesuai dengan perencanaan, kawasan ini akan dibangun mulai tahun 2031. Kawasan teknopolitan tentunya membutuhkan sarana pelayanan umum yang mana juga sudah masuk dalam perencanaan pembangunan kawasan teknopolitan dan mulai dibangun sejak tahun 2013 secara berkelanjutan hingga target pencapaian kawasan teknopolitan.

**Tabel 5.3 Matrik Indikator Program Perkembangan Kawasan Teknopolitan Saat Ini**

Indikasi Program	Tahun Pelaksanaan									
	2013 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 - 2026	2026 - 2031	2031 - 2033
Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana di dalam Kawasan										
1. Pembangunan Zona Pendidikan										
2. Pembangunan Zona Riset										
3. Pembangunan Pusat Riset Kelapa Sawit										
4. Pembangunan Kawasan Perumahan										
5. Pembangunan Kawasan Industri dan UMKM										
6. Pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial										
7. Pembangunan Kawasan Sarana Pelayanan Umum										

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa saat in program yang telah terlaksana adalah pembangnan zona Pendidikan dan Zona Riset yang mulai dibangun pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2017.

Peta rencana pola ruang kawasan teknopolitan



Peta kondisi eksisting kawasan teknopolitan



### 5.3 Strategi Penanganan Implementasi Kawasan Teknopolitan

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis LFA (*Logical Framework Analysis*) dimana didalam analisis LFA ini terdapat analisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi risiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini.

#### 5.3 1 Analisis Situasi

Tahapan analisis ini merupakan tahapan persiapan yang tidak secara baku harus ditetapkan dalam langkah – langkah pengembangan LFA terhadap suatu kasus. Pada analisis situasi ataupun yang sering juga disebut sebagai analisis konteks, dideskripsiikan mengenai permasalahan atau situasi yang akan dicarikan solusinya melalui pendekatan LFA. Informasi –informasi yang digunakan dapat berupa kondisi pada laporan – laporan perencanaan strategi terdahulu ataupun kompilasi dokumen – dokumen lainnya. (*European Integration Office, 2011*).

Dari penelusuran studi yang dilakukan, secara umum dapat dinyatakan bahwa pengembangan kawasan teknopolitan masih memiliki permasalahan yang dihadapi di kawasan teknopolitan, terutama terkait dengan nilai tambah dan daya saing dalam rangka pembangunan pengembangan teknopolitan berkelanjutan dan berkeadilan.

Namun, kawasan teknopolitan juga menghadapi berbagai masalah/kendala terkait dengan ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelolah. Masalah – masalah tersebut perlu diatasi supaya tidak terjadi hambatan dalam pembangunan kawasan teknopolitan sehingga dapat menciptakan manusia yang berdaya saing

dan menghasilkan produk – produk berkualitas. Masalah/kendala dapat dilihat pada gambar 5. Dibawah ini :



**Gambar 5.4 Isu Permasalahan Pembangunan Kawasan Teknopolitan**

Sumber : Analisis,2019

Permasalahan pembangunan kawasan teknopolitan tentunya akan turut berimbas pada terhambatnya pengembangan kawasan teknopolitan. Hal ini sangat disayangkan mengingat manfaat dan potensi yang dihasilkan oleh kawasan teknopolitan, dalam hal ini adalah pengembangan kawasan teknopolitan. Salah satu manfaat yang paling utama adalah dalam mengatasi kekurangan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### 5.3.2 Analisis Pemangku Kepentingan

Berdasarkan isu –isu strategi terkait pengembangan kawasan teknopolitan , maka berikut ini akan dilakukan identifikasi pemangku kepentingan yang terkait dalam pengembangan kawasan teknopolitan. Secara umum, pemangku kepentingan yang terlibat tersusun dari empat komponen utama, yaitu unsur

pemerintah, akademisi, industri serta komunikasi. Berikut adalah penjelasan mengenai pemangku kepentingan tersebut.

**a. Pemerintah**

Unsur pemerintah yang berkepentingan dalam pengembangan kawasan teknopolitan secara umum meliputi unsur pembuatan kebijakan, litbang, dan permodalan. Unsur birokrasi pemerintah, badan yang terlibat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknopolitan (BPPT).

Dalam aspek pembuatan kebijakan, pihak pemerintah harus mendukung implementasi kebijakan – kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan teknopolitan pemerintah juga memiliki kewenangan dalam mengembangkan kawasan teknopolitan.

Konteks litbang, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan anggarannya dan investasi litbang dan kerjasama litbang antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Pemerintah diharapkan juga dapat mengarahkan arah penelitian yang terpadu sehingga tidak saling berulang dan tumpang tindih serta lebih mengakomodir riset ke arah komersialisasi kawasan teknopolitan.

Potensi komunitas unggulan pada kawasan teknopolitan mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi dan menimbulkan efek yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah mendorong agar kawasan teknopolitan dapat menciptakan inovasi dan prospek unggulan yang akan menaikkan perekonomian Kabupaten Pelalawan.

## **b. Akademis**

Pihak akademisi memiliki kapasitas dalam pengembangan studi – studi kedepannya yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan teknopolitan. Sebagaimana yang dirasakan bahwa studi – mengenai perkembangan dan jaringan inovasi dari akademisi dirasakan masih kurang dan belum sepenuhnya terpenuhi. Bila kawasan teknopolitan sudah mulai berkembang, dukungan riset untuk memajukan teknopolitan tetap diperlukan. Dukungan akademisi diperuntukkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil untuk terlibat dalam pengembangan kawasan teknopolitan yang berbasis teknologi tinggi dengan mengandalkan sumber daya alam.

## **c. Industri**

Pihak industri yang dimaksudkan dalam konteks pengembangan kawasan teknopolitan adalah pengusaha dan juga gabungan pelaku usaha, pada kawasan teknopolitan pengusaha dan gabungan pelaku usaha yang bekerjasama adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI, PT. Rekayasa Engineering, PT. PINDAD (PERSERO), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), dan PPKS Medan. Bila didukung oleh kebijakan pemerintah pihak industri akan mendapatkan keuntungan berlipat dalam menghasilkan produk – prooduk inovasi. Namun saat ini pihak industri masih memiliki kecenderungan pesimis dalam pengembangan kawasan teknopolitan.

## **d. Masyarakat**

Unsur komunitas yang terlibat dalam pengembangan kawasan teknopolitan meliputi masyarakat, serta lembaga masyarakat (LSM). Masyarakat dipercaya

akan mendapatkan manfaat dari pembangunn kawasan teknopolitan. Hal tersebut dikarenakan pengembangan teknopoitan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perluaskan lapangan pekerjaan. Selain itu, dengan dukungan promosi dan kemudahann akses dari pemerintah.

Keberadaan dan peran LSM dalam pengembangan kawasan teknopolitan juga perlu diperhatikan. Pemerintah, akademisi dan juga pihak terkait hendaknya membina hubungan yang baik dengan LSM agar masyarakat tidak diprovokasi untuk bersifat antipasti terhadap pembangunan kawwasan teknopolitan. Pemerintah didukung dengan akademisi dan industri juga senantiasa melakukan promosi, advokasi, dan kampanye publik mengenai manfaat dan dampak positif dari pembangunan kawasan teknopolitan agar masyarakat tidak terhasut untuk bersifat negatif.

### 5.3.3 Analisis *Stakeholder*

Analisis *stakeholder* ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari satu kegiatan program/proyek. Tujuan analisis *stakeholder* yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam isu-isu yang digarap dalam program, peran-perannya, kepentingannya, dan dampak/efek yang ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut terhadap isu. Analisis *stakeholder* dalam penelitian terdiri dari BAPPEDA, PU Kabupaten Pelalawan, kantor camat. Agar lebih jelas analisis *stakeholder* pada Tabel 5.3

**Tabel 5.3 Identifikasi *Stakeholder* yang Terlibat**

No	Stakeholder	Keterangan
1	BAPPEDA Kabupaten Pelalawan	Bidang Penataan Ruang
2	Dinas PU Kabupaten Pelalawan	Bidang SDA
3	Kantor Camat	Bidang Umum & Kemasyarakatan

Sumber: Hasil Analisis, 2019

**Tabel 5.4 Analisis Kepentingan (*Interest*) dan Dampak Instansi Terhadap Implementasi Kawasan Teknopolitan**

No.	Stakeholder	Karakteristik	Masalah	Potensi	Keterlibatan
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	Berwenang dibidang pekerjaan umum, permukiman, penataan ruang, sumber daya, dan tugas pembantu	Pembangunan infrastruktu yang belum selesai	Pengembangan kawasan teknopolitan	Berkontribusi besar dalam pelaksanaan kawasan tekknopolitan
2.	BAPPEDA	Berwenang dalam bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah	Keterbatasan dana hingga mempengaruhi program kegiatan. Serta permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai.	Berkemampuan merencanakan, menkonstruksi, operasional	Mitra dalam pelaksanaan pembangunan
3.	Kecamatan Langgam	Meneima manfaat langsung/ tidak langsung dari program kegiatan pembangunan kawasan teknopolitan	pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat	Kearifan lokal terkait fungsi dan manfaat dari teknopolitan	Penerima manfaat utama dan dampak dari adanya pembangunan kawasan teknopolitan

Sumber: Analisis, 2019

Berdasarkan hasil analisis *stakeholder*, hasil wawancara dengan *stakeholder*, dibawah ini .Hasil wawancara tersebut didapatkan permasalahan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan implementasi kawasan teknopolitan. Hasil wawancara ini diuraikan kedalam analisis permasalahan. Berikut akan ditampilkan tabel hasil wawancara dengan Dinas BAPPEDA Kabupaten Pelalawan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, dan Camat Kecamatan Langgam untuk

dapat menjelaskan permasalahan pada program pembangunan kawasan teknopolitan Kabupaten Pelalawan.

**Tabel 5.5 Hasil Wawancara Instansi**

No	Responden	Hasil Wawancara
1.	Bapak T. Muhammadd Syukran,S.S0s,ME (Kasubbang TU UPTD Kawasan Teknopolitan)	<p>Penyelenggaraan program pembangunan kawasan teknopolitan di Kabupaten Pelalawan merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mencapai program 12 besar perekonomian dunia. Untuk Kabupaten Pelalawan program ini akan diterapkan pada Kecamatan Langgam. Perkembangan kawasan teknopolitan saat ini sudah menyelesaikan pembangunan zona pendidikan dimana pembangunan kawasan teknopolitan ini dibantu oleh unit pelaksanaan teknik yang telah dibentuk untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan. Zona pendidikan dalam oprasionalnya merupakan dana hibah yang telah teranum didalam APBD Kabupaten Pelalawan sebesar 4,3 Miliar rupiah. penyebab dari belum terbentuknya zona lainnya adalah jumlah anggaran yang diperlukan sangat besar dan pembangunan ini diawali dengan menggunakan anggaran APBD sehingga pembanangunan akan direncanakan secara berkelanjutan. Masalah lainnya yang dihadapi oleh pemerintah adalah belum terselesaikannya pembebasan lahan yang akan dijadikan kawasan teknopolitan. Upaya – upaya pemerintah saat ini dalam pelaksanaan pembangunan kawasan ini dengan cara mengadakan seminar – seminar, dan pelatihan kerja, yang berkaitan tentang manfaat dan fungsi kawasan teknopolitan untuk menarik investor agar berinvestas, serta membina masyarakat untuk bersekolah di sekolah tinggi teknologi pelalawan agar menghasilkan sumber daya manusia yang handal untuk mengembangkan kawasan teknopolitann.</p>

No	Responden	Hasil Wawancara
2.	Ibu Henny Hasnita. ST.MT (Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	<p>Kawasan teknopolitan saat ini sudah membangun kawasan pendidikan yang di dalamnya dikembangkan lembaga riset penelitian bibit kelapa sawit dan klinik kelapa sawit. Masalahnya saat ini kondisi aksesibilitas untuk lokasi teknopolitan belum sepenuhnya bagus, kondisi jalan menuju kawasan pendidikan masih berupa jenis jalan dipekeras yang belum di aspal dan belum di semen. Saat ini pemerintah Kabupaten Pelalawan sedang merencanakan penyediaan infrastruktur dasar seperti, peningkatan jalan menuju kawasan dan pembukan jalan serta pembangunan jalan didalam kawasan, sedang merencanakan pembangunan jalan kereta api dari kawasan teknopolitan menuju pelabuhan, merencanakan pembangunan pelabuhan daan pembebasan lahan untuk pelabuhan yang akan dibangun, dan sedang merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTG) yang dibantu oleh BUMN.</p>
3.	Bapak Asa Ari.S.Sos	<p>Program pengembangan kawasan teknopolitan untuk masyarakat akan menerima manfaat langsung dan tidak langsung dari program kegiatan pembangunan kawasan teknopolitan. Saat ini partisipasi masyarakat masih kurang dalam pengetahuan manfaat dan fungsi dari teknopolitan sehingga nantinya akan dilakukan upaya mewujudkan visi dan misi teknopolitan pelalawan yakni pembangunan yang berbasis masyarakat pemerintah akan memberdayakan masyarakat untuk merevitalisasi kebun kelapa sawit dengan cara menghimpun petani swadaya didaalam koperasi yang kemudian akan dikorporatisasi, kebun kelapa sawit skala kecil dari perorangan menjadi manajemen koperasi, sehingga lebh mudah dan efektif dalam meningkatkan produktivitas, pencegahan hama penyakit, memperoleh panen yang berkualitas, serta harga jual yang lebih tinggi.</p>

Sumber: Wawancara Instansi, 2019

#### 5.3.4 Analisis Permasalahan

Analisis masalah dilakukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah utama dan membangun “pohon masalah” (*problem tree*) melalui analisis sebab dan akibat (*analysis of cause and effects*). Analisis masalah dimulai dengan fokus pada masalah-masalah yang dihadapi. Analisis masalah dilakukan secara partisipatif setelah sebelumnya dilakukan analisis *stakeholder*.

##### 5.3.4.1 Analisis Permasalahan Hasil Penelitian

Pengembangan kawasan teknopolitan yang telah direncanakan dalam skala nasional mengalami hambatan sebab ditemukan beberapa masalah dalam mewujudkan kawasan teknopolitan ini. Dari serangkaian rencana yang telah dibuat kawasan teknopolitan terbagi menjadi beberapa zona yaitu zona pendidikan, zona permukiman, zona industri, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona fasilitas umum. Namun dari serangkaian zona tersebut yang telah direncanakan, menurut hasil observasi lapangan yang sudah dilakukan, zona yang saat ini terbagun hanya ada pada zona pendidikan yaitu sekolah tinggi yang saat ini sudah mulai aktif digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar serta lembaga riset yang juga tertapat dalam gedung zona pendidikan. Selain itu pada zona lainnya belum terdapat pembangunan hal ini diduga Karena anggaran kabupaten yang bertahap dalam melakukan pembangunan kawasan ini.

Zona industri pada kawasan teknopolitan saat masih berupa masterplan dan belum terlihat adanya pembangunan. Pihak – pihak yang bekerjasama dalam pembangunan kawasan teknopolitan sampai saat ini hanya 1 pihak yang telah

berkontribusi dalam pengembangan bibit unggul dan klinik kelapa sawit. Permasalahan pembangunan zona industri tentunya akan turut berimbas terhadap pengembangan kawasan teknopolitan dimana produk unggulan dan teknologi yang ditemukan oleh riset tidak dapat disalurkan dan dimanfaatkan.

Infrastruktur pada kawasan juga belum begitu memadai, yang mana aksesibilitas menuju lokasi kondisinya masih berupa jalan tanah dan belum dilakukan perkerasan jalan. Selain itu ketersediaan prasarana drainase atau irigasi masih belum terlihat sehingga ketika potensi hujan tiba kondisi jalan sulit untuk ditempuh akibat medan jalan yang licin dan lunak.

#### **5.3.4.2 Analisis Permasalahan Stakeholder**

Analisis masalah ini dapat dilakukan dengan menggunakan pohon masalah melalui suatu proses sebab akibat. Adapun permasalahan yang dihadapi Kawasan Teknopolitan, berdasarkan hasil wawancara yakni :

1. Keterbatasan APBD/ pendanaan
2. Pembebasan lahan yang belum terselesaikan
3. Infrastruktur yang belum memadai
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemahaman kawasan teknopolitan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan di atas APBD/pendanaan adalah salah satu penyebab dari permasalahan yang di hadapi oleh pihak pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan teknopolitan. Dalam pembangunan kawasan teknopolitan membutuhkan biaya yang cukup besar dimana pemerintah saat ini menggunakan dana dari APBD

sebagai sumber pembangunan yang menjadi hambatan sedangkan anggaran untuk pembangunan relatif kecil.

Permasalahan pembebasan lahan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan menjadi salah satu penghambat dari pembangunan kawasan teknopolitan ini. Belum terselesaikannya ganti rugi pembayaran lahan masyarakat salah satu penyebab keterlambatan belum tercapainya pembangunan kawasan teknopolitan ini.

Infrastruktur yang belum memadai juga menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan, dikarenakan akses yang masih berupa jalan tanah sehingga ketika cuaca hujan jalur susah untuk dilewati oleh truk pengangkut bahan baku. Ditambah dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan, menjadi faktor yang menghambat pembangunan kawasan ini. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu sendiri tentang manfaat dari kawasan teknopolitan ini.

Berdasarkan pada permasalahan di wilayah kawasan Teknopolitan diatas, dirumuskan permasalahan utama di wilayah kawasan Teknopolitan adalah pendanaan dan pembebasan lahan

#### **5.3.4.3 Analisis Permasalahan Program yang belum Terimplementasi pada Kawasan Teknopolitan**

Berdasarkan konsep teknopolitan terdapat program pelatihan universitas termasuk teknologi komunikasi maju, biosains dan bioteknologi, material maju, teknologi lingkungan, serta memelihara budaya melayu pelalawan dengan mewejutkan kekayaan budaya yang akan di kembangkan nantiknya di dalam

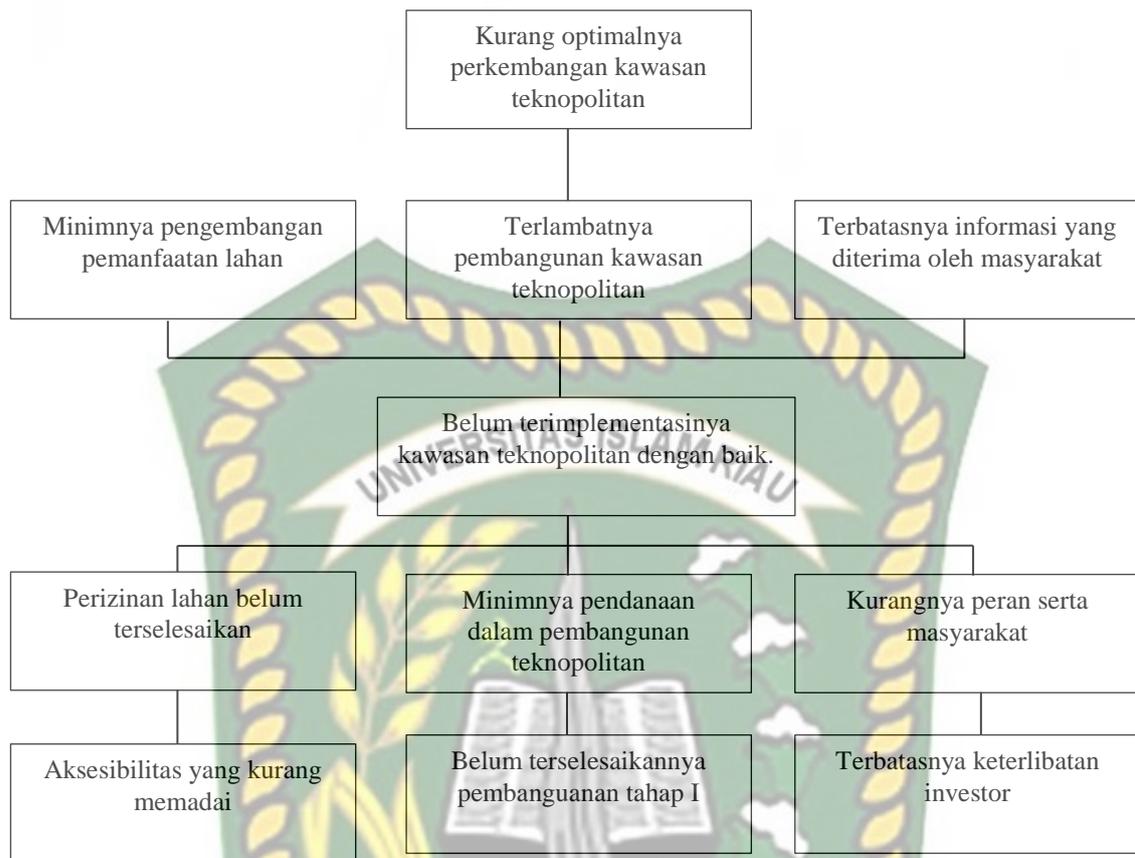
kawasan teknopolitan, sedangkan program yang akan di terapkan pemerintah pada zona industri ada 3 program, yaitu program jangka pendek difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dan penguatan iklim usaha produk hilir yang sudah berkembang, dengan arget produk antara lain yaitu minyak makan dan lemak padatan untuk panganan, asam lemak dan alkohol lemak untuk bahan kimia, serta biodiesel sebagai bahan baku terbaru. Pengembangan jangka menengah difokuskan pada produksi hilir yang bernilai tambah tinggi, dimana juga untuk mendukung ketahanan pangan serta memenuhi kecukupan nutrisi masyarakat indonesia. Pengembangan jangka panjang, akan difokuskan pada produksi bahan kimia canggih turunan minyak sawit sebagai substitusi produk yang berasal dari minyak bumi atau sumber tidak terbarukan lainnya.

Indikasi program dan kegiatan ditetapkan untuk mengoptimalkan penyusunan program – program teknik dan upaya untuk mendorong keikutsertaan semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Indikasi program dan kegiatan ini mulai direncanakan dari tahun 2013 – 2033 yang terbagi dalam 5 tahapan program pembangunan. Indikasi program ini akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pelalawan yaitu :

1. Tahap Persiapan : 2013 – 2015
2. Tahap I : 2016 – 2021
3. Tahap II : 2021 – 2026
4. Tahap III : 2026 – 2031
5. Tahap IV : 2031 – 2033
6. Tahun 2033 visi kawasan teknopolitan tercapai

Program kawasan teknopolitan saat ini sudah memasuki tahap I dimana setelah melakukan tahapan persiapan dilakukan pembangunan pada tahap I ini, pada tahap I ini pembangunan yang dilakukan meliputi pembangunan zona pendidikan dalam hal ini gedung sekolah tinggi teknologi pelalawan, pembangunan zona riset dimana telah dilakukan pembangunan awal lembaga penelitian pada kawasan teknopolitan ini, pembangunan sarana umum dan jaringan jalan, dimana saat ini fasilitas umum belum terpenuhi dan jaringan jalan masih berupa jalan yang diperkeras, sedangkan pembangunan zona lainnya akan dilakukan pada tahap selanjutnya

Strategi permasalahan dalam penelitian ini dikategorikan kedalam dua permasalahan dimana melibatkan penelitian dan Stakeholder untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini :



**Gambar 5.4 Pohon Permasalahan Implementasi Kawasan Teknopolitan**

Sumber : Analisis,2019

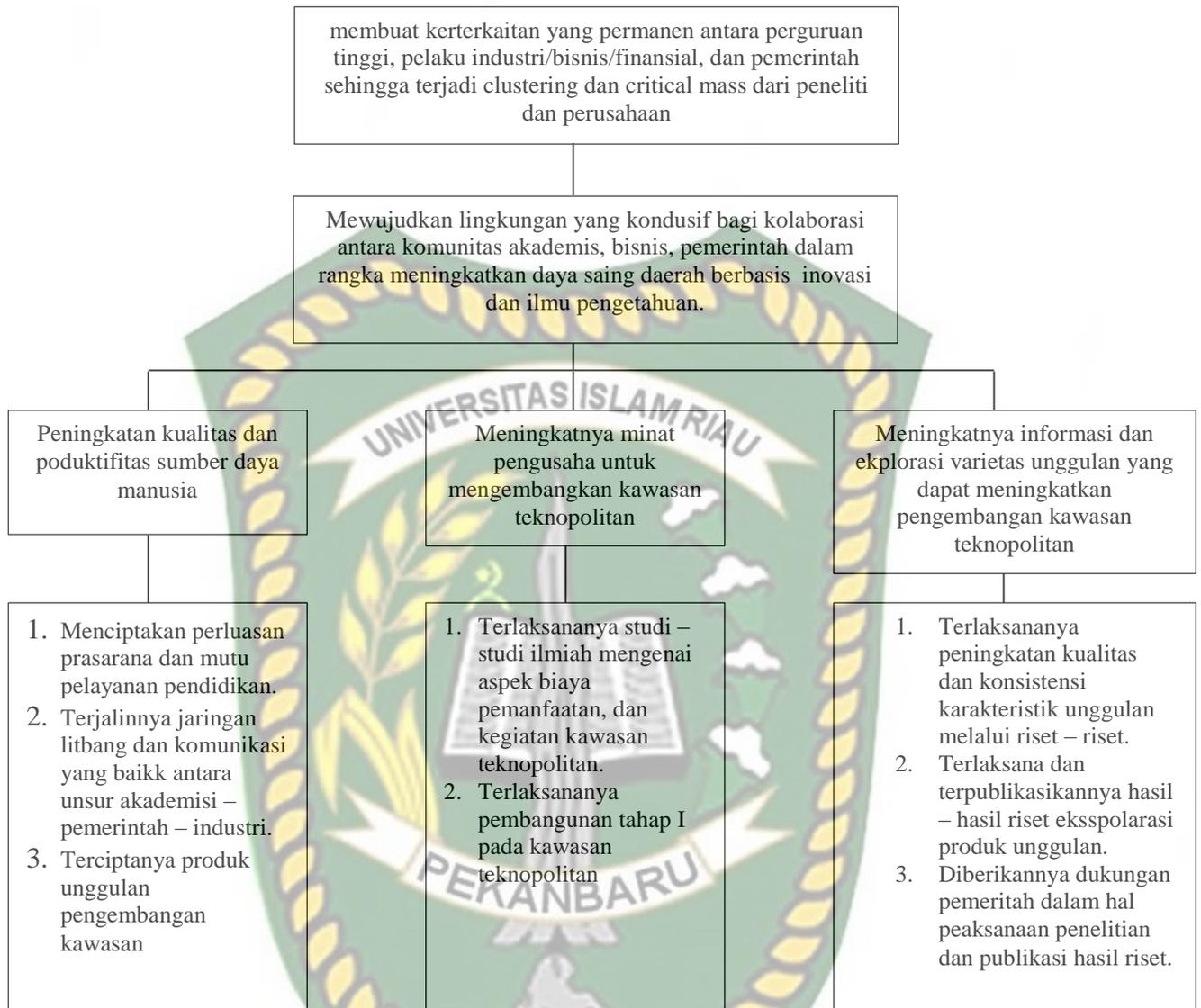
Adapun permasalahan utama yang timbul akibat permasalahan inti adalah: (1) terlambatnya pembangunan kawasan teknopolitan, (2) minimnya pengembangan pemanfaatan lahan, (3) terbatasnya informasi yang diterima oleh masyarakat, (4) kurang optimalnya pembangunan kawasan teknopolitan. Pohon masalah yang telah diuraikan di atas akan menjadi pohon tujuan yang saling berkaitan.

### 5.3.5 Analisis Tujuan

Analisis tujuan dalam arti luas merupakan prosedur yang secara sistematis mengidentifikasi, mengkategorikan, menetapkan, dan jika dianggap perlu menyeimbangkan tujuan-tujuan dari para pihak yang terlibat. Analisis tujuan dan analisis masalah saling mempengaruhi satu dengan lainnya, makin banyak informasi tentang situasi masalah, maka makin lebih spesifik dalam merumuskan tujuan, jenis dan outline dari tujuan-tujuan yang dianalisis mempengaruhi persepsi terhadap masalah-masalah tersebut.

Pohon masalah ditransformasikan menjadi pohon tujuan (*objective tree*) dengan menyatakan kembali masalah-masalah tersebut sebagai tujuan-tujuan. Pohon tujuan dapat dianggap sebagai citra cermin positif dari pohon masalah. Dalam hal ini penting untuk menyusun ulang posisi dari tujuan-tujuan saat pohon tujuan dikembangkan.

Berdasarkan pohon masalah maka diketahui tujuan utama adalah **“Untuk membuat keterkaitan yang permanen antara perguruan tinggi, pelaku industri/bisnis/finansial, dan pemerintah sehingga terjadi clustering dan critical mass dari peneliti dan perusahaan”**



**Gambar 5.5 Pohon Tujuan Implementasi Kawasan Teknopolitan**

Sumber : Analisis,2019

### 5.3.6 Analisis Alternatif Strategi Pengembangan

Tahapan analisis alternatif strategi pengembangan kawasan teknopolitan dilakukan untuk memilah tujuan dan permasalahan utama yang akan ditindaklanjuti dalam tahapan LFA selanjutnya. Umumnya, tidak semua

permasalahan dan tujuan yang teridentifikasi dapat dilibatkan dalam matriks LFA karena akan membuat kegiatan pengembangan kurang fokus dan rinci.

Penyusunan alternatif strategi pengembangan yang dilakukan di penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan studi literatur serta diskusi dengan pakar. Bahan – bahan yang dijadikan bahan pertimbangan adalah hasil – hasil yang di peroleh pada tahapan LFA sebelumnya.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis alternatif strategi pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) identifikasi kegiatan – tujuan pada pohon tujuan yang dapat dijdikan alternatif strategi; (2) eliminasi tujuan yang tidak diinginkan atau sulit untuk dicapai; (3) eliminasi tujuan yang dapat dicapai oleh pengembangan kegiatan lain yang sejenis; (4) diskusi implikasi yang mungkin diterima oleh grub target kegiatan pengembangan; dan (6) memilih salah satu alternatif strategi sebagai strategi kegiatan pengembangan.

### **5.3.7 Penyusunan Matriks *Logical Framework (Logframe Matrix)***

Tahapan terakhir dalam analisis LFA adalah penyusunan *logframe matrix* (matriks LFA). Pada matriks yang disusun tersebut disajikan secara sistematis dan terfokus mengenai kegiatan, indikator, perangkat verifikasi dan asumsi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengembangan kawasan teknopolitan. Kolom asumsi pada bagian kanan matriks dimaksudkan sebagai hal – hal pada kondisi ekstenal yang perlu dipenuhi agar logika vertikal pada matriks dapat terlaksana. Matriks LFA untuk pengembangan kawasan teknopolitan yang disusun pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.6

**Tabel 5.6 Matriks LFA Implementasi Kawasan Teknopolitan**

No.	Hirarki Logis	Indikator	Alat Verifikasi Indikator	Asumsi dan Resiko
1.	<i>Goal/Impact :</i> Membuat Keterkaitan permanen antara perguruan tinggi, pelaku industri, dan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pendidikan, Meningkatkan minat investor pelaku bisnis</li> <li>2. Peran pemerintah dalam pembangunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data mahasiswa/i perguruan tinggi.</li> <li>2. Data perusahaan yang bekerja sama.</li> <li>3. Data keikutsertaan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka kesadaran pentingnya pendidikan bertambah.</li> <li>2. Adanya skema pemerintah mengenai penggunaan sumber daya alam dengan baik</li> </ol>
2.	<i>Purpose/outcome :</i> Terimplementasinya kawasan teknopolitan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan lapangan pekerjaan</li> <li>2. Meningkatkan nilai ekonomi</li> <li>3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data indek pembangunan manusia</li> <li>2. Data pendapatan daerah</li> <li>3. Data angka pengangguran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peningkatan taraf hidup masyarakat</li> <li>2. Peningkatan penghasilan daerah kabupaten.</li> </ol>
3.	<i>Output :</i> Terbangunnya kawasan berbasis teknologi tinggi dan menghasilkan produk yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan minat investasi investor.</li> <li>2. Meningkatkan produksi petani lokal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data survey investasi yang diberikan pemerintah.</li> <li>2. Data kesejahteraan petani lokal</li> </ol>	Adanya kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pelaku bisnis dan petani lokal
4.	<i>Activities :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kawasan teknopolitan sesuai dengan indikator program yang telah dibuat</li> <li>2. Membangun sarana prasarana pendukung yang memadai</li> <li>3. Dijalankannya jaringan litbang dan komunitas yang baik antara unsur akademis – pemerintah – industri terkait pengembangan kawasan teknopolitan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak – pihak terkait pengembangan kawasan teknopolitan</li> <li>2. Meningkatkan kinerja pembangunan sarana prasarana</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama riset dan promosi hasil riset yang melibatkan unsur akademis pemerintah dan pelaku usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data kerjasama pihak yang terlibat</li> <li>2. Data perkembangan sarana prasarana kawasan teknopolitan</li> <li>3. Data publikasi artikel ilmiah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong kerjasama investor dalam pengembangan teknopolitan</li> <li>2. Meningkatnya perkembangan sarana prasarana penunjang pengembangan kawasan</li> <li>3. Pihak pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha memiliki visi, misi dan basis rencana yang telah disepakati bersama sebelumnya</li> </ol>

Sumber : Analisis, 2019

Berdasarkan matriks LFA yang berhasil disusun pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga aktivitas utama yang perlu diimplementasikan dalam usaha pengembangan kawasan teknopolitan. Ketiga kegiatan tersebut adalah: (1) membangun kawasan teknopolitan sesuai dengan indikator program yang telah dibuat sebelumnya; (2) membangun sarana dan prasarana yang memadai; dan (3) Dijalankannya jaringan litbang dan komunitas yang baik antara unsur akademis – pemerintah – industri terkait pengembangan kawasan teknopolitan Berdasarkan dari hasil yang di dapat, diputuskan bahwa perlu dipilih satu dari tiga kegiatan yang tersusun tersebut sebagai suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan sebagai langkah utama dan langkah awal pengembangan. Kegiatan yang dipilih sebagai kebijakan yang perlu diambil adalah perumusan dan eksekusi dijalankannya jaringan litbang sehingga dapat mendukung perkembangan kawasan teknopolitan. Aktivitas yang telah disusun diharapkan dapat menghasilkan output yakni terbangunnya kawasan berbasis teknologi tinggi dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Pemilihann kegiatan tersebut sebagai kebijakan awal adalah didasarkan hal – hal berikut : (1) potensi komuditas unggulan yang ada pada kawasan teknopolitan; (2) komuditas unggulan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah; (3) pembangunan kawasan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan; (4) terbentuknya kawasan akan menjadikan Kabupaten Pelalawan menjadi kawasan ekonomi nasiona yang menghasilkan inovasi melalui teknologi morden..

Untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan, maka kebijakan perlu diambil secara *top dwon* oleh pemerintah. Pengambilan kebijakan perlu mengkoordinasikan elemen – elemen *stakeholder* lain yang terkait dalam

pengembangan kawasan teknopolitan. Langkah awal dalam kebijakan tersebut secara nyata adalah berupa intruksi kepada UPT ( pihak yang saat ini mengelolah pengembangan kawasan teknopolitan) untuk melakukan usaha – usaha pengembangan kondisi perkembangan dan pemanfaatan kawasan teknopolitan. Pada saat yang bersamaan, perlu dilakukan pula kegiatan simulasi badan penelitian yang kompeten untuk mengembangkan riset pengembangan kawasan teknopolitan.



## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menyusun kebijakan tentang kawasan teknopolitan yang tertuang dalam RPJP DAN PRJM Provinsi Riau dan RPJM Kabupaten Pelalawan dalam penerapannya pemerintah Provinsi Riau mendukung pengembangan teknopolitan pelalawan sebagai pusat perekonomian, dan pemda Kabupaten Pelalawan Dalam mewujudkan prioritas pembangunan dan fokus sasaran unggulan pembangunan, ditemukan kendala seperti keterbatasan sumber daya keuangan pembangunan, di tengah-tengah banyaknya tuntutan pemenuhan kebutuhan akan pembangunan yang harus dicapai dalam masa lima tahun sesuai tercantum RPJMD 2011-2016, maka diperlukan pemulihan dan penentua prioritas pembangunan serta fokus sasaran unggulan yang diperhitungkan mampu dicapai pada tahun akhir masa pimpinan daerah. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah membentuk unit pelayanan teknis (UPT) dalam pengembangan teknopolitan serta bekerjasama dengan beberapa pihak investor untuk pengembangan kawasan teknopolitan ini. Hal ini dilakukan melihat dari potensi dari kawasan teknopolitan itu sendiri yakni kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Pelalawan.

Pengembangan kawasan teknopolitan yang terdiri dari 7 zona telah memasuki tahap I perkembangan dimana pada tahapan ini telah dibangun kawasan pendidikan berupa sekolah tinggi teknologi pelalawan dan lembaga riset yang meneliti bibit kelapa sawit dan klinik kelapa sawit sedangkan di dukung

dengan mulai dibangunnya sarana prasarana seperti jalan menuju lokasi teknopolitan yang telah dibuka dan diperkeras, sedangkan untuk zona lainnya masih dalam tahap perencanaan dan telah melakukan pembukaan lahan hal ini dikarenakan pembangunan kawasan teknopolitan dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan dari hasil yang di dapat, diputuskan bahwa perlu dipilih satu dari tiga kegiatan yang tersusun tersebut sebagai suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan sebagai langkah utama dan langkah awal pengembangan. Kegiatan yang dipilih sebagai kebijakan yang perlu diambil adalah perumusan dan eksekusi, dijalkannya jaringan litbang sehingga dapat mendukung perkembangan kawasan teknopolitan yang diharapkan dapat membangun kawasan berbasis teknologi tinggi dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan, maka kebijakan perlu diambil secara *top down* oleh pemerintah. Pengambilan kebijakan perlu mengkoordinasikan elemen – elemen *stakeholder* lain yang terkait dalam pengembangan kawasan teknopolitan. Langkah awal dalam kebijakan tersebut secara nyata adalah berupa intruksi kepada UPT ( pihak yang saat ini mengelolah pengembangan kawasan teknopolitan) untuk melakukan usaha – usaha pengembangan kondisi perkembangan dan pemanfaatan kawasan teknopolitan. Pada saat yang bersamaan, perlu dilakukan pula kegiatan simulasi badan penelitian yang kompeten untuk mengembangkan riset pengembangan kawasan teknopolitan.

## 6.2 Saran

1. Kepada pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan agar mampu bekerjasama didalam pembangunan kawasan teknopolitan ini sehingga kawasan ini bisa terwujud dengan baik.
2. Kepada pihak swasta diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu pihak pemerintah di dalam membangun serta mewujudkan kawasan ini sehingga dapat di manfaatkan dengan semestinya dan dapat menambah pendapatan bagi daerah nantinya.
3. Kepada masyarakat yang terlibat didalam pembangunan kawasan teknoplitan mampu mendukung setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, baik di dalam pembangunan fisik, sosial maupun ekonomi. Pihak masarakat juga memiliki peran dalam mengawasi serta menjaga segala pembangunan yang telah dilakukan, dimana tanpa adanya dukungan dari masyarakat tentu suatu pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik.
4. Dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini dan dapat menjadi referensi di dalam menyusun skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Association of University Technology Managers (AUTM), Mike, 2000. The AUTM Licensing Survey, Fiscal Year 1999. Association of University Technology Managers, Chicago, IL.
- Astri Priyani Meiningrum. 2017, *Kapasitas pemerintah kabupaten Pelalawan dalam pembangunan kawasan teknopolitan*.
- AusAID. 2005. *AusGuidedeline Activity Design: The Logical Framework Approach* Australian Agency For International Development, Commonwealth Of Australia.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2012, *Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan*.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kecamatan Langgam dalam Angka*
- Badan Pusat Statistik. 2018, *Kabupaten Pelalawan dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kecamatan Langgam dalam Angka*
- Bappeda Kabupaten Pelalawan & BPPT. *Masterplan Kawasan Teknopolitan Kabupaten Pelalawan Tahun*. 2015
- Basuki. 2006, *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governabce: Malang, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) REUB*.
- Dermantoto, A. 2009. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Djarwanto. 1994, *Pokok – Pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknik Penulisan Skepsi*: Yogyakarta. Liberty.
- European Integration Office. 2011. *Guide to The Logical Framework Approach: A Key Tool For Project Cycle Management – Second Ediition Republic Of Serbia Govenment – European Integration Office*, Belgrade
- Fathur Rahman. 2016, *Penerapan Konsep Teknopolitan Sebagai Strategi untuk Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*.

- Firdaus.2006,*Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Komoditas Pertanian Potensial di Kabupaten Singingi*: Bogor, Institusii Pertanian Bogor
- Kementrian Riaet dan Teknologi.2017. Diakses dari <https://news.detik.com>,diakses pada 30 November 2019.
- Kriyanto Rahmad.2006. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*: Jakarta, Kncana Perdana Media Grub.
- Muctar Luthfi Malik Al- Azhar,dkk.2013, *Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Public*.
- Nursalam.2008, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian*: Jakarta. Salemba Medika.
- Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung CV Mandar Maju.
- Sjamsuddin.2006,*Perisipasi dan Good Governance*: Bandung, Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono.2010,*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Research dan Development*:Bandung, Alfabeta.
- Tjiptoherijanto, Prijono.2010,*Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangan*: Jakarta, Press.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 *tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 *tentang Kawasan Ekonomi Khusus Utama*, I Gusti Bagus.2012, *Metode Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*: Yogyakarta, CV. Andi Offset.
- Warseno.2014,*Model Pengelolaan Kawasan Teknopolitan*: Jawa Timur, Universitas Jember.
- Wawan K. Tolinggi.2019, *Strategic Role Identification Of Agro-Science Technopark Management In Gorontalo Province*. University Gorontalo, Gorontalo.